

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)
KECAMATAN TELUK BAYUR
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN TELUK BAYUR**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya semata-mata kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj – IP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2022 dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dan **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah** wajib menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj – IP) dan Perjanjian Kerja. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan bahwa setiap akhir Tahun Anggaran Instansi Pemerintah, menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Diharapkan dengan adanya (LKj-IP) ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan serta menjadi pedoman bagi para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Teluk Bayur, Januari 2023

Camat Teluk Bayur,


ENDANG IRIANI, ST
PEMBINA TK I
NIP. 196911221998032003

IKTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Berau setiap akhir tahun menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggung jawaban formal kepada Bupati, melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis lembaga sebagai media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Inspektorat Kabupaten Berau ini, memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja yang direncanakan. (sesuai dengan SK LAN No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003)

Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (Output) penting, Kecamatan Teluk Bayur mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Pelayanan Umum yang cepat dan tepat ke masyarakat Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan

Berdasarkan hasil capaian kinerja program dan evaluasi kinerja kegiatan maka prestasi yang dicapai Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2022 dengan predikat : **CC “ Cukup (Memadai)** perlu banyak perbaikan perubahan yang tidak mendasar dengan nilai (**57,17** %) dan ini sebagai dasar untuk dipergunakan perbaikan LKjIPdi Tahun 2023 dan tahun tahun selanjutnya.

Demikian LKjIP ini dibuat, mudah-mudahan bisa sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Kecamatan Teluk Bayur

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
AB I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Gambaran Umum Kecamatan Teluk Bayur	
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.5 Struktur Organisasi	16
1.6 Sumber Daya Manusia	16
1.7 Permasalahan Utama (isu-isu strategis)	19
1.8 Sistematisasi Penyusunan	20
Bab II : Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	22
2.1 Rencana Strategis	22
2.1.1 Visi dan Misi	23
2.1.2 Tujuan dan sasaran	30
2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program	32
2.2 Indikator Kinerja Utama	38
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	39
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	59
Bab III : Akuntabilitas Kinerja	75
3.1 Tindak Lanjut Hasil evaluasi Tahun Sebelumnya	76
3.2 Capaian Kinerja Perangkat daerah	78
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	83
3.3.1 Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2021	114
3.3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020, dan beberapa Tahun Terakhir	118

3.3.3 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen perencanaan strategis organisasi	119
3.3.4 Perbandingan Realisasi kinerja tahun ini dengan Standar nasional (jika Ada)	119
3.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	120
3.3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya	122
3.3.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau kegagalan Pernyataan Kinerja	125
3.4 Realisasi Anggaran	130

Bab IV : Laporan kinerja sekretariat dan seksi berdasarkan perjanjian

Kinerja dan Indikator Kinerja Individu

4.1 Sekretariat	145
4.1.1 Camat	145
4.1.2 Sekretariats Camat	153
4.1.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	167
4.1.4 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program , Keuangan Dan Aset	177
4.2 Kepala Seksi Pemerintahan	193
4.3 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	196
4.4 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	206
4.5 Kepala Seksi Pelayanan Umum	213
4.6 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	219

Bab V : Penutup	229
-----------------	-----

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Kinerja Tahunan 2023
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Pengukuran Kinerja Tahunan 2023
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023
6. Matrik Renstra Kec Tl.Bayur 2021 – 2026
7. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Triwulan IV Kec. Tl. Bayur 2022
8. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
9. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022
10. Cascading dll

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang dibangun diatas pondasi Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik. Sistem Manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sector public dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Atas dasar tersebut Sistem LKj-IP dibangun dan dikembangkan agar Instansi Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan amanah yang didapat untuk kemudian mempertanggung jawabkan kinerja yang dicapai kepada para stakeholder, disamping itu system LKj-IP juga merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan Visi dan Misi organisasi.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam duani birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj-IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj-IP berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah npada Kantor Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau maka perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalamsuatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja berorientasi kepada pencapaian hasil.

Kantor Kecamatan Teluk Bayur merupakan salah satu Kecamatan yang terdekat dari Ibu Kota Kabupaten dengan luas wilayah adalah : 175,70 Km Persegi terdiri dari 2(dua) Kelurahan dan 4 (empat) Kampung Yaitu :

LNO. u	KELURAHAN	KODE KELURAHAN /KAMPUNG	LUAS (Km ²)
1.	Kampung Labanan Makmur	2006.09	9, 52
2.	Kampung Labanan Jaya	2006.09	14, 38
3.	Kampung Labanan Makarti	2006.09	14, 38
4.	Kampung Tumbit Melayu	2006.09	93, 98
5.	Kelurahan Teluk Bayur	64.03.09.1002	33,59
6.	Kelurahan Rinding	64.03.09.1003	10, 19
JUMLAH			175,70

Daratan : 175,64Km²

Luas Perairan : 0,36 Km²

Jumlah : 175,70Km²

Adapun batas – batas Kecamatan Teluk Bayur, yaitu :

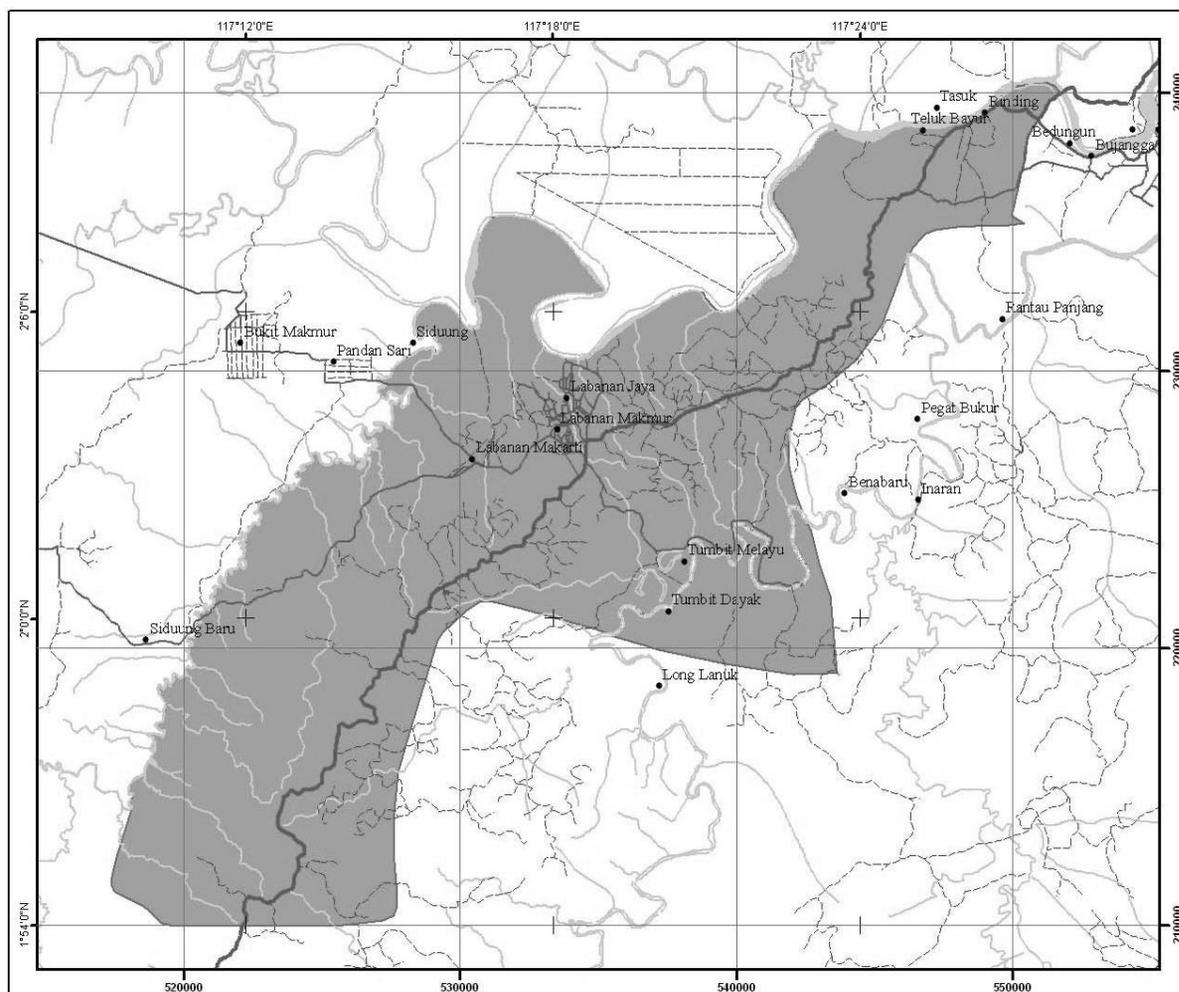
Sebelah Utara Kecamatan Segah

Sebelah Timur Kecamatan

Kelay Sebelah Selatan Tanjung

Redeb

Sebelah Barat Kecamatan Gunung Tabur



Gambar PETA Kecamatan Teluk Bayur

Dari luas wilayah tersebut diatas jumlah penduduk Kecamatan Teluk Bayur sampai pada Desember 2022 sebagai berikut :

No	Kelurahan / Kampung	Jumlah RT	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	L+P
1.	Labanan Makmur	13	1386	1982	1734	3.716
2.	Labanan Jaya	11	980	1470	1345	2.815
3.	Labanan Makarti	9	542	852	740	1.592
4.	Tumbit Melayu	13	1.031	1663	1295	2.958
5.	Kelurahan Teluk Bayur	25	3.753	6031	5421	11452
6.	Kelurahan Rinding	13	3512	5525	4989	10514
		84	11.204	17.523	15.524	31.204

Penduduk Laki – Laki **17.523**: jiwa

Penduduk Perempuan **15.524**: jiwa

Jumlah Laki + Perempuan **33.047** jiwa

Pertumbuhan penduduk Kecamatan Teluk Bayur dari Tahun 2021 s/d 2022 bertambah menjadi 1.400 org.(Th. 2020=30.144- Tahun 2022=28.744)

Pembagian wilayah Kelurahan / Kampung definitive terdiri 2 (dua) Kelurahan dan 4 (empat) Kampung, yaitu :

Dari luasan Kecamatan Teluk Bayur mempunyai Sumber Daya Alam yang memadai dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan untuk menciptakan wawasan serta produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, dalam upaya mengembangkan sector ekonomi keratif pemuda Kecamatan Teluk Bayur Membentuk kelompok kelompok tani yang antara lai kelompok Petani Sawit, Kelmпок Tani Ternak Ayam, Kelompok Tani Kolam ikan keramba dan lain lain.

Kecamatan Teluk Bayur juga memilikiPasar Induk dan Bandara Kalimarau Kabupaten Berau yang ada diwilayah Kecamatan Teluk Bayur dan dan juga mempunyai obyek wisata berupa Alun Alun dan Bangunan Peninggalan Jaman Belanda.



BANDARA KALIMARAU BERAU



SMA NEGERI 2 BERAU



PASAR SANGGAM ADJIDILAYAS

Wilayah Kecamatan Teluk Bayur juga terdapat sarana dan prasana Pendidikan dan Kesehatan, antara lain meliputi :

➤ *Bidang Pendidikan :*

- 9 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 9 Taman Kanak-Kanak (TK)
- 11 Sekolah Dasar Negeri (SD)
- 3 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)
- 1 Madrasah Tsanawiyah (MTS)

- 1 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)
- 1 Sekolah Madrasah Aliyah

➤ *Bidang Kesehatan :*

- 2 Puskesmas Induk
- 2 Pelayanan Puskesmas 24 JAM
- 4 Puskesmas Pembantu
- 2 Polindes
- 31 Posyandu



PUSKESMAS TELUK BAYUR

Dasar Pembentukan Organisasi

Kantor Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau merupakan unsur Pendukung Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Berau, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.

Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Daerah Nomro 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu diatus Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Secara umum Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemampuan keuangan daerah;
- b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDAP;
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran yang harus diwujudkan;
- d. Jenis dan banyaknya tugas;
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
- f. Jumlah kepadatan penduduk dan;
- g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas.

Dari cakupan berbagai faktor diatas diharapkan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “ **HEMAT STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI** “ yang berarti bahwa walaupun struktur organisasi minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Bayur dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sedangkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Teluk Bayur dibentuk dan diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pasal 2 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kedudukan Kecamatan Teluk Bayur adalah sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten Berau yang berada di bawah Bupati. Tugas pokok Camat Kecamatan Teluk Bayur adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, tata laksana dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Masyarakat di

wilayah Kecamatan Teluk Bayur. Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teluk Bayur akan diuraikan sebagai berikut :

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kampung dan/atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5, menyelenggarakan fungsi ;

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan ;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan kelurahan
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub bag sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu

- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengkoordinasikan pelayanan teknis administrative baik intern kecamatan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan Kecamatan guna tertib administrasi
- h. Merencanakan mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan public kecamatan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. Melaporkan kegiatan sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bag Penyusunan Program, Keuangan Dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbag Penyusunan Program. Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program kecamatan
- g. Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;

- h. Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realitas yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan startegik jangka pendek, menengah dan panjang;
- i. Menyusun konsep telahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan local sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j. Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- k. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan public Kecamatan dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku;
- l. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;
- m. Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan kecamatan;
- n. Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup kecamatan;
- o. Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan potongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan kecamatan;
- p. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran dilingkungan kecamatan
- q. Menyusun instrument pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- r. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi dilingkungan kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. Mengatur pengelolaan atk dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan kecamatan agar penggunaannya efektif dan efisien;
- u. Mengevaluasi dan menilai kerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- v. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- w. Melaporkan kegiatan Subbag penyusunan program, keuangan dan asset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- x. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- y. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Subbag Umum dan Kepegawaian berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bag umum dan kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bag umum dan kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbag umum dan kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;

- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Subbag umum dan kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu terciptanya suasana aman, bersih dan tertib
- g. Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat menyurat, pengadaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
- h. Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai dilingkungan kecamatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- j. Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjurangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
- k. Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbag umum dan kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah
- n. Melaporkan kegiatan Subbag umum dan kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Kasi Pemerintahan berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Kasi Pemerintahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Kasi Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Kasi Pemerintahan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Kasi Pemerintahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan wilayah kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala kampung/lurah;
- g. Mengontrol penyiapan pedoman pelaksanaan dan memfasilitasi pembinaan pemerintahan dan keagrariaan
- h. Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan pemohon.

- i. Menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memfasilitasi pembinaan social politik pelaksanaan kegiatan pemilu diwilayah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- k. Mengontrol penyusunan laporan kependudukan secara berkala berdasarkan laporan dari kepala kampung/lurah
- l. Memfasilitasi penyelesaian tapal batas kampung /kelurahan
- m. Memfasilitasi pembentukan lembaga pemerintahan kampung (BPK dan LPM) untuk pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- q. Melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan ketertiban berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi ketentraman dan Ketertiban dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi ketentraman dan ketertiban dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing pelaksanaan tindakan pertolongan cepat terhadap bencana yang terjadi di kecamatan dengan menyertakan satuan polisi pamong praja dan regu linmas kecamatan;
- g. Mengontrol proses penerimaan , mencatat, mempelajari surat pengaduan dari masyarakat dan meneruskan kepada atasan untuk dapat tanggapan serta penyelesaian
- h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan rapat insedentil berdasarkan pengaduan, laporan masyarakat dalam rangka mendapatkan penyelesaian sesuai proporsinya;
- i. Merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana alam dan lainnya agar akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin
- j. Mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamanan dilingkungan kantor camat dan sekitarnya membuat jadwal piket;
- k. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk hokum daerah yang bersifat non yustical bersama instansi terkait;
- l. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk hokum daerah yang bersifat non yustical bersama instansi terkait

- m. Merencanakan, memfasilitasi melaksanakan pembinaan serta monitoring kegiatan kesatuanbangsa dan perlindungan masyarakat.
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- p. Melaporkan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi pemberdayaan masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pemberdayaan masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan darimasing-masing kepala kampung/lurah
- g. Membimbing pengumpulan / pengolahan dan evaluasi data dibidang pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan program kerja kecamatan
- h. Mengontrol kegiatan pembinaan terhadap perkoprasian, industry rumah tangga dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- i. Mengontrol kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan diwilyah kecamatan;
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara saran dan prasarana dilingkungan
- k. Membimbing pelaksanaan fasilitas temu karya tingkat kampung dan kelurahan dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat kecamatan
- l. Mengontrol penyusunan daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil forum koordinasi pembangunantingkat kecamatan bersama petugas teknisnya;
- m. Melaksanakan pengawas danpengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan diwilyah kecamatan;
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- p. Melaporkan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

- q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi kesejahteraan sosial berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kesejahteraan sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Kesejahteraan sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kesejahteraan sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- h. Membimbing monitoring pendistribusian bantuan raskin ke kampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui kebenaran laporan data yang masuk dari kampung/kelurahan
- i. Mengontrol pelaksanaan fasilitas dan pembinaan di bidang agama, kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- j. Mengontrol pelaksanaan fasilitas dan pemantauan pemberian bantuan tempat ibadah, yayasan sosial dalam wilayah kecamatan baik dana berasal dari pemerintahan maupun dari swasta;
- k. Membimbing pengolahan data bidang kesejahteraan sosial
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- n. Melaporkan kegiatan seksi kesejahteraan sosial berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

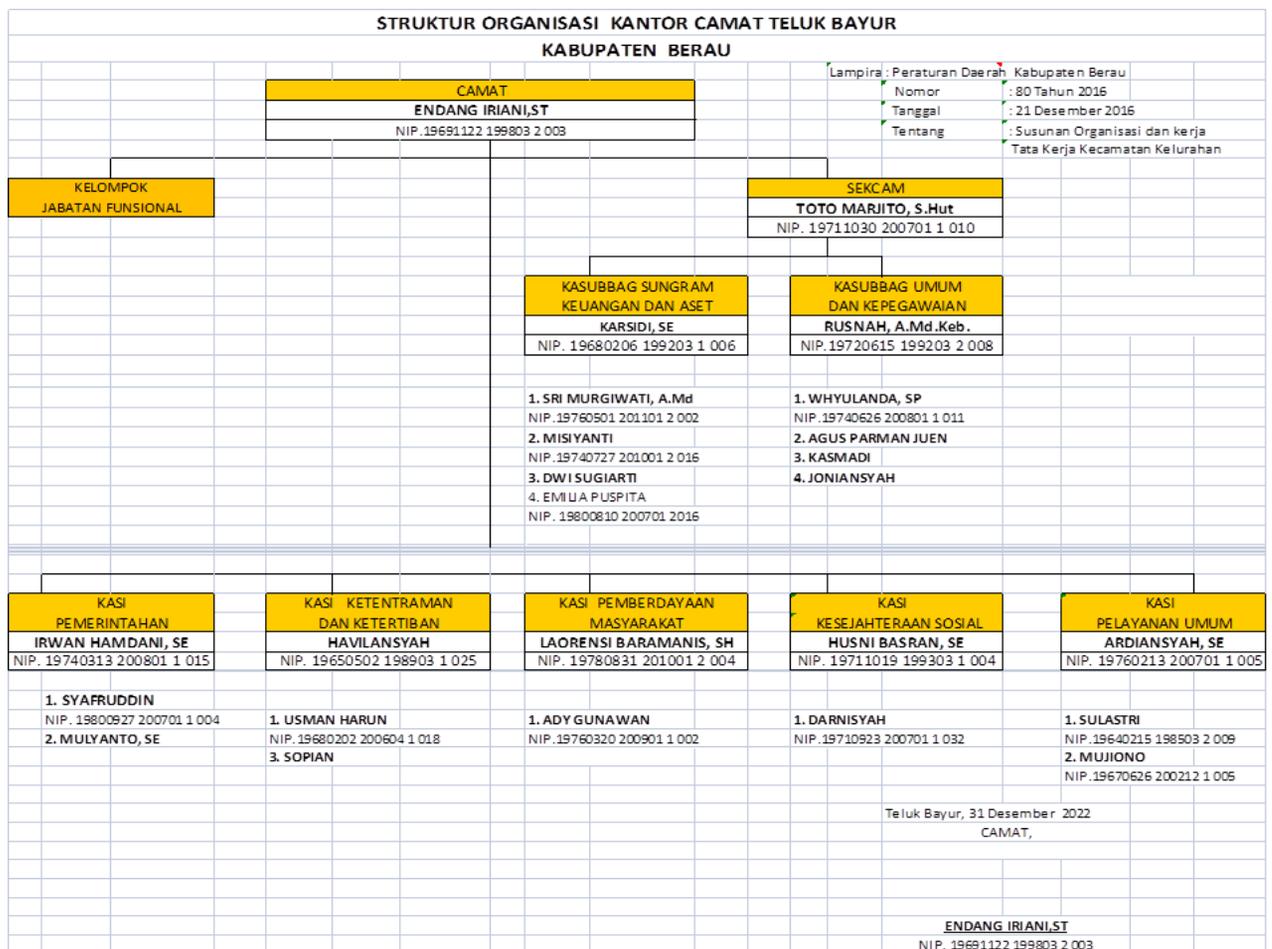
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan umum berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi pelayanan umum dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi pelayanan umum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pelayanan umum melalui

- informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi pelayanan umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 - f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan umum dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Membimbing pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dibidang pelayanan umum;
 - i. Mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang pelayanan umum
 - j. Menjelaskan standar pelayanan baik kepada masyarakat/warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Melakukan koordinasi baik intern maupun ektern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - l. Mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas dikecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - m. Membimbing pengolahan data bidang pelayanan umum
 - n. Mengontrol pembuatan rekomendasi dan perijinan dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
 - o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
 - p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
 - q. Melaporkan kegiatan seksi pelayanan umum berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

1.3 Struktur Organisasi Kecamatan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Kecamatan Teluk Bayur ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat membawahi :
 - a. Kasubag Sungram, Keuangan dan Aset
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Kelurahan
9. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2022

1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Beraur berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselon :

Pendidikan

Sampai dengan 31 Desember 2022 Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Teluk Bayur berjumlah 24 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan S2.

Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Teluk Bayur berjumlah 24 orang, PNS 18 dan 6 orang PTT, jika dirangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan (S1 : 11 Org) (D3 :2 Org) (SLTA : 11 Org) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS dilingkungan Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2022 sebagai berikut :

**SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN TELUK BAYUR
MENURUT PENDIDIKAN**

No	Eksekutif	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat			1					1
2	Sekcam			1					1
3	Subbag Umum & Kepegawaian			1	1	3			2
4	Subbag Sungram, Keuangan dan Aset			2	1	2			5
5	Seksi Pemerintahan			2		1			3
6	Seksi Trantib					3			3
7	Seksi Pemb. Masy			1		1			2
8	Seksi Pelayanan Umum			1		1			2
9	Seksi Kesejahteraan Sosial			2		1			3
Total				11	2	11			24

Golongan dan Eselon

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional dibidangnya, Kantor Kecamatan Teluk Bayur secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi.

Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai dengan 31 Desember 2022 PNS dilingkungan Kecamatan Teluk Bayur yang memiliki **golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 12 orang** diikuti oleh

golongan II sebanyak 5 orang dan PTT sebanyak 6 orang dan golongan I sebanyak 0 orang

Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Kecamatan Teluk Bayur berdasarkan golongan

**SUMBER DAYA APARATUR
KECAMATAN TELUK BAYUR MENURUT GOLONGAN**

No	Eksekutif	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	PTT	Jumlah
1.	Camat	1					1
2.	Sekcam		1				1
3.	Sub Bag Umum & Kepegawaian		2			3	5
4.	Sub Bag SunGram, Keuangan Dan Aset		2	2		1	5
5.	Seksi Pemerintahan		1	1		1	3
7.	Seksi Trantib		1	1		1	3
8.	Seksi Pemb. Masy		1	1			2
9.	Seksi Pelayanan Umum		2				2
10	Seksi Kessos		2				2
Jumlah		1	12	5		6	24

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN TELUK BAYUR
BERDASARKAN TINGKAT GOLONGAN
YANG TERSUSUN DENGAN KRITERIA GENDER**

No	Eksekutif	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Camat		1	1
2.	Sekcam	1		1
3.	Sub Bag Umum & Kepeg.	4	1	5
4.	SubBag,Sungram, Keuangan dan Aset	1	4	5
5.	Seksi Pemerintahan	3		3
6.	Seksi Trantib	3		3
7.	Seksi Pemb. Masy.	1	1	2
8.	Seksi Pel. Umum	2		2

9.	Seksi Kessos	1	1	2
Jumlah		16	8	24

1.4 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Analisa isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan eksepibilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi permasalahan-permasalahan kecamatan Teluk Bayur :Permasalahan Internal
Sumber Daya Manusia Belum Optimal

Secara kuantitas 24 orang pegawai Kecamatan Teluk Bayur sudah memadai tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan ke depan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai, Selain itu pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pelaksanaan

1. Urusan Bidang Keuangan, Dalam Permasalahan atau Kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan DPPA Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2022 ada beberapa program/kegiatan yang kita usulkan di Rencana Kerja yang sangat perlu kami rencanakan itu dari Bapelitbang tidak di masukkan (ditolak) didalam pada waktu kami asistensi, sehingga tidak bisa masuk dalam DPA murni. Sehingga kami harus menunggu pada saat Anggaran Belanja Tambahan (ABT)

✓ *Solusinya disini agar Bagian Bapelitbang dapat melihat apa yang sangat dibutuhkan Kecamatan sesuai dengan keadaan dilapangan agar tidak menjadi kendala kami dalam melaksanakan kegiatan tersebut*

1. Urusan Bidang Keamanan Dan Ketertiban, dalam permasalahan disini kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan perda k -3 masih rendah, jumlah SDM di tingkat Kecamatan masih terbatas

✓ *Solusinya perlu diadakan Sosialisasi Perda k – 3 harus ditingkatkan, mengajukan penambahan personil (SDM) ditingkat Kecamatan/Kelurahan, melakukan pembinaan / pemantauan secara berkesinambungan*

2. Urusan Bidang Pemerintahan dalam permasalahan penyelenggaraan pendaftaran penduduk masih banyak anggota masyarakat yang kurang tanggap dalam

melaporkan perubahan mutasi data kependudukan Contohnya laporan kematian, kelahiran, pindah dating sering telat bahkan tidak lapor sama sekali hal ini menyebabkan kekurangan data yg kurang valid

- ✓ *Solusinya dalam Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa Ketua RT berkewajiban melaporkan mutasi kependudukan oleh sebab itu melalui pembinaan RT yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan berulang kali disampaikan mengenai hal dimaksud*

1.8 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP)

Kecamatan Segah Tahun 2022 adalah Sebagai Berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Gambaran Umum Kecamatan Teluk Bayur

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

1.5 Struktur Organisasi

1.6 Sumber Daya Manusia

1.7 Permasalahan Utama (isu-isu strategis)

1.8 Sistematika Penyusunan

Bab II : Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.2 Tujuan dan sasaran

2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

2.2 Indikator Kinerja Utama

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

2.4 Perjanjian Kinerja (PK)

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

3.1 Tindak Lanjut Hasil evaluasi Tahun Sebelumnya

3.2 Capaian Kinerja Perangkat daerah

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3.1 Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2022

3.3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022, dan beberapa Tahun Terakhir

3.3.3 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen perencanaan strategis organisasi

3.3.4 Perbandingan Realisasi kinerja tahun ini dengan Standar nasional (jika Ada)

3.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

3.3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

3.3.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau kegagalan Pernyataan Kinerja

3.4 Realisasi Anggaran

Bab IV : Laporan Laporan Kinerja Sekretariat dan Seksi Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu

4.1 Sekretariat

4.1.1 Camat

4.1.2 Sekretaris Camat

4.1.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4.1.4 Kepala Sub Penyusunan Program Keuangan dan Aset

4.2 Seksi Pemerintahan

4.3 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

4.4 Seksi Kesejahteraan Sosial

4.5 Seksi pelayanan umum

4.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

BAB V : Penutup Lampiran -

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Startegis

Rencana Strategis Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kecamatan Teluk Bayur. Rencana strategis Kecamatan Teluk Bayur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Camat Teluk Bayur Nomor 22 Tahun 2017 tentang penetapan indikator kinerja Utama /IKU dilingkungan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau yang mengacu pada Penetapan Rencana strategis Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Penetapan Jangka 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Berau terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa rencana strategis Kecamatan Teluk Bayur dibuat pada masa jabatan Bupati, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi akuntabel

Renstra Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD

Kabupaten Berau tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga renstra Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten

Berau merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dengan Stakeholders.

Selanjutnya renstra Kecamatan Teluk Bayur kabupaten Berau tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dimuat program dan Kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

2.1.1 Visi Dan Misi

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu masuk Provinsi Kalimantan Timur, letaknya berada dipaling utara Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Disebelah timur, Berau berbatasan dengan Laut Sulawesi, di sebelah selatan dengan Kabupaten Kutai Timur, di sebelah barat dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari luas wilayah 34.127,47 kilometer persegi, seluas 21.951,71 Kilometer persegi merupakan daratan dan 11.962,42 Kilometer persegi merupakan kawasan laut. Berau tercatat sebagai Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki banyak pulau, jumlahnya mencapai 52 pulau besar dan kecil. Terletak pada titik 10 LU – 20 33 LS dan 11 60 BT – 11 90 BT secara administratif, kabupaten ini terbagi dalam 13 Kecamatan dengan 110 Desa/Kelurahan. Walaupun selama ini pembangunan di Kabupaten Berau sudah dinilai baik oleh sebagian masyarakat, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan kedepan. Temuan data dilapangan menunjukkan bahwa ada lima permasalahan utama yang diharapkan dapat segera diselesaikan oleh pemerintah kabupaten mulai dari pembangunan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, perluasan lapangan pekerjaan/pengentasan pengangguran, pemberian subsidi bagi masyarakat golongan ekonomi lemah,

pengendalian harga dan ketersediaan harga bahan kebutuhan pokok hingga masalah peningkatan dan perluasan akses dan mutu pendidikan dan layanan kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Berau, Bupati dan wakil Bupati Berau Periode 2021-2026, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun kedepan yaitu :

**“MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING
BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”**

1. Sejahtera

Sejahtera yang menjadi Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Berau periode 2021-2026 mempunyai arti bahwa masyarakat Kabupaten Berau dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik- baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

Berau yang sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Berau, penurunan angka kemiskinan penduduk dan peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan daya beli.

2. Unggul

Penjabaran Visi Unggul yang dimaksud adalah mengandung pengertian bahwa wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber Daya yang lebih tinggi dari wilayah lainnya, untuk menciptakan Berau yang unggul dan sejahtera merupakan suatu usaha untuk menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna

menciptakan masyarakat yang cukup pangan, papan dan kualitas hidup masyarakat yang meningkat secara lahir dan bathin menuju masyarakat yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik. Berau yang unggul memiliki maksud Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya daerah yang didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia, potensi sosialekonomi dan pariwisata Kabupaten Berau sebagai kawasan wisata terpadu.

3. Berdaya Saing

Berdaya saing yang dimaksud adalah kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulannya secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat untuk memberikan standar hidup bagi masyarakat. Berdayasaing juga dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat Kabupaten Berau untuk menghadapi tantangan persaingan dimasa depan.

2.1.1.1 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan Pemerintah Daerah beserta komponen-komponennya agar visi yang ditetapkan dapat berhasil diwujudkan dengan baik. Untuk memujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal ini yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyerahan kebutuhan

pembangunan, pemerataan Pembangunan dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata dan pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan akan mempengaruhi pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut. Adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat pentingnya dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan warga sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi selain itu perlindungan hukum dan hak-hak masyarakat sebagai konsumen sarana dan prasarana publik juga perlu mendapatkan kepastian penyelenggaraan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang dapat dikelola secara transparan dan partisipatif serta menjamin keseimbangan untuk generasi mendatang.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Berau dengan cara memenuhi kebutuhan dasar/pokok masyarakat. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingginya aktivitas

ekonomi suatu daerah yang digerakkan oleh sektor industri. Pemerintah Kabupaten Berau harus memperhatikan sektor industri yang telah ada dengan cara menciptakan iklim usaha sehat guna mendorong produktivitas serta daya saing pelaku usaha industri. Pemerintah Kabupaten Berau harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi baik terhadap pelaku industri berkala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan. Dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan peran koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan UMKM dan Koperasi yang berkontribusi terhadap perekonomian Berau.

Misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tidak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata objek laut dan pesisir merupakan andalan daerah wisata Berau.

Pelaku usaha dibidang kepariwisataan didukung penuh dengan adanya industri-industri Kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata kemudian disinergikan dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata. Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal. Hal ini ditandai oleh adanya pengembangan usaha kecil yang berbasis rumah tangga (home industry), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan usaha pedagang musiman dan penguatan daya saing para pedagang keliling, selain itu misi ini diarahkan pada pemberdayaan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi sektor informal ini mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dengan demikian taraf hidup semakin baik dan kemakmuran masyarakat Berau akan bisa terwujud.

3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Berau. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi

target dalam misi ini, melalui misi ini diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis. Dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Berau. Dengan demikian akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan serta menghasilkan outcome yang mampu berdaya saing dalam memasuki globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga meliputi pendidikan non formal. Pendidikan non formal termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk menanggulangi penyakit masyarakat (narkoba, Perzinahan,dll).

Isi ini diarahkan juga untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktifitas masyarakat disegala bidang akan meningkat.

Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, maka harus diwujudkan Kabupaten Berau Yang Aman, Tertib, bersih dan asri dimana masyarakat Kabupaten Berau adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, dengan pemerintah Kabupaten Berau yang bersih dari KKN dan sungguh- sungguh melayani masyarakat sehingga

Kabupaten Berau secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi.

4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih,berwibawa, transparan, dan akuntabel.

Misi ini memprioritaskan peningkatan Kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan Publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian misi keempat ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, Profesional, Bersih, Berwibawa, Transparan dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Pelayanan Kesehatan dan pendidikan diprioritaskan kepada warga miskin yang diimplementasikan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan murah berkualitas. Kondisi ini ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Persoalan disparitas antar sekolah unggulan dan non unggulan juga menjadi perhatian dalam misi ini.

Misi ini juga mendorong pemerintah menjalankan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Dalam menjalankan misi ini pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan dan izin bangunan yang senantiasa taat terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Berau dan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Berau, maka setiap OPD harus menjalankan visi dan misi dari kepala daerahnya, adapun Misi yang harus dilaksanakan oleh OPD

Kecamatan Teluk Bayur adalah misi Keempat dari Kepala daerah yaitu “ **Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel**”

Dalam mencapai tujuan dari misi Kabupaten Berau yang Keempat, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan Teluk Bayur yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas, disiplin, motivasi kerja dan kinerja aparatur Kecamatan Teluk Bayur untuk menciptakan aparatur yang bersih, cerdas, cepat dan tanggap, ikhlas dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan publik

2. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelayanan prima yang cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada aparat kampung dan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mendukung dan kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat
4. Memberikan atau memfasilitasi aparat kecamatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, diklat, dll dalam rangka mempercepat pelayanan prima.

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Berau juga melakukan Reviuw terhadap Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Baik ditingkat daerah maupun tingkat satuan kerja Perangkat daerah, dalam melakukan reviuw dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan dilakukan reviuw terhadap perencanaan strategis, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja kecamatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil reviuw tersebut selanjutnya

menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur pada tahun 2022.

Hasil rewiuw pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja serta tujuan dan sasaran sehingga menggambarkan keberhasilan tujuan rewiuw rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau antara lain :

- a. Bahwa Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama dari Masing-Masing OPD adalah disesuaikan dengan Visi dan Misi dari Kepala Daerah terpilih.
- b. Indikator Kinerja Utama harus terukur / harus dapat diukur capaian kinerjanya.

Pemerintah Kecamatan juga Melakukan Rewiuw terhadap Rencana Strategis Kecamatan Teluk Bayur yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II.1
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TELUK BAYUR TAHUN 2021 SEBELUM REWIUW

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2035	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Pelayanan Umum/ Pelayanan publik yang Cepat dan Tepat sasaran kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (84,48)	A (85,00)	A (85,50)	A (86,00)	A (86,50)	A (87,00)

TABEL : II.2
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TELUK BAYUR SETELAH REWIUW

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2035	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Pelayanan Umum/ Pelayanan publik yang Cepat dan Tepat sasaran kepada	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (84,48)	A (85,00)	A (85,50)	A (86,00)	A (86,50)	A (87,00)

	Masyarakat								
2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP	B (70,00)					

Tujuan dilakukan reviuw terhadap Indiaktor Kinerja Utama Kecamatan Teluk Bayur dikarenakan pentingnya Nilai evaluasi LKJ-IP terhadap peningkatan

Kinerja Kecamatan Teluk Bayur salah satunya yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Teluk Bayur

2.1.3 Kebijakan, Strategi Arah Kebijakan Dan Program

A. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan apapun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Kecamatan Teluk Bayur.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau memiliki 10 kebijakan resmi yaitu :

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perubahan paradigma pembangunan untuk menempatkan masyarakat sebagai salah satu stakeholder.
2. Menyusun strategi pelaksanaan pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berprestasi untuk mengikuti jenjang pendidikan formal dan non formal yang lebih tinggi.
3. Memberikan pemahaman keada masyarakat tentang peraturan yang harus ditaati.
4. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instasi terkait dalam pembangunan di Kecamatan Teluk Bayur.
5. Memberikan kesempatan yang adil dalam kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal serta pembinaan karier pegawai.
6. Memprioritaskan peningkatan kualitas sarana kerja.
7. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.
8. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kualitas pelayanan.
9. Meningkatkan derajat kesehatan warga dan antisipasi penyakit menular/

berbahayanarkoba.

10. Menciptakan stabilitas keamanan wilayah.

B. Strategi

- 1) Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Prima / Pelayanan umum kepada masyarakat
- 3) Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk meningkatkan SDM masyarakat.
 - 4) Menciptakan sumber sumber peningkatan perekonomian masyarakat yangberbasis potensi ekonomi masyarakat
 - 5) Menciptakan terjadinya komitmen pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
 - 6) Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secera efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan aparatur kampung.
 - 7) Mengikutsertakan aparatur Kecamatan untuk mendapatkan diklat teknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan.
 - 8) Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan seghah untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis.
 - 9) Memfasilitasi kerjasama lembaga /organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.
 - 10) Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDMmasyarakat

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakankeputusan dari stakeholder sebagai pedomanuntuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL : II. 3
ARAH KEBIJAKAN KANTOR CAMAT TELUK BAYUR

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
----------	----------------

Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kampung
Meningkatkan Pelayanan Prima / Pelayanan umum kepada masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kampung
Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kampung

D.

Menciptakan sumber sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat	Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat.
Menciptakan terjadinya komitmen pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan	Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
Mengikutsertakan aparatur Kecamatan untuk mendapatkan diklat teknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan.	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kampung
Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan sejah untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis.	Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi.
Memfasilitasi kerjasama lembaga /organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.	Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi.
Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kampung

D Program

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2022 adalah penjabaran dari pada program Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau yaitu agar tujuan dan sasaran

dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan ditetapkan program kegiatan, Kantor Camat Teluk Bayur menetapkan 6 (Enam) Proram dan 30 (Tiga Puluh) kegiatan dalam tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	23	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
	24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	25	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
	26	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	27	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	28	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	29	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	30	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi instansi pemerintah, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diterbitkan perturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republic Indonesia nomor : per/09/m.pan/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indicator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah.

Adapun indikator kinsrja utama Kecamatan Teluk Bayur Kab.Berau sebagai berikut :

INIDATOR KINERJA UTAMASEBELUM REVIUW

No	Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasara n	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Pelayanan Umum/ Pelayanan publik yang Cepat dan Tepat sasaran kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (84,48)	A (85,00)	A (85,50)	A (86,00)	A (86,50)	A (87,00)
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi Kinerja LKJ-IP	B (70,00)					

Dengan adanya sosialisasi dan penerapan Pemendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD, Pada Tahun 2022 maka Indikator Kinerja Utama Teluk Bayur mengalami perubahan sesuai dengan dimana Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teluk Bayur menjadi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SETELAH REVIUW MENURUT RENSTRA TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Pelayanan Umum/ Pelayanan publik yang Cepat dan Tepat sasaran kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (84,48)	A (85,00)	A (85,50)	A (86,00)	A (86,50)	A (87,00)

Seiring perkembangan perubahan-perubahan yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Teluk Bayur Pada maka Tahun 2022 dilakukan Reviu terkait Indikator Kinerja Utama yang mengalami perubahan dikarena Pentingnya Nilai evaluasi LKJ-IP terhadap Peningkatan Kinerja Kecamatan Segah, Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teluk Bayur pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SETELAH REVIUW

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Pelayanan Umum/ Pelayanan publik yang Cepat dan Tepat sasaran kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (84,48)	A (85,00)	A (85,50)	A (86,00)	A (86,50)	A (87,00)
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	B (70,00)	B (70,00)	B (70,00)	B (70,00)	B (70,00)	B (70,00)

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi atau unit kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi, dipilih selanjutnya ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana tingkat capainnya (targetnya)

Sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam rencana kerja tahunan (RKT), akan tetapi apabila sasaran indikator sasaran pada renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dalam tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada renstra sesuai dengan skala prioritas dan indikator kinerja utamanya. Adapun rencana kerja tahunan kecamatan Teluk Bayur tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau
Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Kualitas pelayanan Umum kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,00
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kineja Kecamatan	Nilai Evaluasi LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (70,00)

Selain itu kantor camat Teluk Bayur juga memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaksanakan selama tahun 2022 yang tertuang dalam DPAP TA 2022 Kantor Camat Teluk Bayur yang terdiri dari 6 (enam) program 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 30 (Tiga puluh) Sub Kegiatan yang terdiri sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2022	
				target	Rp
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Rp 6.332.271.176
7.01.01.2.01.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 60.000.000
7.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi, penyusunan Renja, RKA dan DPA	3 Dok	3 Dok	Rp 25.000.000
7.01.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang disusun, Rencana Aksi, SOP, LKJIP, SKM, LPPD, PK dan Lap Keuangan	5 Dok	5 Dok	Rp 10.000.000
7.01.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan (Evaluasi Renja Per Triwulan)	4 laporan	4 laporan	Rp 25.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 5.428.671.176
7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12 Bulan	12 Bulan	Rp 5.212.426.344
7.01.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Honor Pengelola Administrasi Perencanaan dan Keuangan yg dibayar	12 Bulan	12 Bulan	Rp 65.675.832
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Rp 150.569.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barnag Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laoran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			42000000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang dibuatkan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	56 Stel	56 Stel	42000000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek, pelatihan, studi banding yang dilaksanakan			

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			326600000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen listrik/penrangan bangunan kantor Yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	5000000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	100000000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	2 jenis	5.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan rapat disediakannya bahan logistik kantor	48 kali	48 kali	78.600.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis disediakannya Bahan Cetak dan Penggandaan	3 jenis	3 jenis	7.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis disediakannya bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	2 jenis	2 jenis	5.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tersedianya Dana kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi skpd Keluar Derah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan kali kali	126.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	125.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	3 unit	3 unit	75.000.000
	Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebel yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	50.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sapras pendukung gedung /bangunan lainnya yang diadakan	Unit	Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	230.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengiriman dan materai yang disediakan	2 jenis	2 jenis	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan disediakannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg diperbaiki	6 jenis	6 jenis	15.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan dibayarkannya Jasa pelayanan umum kantor (tenaga kontrak)	4 Orang	4 Orang	110.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	120.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	12 unit	12 unit	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lain	Luas Lahan Bangunan Kantor yang dipelihara	100 m2	100 m2	20.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Presentase pengelolaan izin pembukaan lahan	100%	100%	20.000.000
	Penerbitan Izin Membuka Tanah				20.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Surat Tanah Yang diterbitkan	200 Surat	200 Surat	20.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	50.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kampung yang dibina	4 Kampung	4 Kampung	50.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal	2 Keg	2 Keg	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	724.912.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kampung yang di fasilitasi dalam forum Musrembang di desa	2 Kelurahan 4 Kampung	2 Kelurahan 4 Kampung	50.000.000

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Pejuang Sigap Sejahtera Yang Dibayarkan Honorinya	5 Orang	5 Orang	350.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan (PKK,FKKS,MTQ,dll)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	324.912.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	2.635.000.000
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Terlaksananya pendampingan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat RT di wilayah Kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	30.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun	12 Bulan	12 Bulan	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Operasional Kegiatan Kelurahan dan Peran Serta Masyarakat RT di kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.575.000.000
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang di evaluasi kinerjanya (Lomba Kelurahan)	2 Kelurahan	2 Kelurahan	30.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	810.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dalam penanggulangan bencana dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	810.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			80.000.000
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan forum koordinasi Muspika di kecamatan			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100.560.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kampung Yang difasilitasi dalam Pendampingan pengelolaan keuangan desa ADD/ADK dan pendayagunaan aset desa	4 kampung	4 kampung	80.560.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kampung yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	4 Kampung	4 Kampung	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20.000.000
					8.117.743.176

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) ANGGARAN MURNI
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU
TAHUN 2022**

NO	Sasaran Strategi			Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan (Aktivitas)			
	Uraian	Indikator Kinerja	Target				Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi, penyusunan Renja, RKA dan DPA	3 Dok	25.000.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang disusun, Rencana Aksi, SOP, LKJIP, SKM, LPPD, PK dan Lap Keuangan	5 Dok	12.500.000
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12 Bulan	3.519.668.194
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Honor Pengelola Adminitrasi Perencanaan dan Keuangan yg dibayar	12 Bulan	139.984.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			10.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			15.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen listrik/penrangan bangunan kantor Yang disediakan	12 Jenis	5.499.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	12 Bulan	57.499.200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Bulan	9.991.600

					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan rapat disediakanya bahan logistik kantor	12 Bulan	79.994.000
--	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	------------

					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis disediakan Bahan Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis disediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 Bulan	3.600.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tersedianya Dana kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi skpd Keluar Daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	50.000.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengiriman dan materai yang disediakan	190 lbr	1.999.500
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan disediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	69.945.000

					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg diperbaiki	6 Jenis	24.945.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan dibayarkannya Jasa pelayanan umum kantor (tenaga kontrak)	12 Bulan	208.669.852
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	12 Unit	74.999.984
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lain	Luas Lahan Bangunan Kantor yang dipelihara	4 Buah	20.000.000-

2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			15.000.000
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10.000.000
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Pejuang Sigap Sejahtera Yang Dibayarkan Honorinya	12 Bulan	196.499.860
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan (PKK,FKKS,MTQ,dll)	12 Bulan	145.000.000
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10.000.000
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Operasional Kegiatan Kelurahan dan Peran Serta Masyarakat RT dikelurahan	12 Bulan	2.922.689.140

4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dalam penanggulangan bencana dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	12 Bulan	225.000.000
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah			
						Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan	1 Kegiatan	25.000.000
6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa yang dilaksanakan	12 Bulan	15.000.000

				Jumlah	7.943.485.130
--	--	--	--	--------	---------------

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) ANGGARAN PERUBAHAN
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU**

KANTOR KECAMATAN TELUK BAYUR

TAHUN 2022

No	Sasaran Strategi			Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan (Aktivitas)			
	Uraian	Indikator Kinerja	Target				Uraian	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi, penyusunan Renja, RKA dan DPA	3 Dok	25.000.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang disusun, Rencana Aksi, SOP, LKJIP, SKM, LPPD, PK dan Lap Keuangan	5 Dok	12.500.000
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12 Bulan	5273751435
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Honor Pengelola Adminitrasi Perencanaan dan Keuangan yg dibayar	12 Bulan	190380000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			10.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			15.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen listrik/penrangan bangunan kantor Yang disediakan	12 Jenis	5.499.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	12 Bulan	102788600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Bulan	13386300

					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan rapat disediakanya bahan logistik kantor	12 Bulan	101494000
--	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	-----------

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis disediakan Bahan Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	13645000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis disediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 Bulan	3600000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tersedianya Dana kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi skpd Keluar Daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	140000000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2 Unit	438010000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengiriman dan materai yang disediakan	190 lbr	2992800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan disediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	77145000

					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg diperbaiki	6 Jenis	29745000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan dibayarkannya Jasa pelayanan umum kantor (tenaga kontrak)	12 Bulan	226169832
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	12 Unit	74.999.984
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lain	Luas Lahan Bangunan Kantor yang dipelihara	4 Buah	26000000

2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			15.000.000
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			15000000
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Pejuang Sigap Sejahtera Yang Dibayarkan Honorinya	12 Bulan	214999860
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan (PKK,FKKS,MTQ,dll)	12 Bulan	210000000
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10.000.000
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Operasional Kegiatan Kelurahan dan Peran Serta Masyarakat RT dikelurahan	12 Bulan	3332789036

4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dalam penanggulangan bencana dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	12 Bulan	225.000.000
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah			
						Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan	1 Kegiatan	40000000
6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			59200000
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa yang dilaksanakan	12 Bulan	20000000
Jumlah									10.924.096.647



2.4 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN TELUK BAYUR KABUPATEN BERAUBERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

No	Sasaran	Sebelum Review		Sasaran	Setelah Review	
		Indikator Kinerja	Target 2021		Indikator Kinerja	Capaian Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (86,00)	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (90,03)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	C	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	cc (57,49)

Berdasarkan Anggaran dalam DPA Tahun 2022 Kecamatan Teluk Bayur

Perjanjian Kinerja antara Camat Teluk Bayur dengan Bupati Berau sebagai berikut

PERJANJIAN INERJA TAHUN 2022
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,5
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP/ LAKIP	Nilai	B

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.339.296.130	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.289.189.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	225.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.000.000	
	Jumlah	7.943.485.130	

Kemudian pada tahun 2021 pun terjadi perubahan anggaran yang memang secara rutin terjadi setiap tahunnya yang kita kenal dengan perubahan ABT, dengan adanya perubahan anggaran tersebut pun maka anggaran kantor Camat Teluk Bayur pun berubah sesuai dengan pagu yang diberikan, walaupun dalam perubahan anggaran yang kedua ini ada beberapa kegiatan yang nilainya di nolkan dalam arti kegiatan ini tidak diberikan anggaran dikarenakan masih adanya pandemic covid

19 ini dan adanya larangan mengadakan kegiatan yang sifatnya mengundang banyak orang dalam kegiatan tersebut. maka seiring dengan adanya perubahan anggaran maka perjanjian kinerja kantor

camat Teluk Bayur pun berubah disesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**PERJANJIAN KINERJA REVIUW KEDUA TAHUN 2022
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,5
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP/ LAKIP	Nilai	B

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6,743,708,051	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,000,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,742,788,896	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	225,000,000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40,000,000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75,600,000	
	Jumlah	10,842,096,947	

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN TELUK BAYUR TAHUN 2022

BERDASARKAN DPA TAHUN 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	JUMLAH ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	Rp 4.223.736.746	Rp 1.689.494.698	Rp 675.797.879	Rp 270.319.152	Rp 108.127.661	Teluk Bayur	APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 37.500.000	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 960.000	Teluk Bayur	APBD
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi, penyusunan Renja, RKA dan DPA	100%	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Teluk Bayur	APBD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang disusun, Rencana Aksi, SOP, LKJIP, SKM, LPPD, PK dan Lap Keuangan	100%	Rp 12.500.000	Rp 5.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000	Rp 1.250.000	Teluk Bayur	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 3.659.652.194	Rp 1.463.860.878	Rp 585.544.351	Rp 234.217.740	Rp 93.687.096	Teluk Bayur	APBD
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	100%	Rp 3.519.668.194	Rp 1.407.867.278	Rp 563.146.911	Rp 703.933.639	Rp 351.966.819	Teluk Bayur	APBD
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Honor Pengelola Administrasi Perencanaan dan Keuangan yg dibayar	100%	Rp 139.984.000	Rp 55.993.600	Rp 22.397.440	Rp 27.996.800	Rp 13.998.400	Teluk Bayur	APBD
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.600.000	Rp 640.000	Rp 256.000	Teluk Bayur	APBD
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Teluk Bayur)	Jumlah laoran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.600.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Teluk Bayur	APBD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Teluk Bayur)	Jumlah Pegawai yang dibuatkan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 216.584.600	Rp 86.633.840	Rp 34.653.536	Rp 13.861.414	Rp 5.544.566	Teluk Bayur	APBD

1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen listrik/penrangan bangunan kantor Yang disediakan	100%	Rp 5.499.800	Rp 2.199.920	Rp 879.968	Rp 1.099.960	Rp 549.980	Teluk Bayur	APBD
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100%	Rp 57.499.200	Rp 22.999.680	Rp 9.199.872	Rp 11.499.840	Rp 5.749.920	Teluk Bayur	APBD
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	Rp 9.991.600	Rp 3.996.640	Rp 1.598.656	Rp 1.998.320	Rp 999.160	Teluk Bayur	APBD
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan rapat disediakannya bahan logistik kantor	100%	Rp 79.994.000	Rp 31.997.600	Rp 12.799.040	Rp 15.998.800	Rp 7.999.400	Teluk Bayur	APBD
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis disediakannya Bahan Cetak dan Penggandaan	100%	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.600.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Teluk Bayur	APBD
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis disediakannya bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	100%	Rp 3.600.000	Rp 1.440.000	Rp 576.000	Rp 720.000	Rp 360.000	Teluk Bayur	APBD
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tersedianya Dana kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi skpd Keluar Daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	100%	Rp 50.000.000	Rp 20.000.000	Rp 8.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Teluk Bayur	APBD
1.5.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%							
1.5.9	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	100%							
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94.999.984	37.999.994	Rp 15.199.997	Rp 18.999.997	Rp 9.499.998	Teluk Bayur	APBD
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengiriman dan materai yang disediakan	100%	Rp 1.999.500	Rp 799.800	Rp 319.920	Rp 399.900	Rp 199.950	Teluk Bayur	APBD
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan disediakannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	Rp 69.945.000	Rp 27.978.000	Rp 11.191.200	Rp 13.989.000	Rp 6.994.500	Teluk Bayur	APBD
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg diperbaiki	100%	Rp 24.945.000	Rp 9.978.000	Rp 3.991.200	Rp 4.989.000	Rp 2.494.500	Teluk Bayur	APBD
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan dibayarkannya Jasa pelayanan umum kantor (tenaga kontrak)	100%	Rp 208.669.852	Rp 83.467.941	Rp 33.387.176	Rp 41.733.970	Rp 20.866.985	Teluk Bayur	APBD
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 94.999.984	Rp 37.999.994	Rp 15.199.997	Rp 18.999.997	Rp 9.499.998	Teluk Bayur	APBD

1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	100%	Rp 74.999.984	Rp 29.999.994	Rp 11.999.997	Rp 14.999.997	Rp 7.499.998	Teluk Bayur	APBD
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Lahan Bangunan Kantor yang dipelihara	100%	Rp 20.000.000	Rp 8.000.000	Rp 3.200.000	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000	Teluk Bayur	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kampung yang dibina	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	Rp3.245.178.160	Rp 1.298.071.264	Rp 519.228.506	Rp 649.035.632	Rp 324.517.816	Teluk Bayur	APBD
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 356.499.860	Rp 142.599.944	Rp 57.039.978	Rp 71.299.972	Rp 35.649.986	Teluk Bayur	APBD
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kampung yang di fasilitasi dalam forum Musrembang di desa	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
2.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	Jumlah Pejuang Sigap Sejahtera Yang Dibayarkan Honorinya	100%	Rp 196.499.860	Rp 78.599.944	Rp 31.439.978	Rp 39.299.972	Rp 19.649.986	Teluk Bayur	APBD
2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan (PKK,FKKS,MTQ,dll)	100%	Rp 145.000.000	Rp 58.000.000	Rp 23.200.000	Rp 29.000.000	Rp 14.500.000	Teluk Bayur	APBD
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	Rp2.888.678.300	Rp 1.155.471.320	Rp 462.188.528	Rp 577.735.660	Rp 288.867.830	Teluk Bayur	APBD
3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya pendampingan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat RT di wilayah Kelurahan	100%	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.600.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Teluk Bayur	APBD
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Operasional Kegiatan Kelurahan dan Peran Serta Masyarakat RT dikelurahan	100%	Rp 2.878.678.300	Rp 1.151.471.320	Rp 460.588.528	Rp 575.735.660	Rp 287.867.830	Teluk Bayur	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	Rp 225.000.000	Rp 90.000.000	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 22.500.000	Teluk Bayur	APBD

4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 225.000.000	Rp 90.000.000	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 22.500.000	Teluk Bayur	APBD
1.4.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dalam penanggulangan bencana dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	100%	Rp 225.000.000	Rp 90.000.000	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 22.500.000	Teluk Bayur	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Teluk Bayur	APBD
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Teluk Bayur	APBD
1.5.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan	100%	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Teluk Bayur	APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 50.000.000	Rp 20.000.000	Rp 8.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Teluk Bayur	APBD
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kampung Yang difasilitasi dalam Pendampingan pengelolaan keuangan desa ADD/ADK dan pendayagunaan aset desa	100%	Rp 50.000.000	Rp 20.000.000	Rp 8.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Teluk Bayur	APBD
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kampung Yang difasilitasi dalam Pendampingan pengelolaan keuangan desa ADD/ADK dan pendayagunaan aset desa	100%	Rp 35.000.000	Rp 14.000.000	Rp 5.600.000	Rp 7.000.000	Rp 3.500.000	Teluk Bayur	APBD
6.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa yang dilaksanakan	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
				Rp 7.783.914.906	Rp 3.113.565.962	Rp 1.245.426.385	Rp 982.354.784	Rp 464.145.477		

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN TELUK BAYUR TAHUN 2022										
BERDASARKAN DPA TAHUN 2022										
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	JUMLAH ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	Rp 6.782.107.751	Rp 2.712.843.100	Rp 1.085.137.240	Rp 434.054.896	Rp 173.621.958	Teluk Bayur	APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 37.500.000	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 960.000	Teluk Bayur	APBD
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi, penyusunan Renja, RKA dan DPA	100%	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Teluk Bayur	APBD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang disusun, Rencana Aksi, SOP, LKJIP, SKM, LPPD, PK dan Lap Keuangan	100%	Rp 12.500.000	Rp 5.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000	Rp 1.250.000	Teluk Bayur	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 5.464.131.435	Rp 2.185.652.574	Rp 874.261.030	Rp 349.704.412	Rp 139.881.765	Teluk Bayur	APBD
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	100%	Rp 5.273.751.435	Rp 2.109.500.574	Rp 843.800.230	Rp 1.054.750.287	Rp 527.375.144	Teluk Bayur	APBD
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Jasa Honor Pengelola Adminitrasi Perencanaan dan Keuangan yg dibayar	100%	Rp 190.380.000	Rp 76.152.000	Rp 30.460.800	Rp 38.076.000	Rp 19.038.000	Teluk Bayur	APBD
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barnag Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.600.000	Rp 640.000	Rp 256.000	Teluk Bayur	APBD
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Teluk Bayur)	Jumlah laoran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.600.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Teluk Bayur	APBD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Teluk Bayur)	Jumlah Pegawai yang dibuatkan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 380.413.700	Rp 152.165.480	Rp 60.866.192	Rp 24.346.477	Rp 9.738.591	Teluk Bayur	APBD

1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen listrik/penrangan bangunan kantor Yang disediakan	100%	Rp 5.499.800	Rp 2.199.920	Rp 879.968	Rp 1.099.960	Rp 549.980	Teluk Bayur	APBD
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100%	Rp 102.788.600	Rp 41.115.440	Rp 16.446.176	Rp 20.557.720	Rp 10.278.860	Teluk Bayur	APBD
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	Rp 13.386.300	Rp 5.354.520	Rp 2.141.808	Rp 2.677.260	Rp 1.338.630	Teluk Bayur	APBD
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan rapat disediakan bahan logistik kantor	100%	Rp 101.494.000	Rp 40.597.600	Rp 16.239.040	Rp 20.298.800	Rp 10.149.400	Teluk Bayur	APBD
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis disediakan Bahan Cetak dan Penggandaan	100%	Rp 13.645.000	Rp 5.458.000	Rp 2.183.200	Rp 2.729.000	Rp 1.364.500	Teluk Bayur	APBD
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis disediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	100%	Rp 3.600.000	Rp 1.440.000	Rp 576.000	Rp 720.000	Rp 360.000	Teluk Bayur	APBD
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tersedianya Dana kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi skpd Keluar Derah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	100%	Rp 140.000.000	Rp 56.000.000	Rp 22.400.000	Rp 28.000.000	Rp 14.000.000	Teluk Bayur	APBD
1.5.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 438.010.000				Rp 438.010.000	Teluk Bayur	APBD
1.5.9	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	100%	Rp 438.010.000				Rp 438.010.000	Teluk Bayur	APBD
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	336.052.632	134.421.053	Rp 53.768.421	Rp 67.210.526	Rp 33.605.263	Teluk Bayur	APBD
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengiriman dan materai yang disediakan	100%	Rp 2.992.800	Rp 1.197.120	Rp 478.848	Rp 598.560	Rp 299.280	Teluk Bayur	APBD
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan disediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	Rp 77.145.000	Rp 30.858.000	Rp 12.343.200	Rp 15.429.000	Rp 7.714.500	Teluk Bayur	APBD
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg diperbaiki	100%	Rp 29.745.000	Rp 11.898.000	Rp 4.759.200	Rp 5.949.000	Rp 2.974.500	Teluk Bayur	APBD
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan dibayarkannya Jasa pelayanan umum kantor (tenaga kontrak)	100%	Rp 226.169.832	Rp 90.467.933	Rp 36.187.173	Rp 45.233.966	Rp 22.616.983	Teluk Bayur	APBD
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 100.999.984	Rp 40.399.994	Rp 16.159.997	Rp 20.199.997	Rp 10.099.998	Teluk Bayur	APBD

1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	100%	Rp 74.999.984	Rp 29.999.994	Rp 11.999.997	Rp 14.999.997	Rp 7.499.998	Teluk Bayur	APBD
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Lahan Bangunan Kantor yang dipelihara	100%	Rp 26.000.000	Rp 10.400.000	Rp 4.160.000	Rp 5.200.000	Rp 2.600.000	Teluk Bayur	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kampung yang dibina	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	Rp 3.782.788.896	Rp 1.513.115.558	Rp 605.246.223	Rp 756.557.779	Rp 378.278.890	Teluk Bayur	APBD
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 439.999.860	Rp 175.999.944	Rp 70.399.978	Rp 87.999.972	Rp 43.999.986	Teluk Bayur	APBD
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kampung yang di fasilitasi dalam forum Musrembang di desa	100%	Rp 15.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.400.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Teluk Bayur	APBD
2.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Pejuang Sigap Sejahtera Yang Dibayarkan Honorinya	100%	Rp 214.999.860	Rp 85.999.944	Rp 34.399.978	Rp 42.999.972	Rp 21.499.986	Teluk Bayur	APBD
2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan (PKK,FKKS,MTQ,dll)	100%	Rp 210.000.000	Rp 84.000.000	Rp 33.600.000	Rp 42.000.000	Rp 21.000.000	Teluk Bayur	APBD
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	Rp 3.342.789.036	Rp 1.337.115.614	Rp 534.846.246	Rp 668.557.807	Rp 334.278.904	Teluk Bayur	APBD
3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya pendampingan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat RT di wilayah Kelurahan	100%	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.600.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Teluk Bayur	APBD
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Operasional Kegiatan Kelurahan dan Peran Serta Masyarakat RT di kelurahan	100%	Rp 3.332.789.036	Rp 1.333.115.614	Rp 533.246.246	Rp 666.557.807	Rp 333.278.904	Teluk Bayur	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	Rp 225.000.000	Rp 90.000.000	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 22.500.000	Teluk Bayur	APBD

4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 225.000.000	Rp 90.000.000	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 22.500.000	Teluk Bayur	APBD
1.4.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dalam penanggulangan bencana dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	100%	Rp 225.000.000	Rp 90.000.000	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 22.500.000	Teluk Bayur	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	Rp 40.000.000	Rp 16.000.000	Rp 6.400.000	Rp 8.000.000	Rp 4.000.000	Teluk Bayur	APBD
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Rp 40.000.000	Rp 16.000.000	Rp 6.400.000	Rp 8.000.000	Rp 4.000.000	Teluk Bayur	APBD
1.5.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan	100%	Rp 40.000.000	Rp 16.000.000	Rp 6.400.000	Rp 8.000.000	Rp 4.000.000	Teluk Bayur	APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 79.200.000	Rp 31.680.000	Rp 12.672.000	Rp 15.840.000	Rp 7.920.000	Teluk Bayur	APBD
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kampung Yang difasilitasi dalam Pendampingan pengelolaan keuangan desa ADD/ADK dan pendayagunaan aset desa	100%	Rp 79.200.000	Rp 31.680.000	Rp 12.672.000	Rp 15.840.000	Rp 7.920.000	Teluk Bayur	APBD
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kampung Yang difasilitasi dalam Pendampingan pengelolaan keuangan desa ADD/ADK dan pendayagunaan aset desa	100%	Rp 59.200.000	Rp 23.680.000	Rp 9.472.000	Rp 11.840.000	Rp 5.920.000	Teluk Bayur	APBD
6.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa yang dilaksanakan	100%	Rp 20.000.000	Rp 8.000.000	Rp 3.200.000	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000	Teluk Bayur	APBD
				Rp 10.924.096.647	Rp 4.369.638.659	Rp 1.747.855.464	Rp 1.262.452.675	Rp 587.820.848		

REALISASI ANGGARAN KECAMATAN TELUK BAYUR TAHUN 20201
TAHUN 2022

NO REK	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET	SUMBER DANA	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Teluk Bayur	100%	APBD	6.782.107.751	5.841.631.394	86,13
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 37.500.000	Rp 30.034.100	80,09
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Teluk Bayur	5	APBD	Rp 25.000.000	Rp 22.224.100	88,90
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Teluk Bayur	4	APBD	Rp 12.500.000	Rp 7.810.000	62,48
7.01.01.2.02	Daerah		100%	APBD	Rp 5.464.131.435	Rp 4.971.524.612	90,98
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 5.273.751.435	Rp 4.788.644.612	90,80
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 190.380.000	Rp 182.880.000	96,06
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Teluk Bayur	5	APBD	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Teluk Bayur	25	APBD	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 380.413.700	Rp 368.600.700	96,89
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 5.499.800	Rp 3.902.800	70,96
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Teluk Bayur	5	APBD	Rp 102.788.600	Rp 102.556.600	99,77
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Teluk Bayur	4	APBD	Rp 13.386.300	Rp 12.926.300	96,56
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Teluk Bayur	48	APBD	Rp 101.494.000	Rp 99.166.000	97,71
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Teluk Bayur	3	APBD	Rp 13.645.000	Rp 10.341.800	75,79
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Teluk Bayur	2	APBD	3.600.000	2.000.000	55,56
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Teluk Bayur	30	APBD	Rp 140.000.000	Rp 137.707.200	98,36
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Teluk Bayur	2	APBD	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Teluk Bayur	2	APBD	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 336.052.632	Rp 327.885.332	97,57
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teluk Bayur	2	APBD	2.992.800	2.992.800	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 77.145.000	Rp 70.636.520	91,56
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Teluk Bayur	6	APBD	Rp 29.745.000	Rp 29.500.000	99,18
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 226.169.832	Rp 224.756.012	99,37
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 100.999.984	Rp 100.999.984	100,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 74.999.984	Rp 72.977.550	97,30

7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Teluk Bayur	4	APBD	Rp 26.000.000	Rp 25.980.000	99,92
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Teluk Bayur	4%	APBD	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 3.782.788.896	Rp 3.659.757.714	96,75
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 439.999.860	Rp 421.488.610	95,79
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 15.000.000	Rp 14.960.000	99,73
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 214.999.860	Rp 211.098.310	98,19
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 210.000.000	Rp 195.430.300	93,06
7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Teluk Bayur	100%		Rp 3.342.789.036	Rp 3.238.269.104	96,87
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 10.000.000	Rp 3.350.000	33,50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 3.332.789.036	Rp 3.234.919.104	97,06
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Teluk Bayur	1	APBD	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65
7.01.06.2.01	asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Teluk Bayur	100%	APBD	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 59.200.000	Rp 59.200.000	100,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Teluk Bayur	12	APBD	Rp 20.000.000	Rp 19.720.000	98,60
			100%		Rp 10.924.096.647	Rp 9.650.116.608	88,34

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, berbadan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Teluk Bayur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran Penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen renstra Tahun 2021 – 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau yang merupakan implementasi dari Visi dan misi Kepala daerah.

3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Kriteria Skala Nilai Serapan Kinerja

NO	Interval nilai Serapan	Kriteria
1	82 - 100	Sangat berhasil
2	64 - 81	Tinggi/ Berhasil
3	46 - 63	Cukup Berhasil
4	28 - 45	Rendah
5	0 - 27	Sangat Rendah

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan

tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis/ Penetapan Kinerja.

Dengan pengukuran kinerja ini kita dapat membandingkan capaian kinerja kita tahun ini dengan tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan program- program kita selanjutnya. Untuk itu Kantor Camat Teluk Bayur melakukan beberapahal :

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai untuk mengisi jabatan jabatan di setiap seksi dan sub bagian yang belum memiliki staf sehingga pekerjaandapat dibagi sesuai dengan tupoksi jabatan masing masing pegawai.
- 2) Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin dalam rangka peningkatan kinerja Seksi, Bagian dan Pelaksana.
- 3) Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja.
- 4) Agar SDM di kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau menjadi Aparatur yang handal,terampil serta kreatif perlu disediakan dana untuk mengikuti diklat atau Pelatihan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- 5) Untuk menunjang kelancaran pekerjaan perlu ditambah sarana komputer PC maupun Laptop serta printer yang memadai.
- 6) Untuk menunjang kinerja pelayanan umum kepada masyarakat perlu di berikan petugas yang khusus untuk menangani Pelayanan PATEN Kecamatan.

- 7) Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2 juga perlu ada penambahan guna kelancaran dalam peningkatan kinerja Pegawai Kantor Camat Teluk Bayur.

Dengan peningkatan Kinerja yang sarannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, , diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Berau.

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2004 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja ssasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2022 adalah sebanyak 2 (dua) sasaran. Capaian sasaran diukur berdasarkan Indikator kinerja yang telah ditetapkan Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Bupati Berau dengan Camat Teluk Bayur. pada tahun 2022 Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian kinerja mutlak dan wajib dilaksanakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan di Kantor Camat Teluk Bayur yang akan datang. Capain Kinerja Kantor Camat Teluk Bayur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Capaian kinerja Kantor Camat Teluk Bayur Pada tahun 2022

No	Sasaran	Sebelum Review		Sasaran	Setelah Review	
		Indikator Kinerja	Target 2022		Indikator Kinerja	Capaian Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (86,5)	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (90,03)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	B (64,00)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	Cc (57,17) Hasil evaluasi LKJ-IP tahun 2021

Sedangkan pada Capaian kinerja anggaran pada tahun 2022 apabila dilihat dari jumlah anggaran untuk capaian kinerja yang diperoleh adalah 88,34 % atau sebesar Rp. 9650116608,-dari jumlah anggaran sebesar Rp.10924096647.,- capaian kinerja .dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Capaian kinerja Kantor Camat Teluk
Bayur Berdasarkan Anggaran
Tahun2022**

REALISASI ANGGARAN KECAMATAN TELUK BAYUR TAHUN 2022

NO REK	URAIAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	TARGET
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.782.107.751	5.841.631.394	86,13
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 37.500.000	Rp 30.034.100	80,09
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.000	Rp 22.224.100	88,90
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp 12.500.000	Rp 7.810.000	62,48
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.464.131.435	Rp 4.971.524.612	90,98
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp 5.273.751.435	Rp 4.788.644.612	90,80
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Rp 190.380.000	Rp 182.880.000	96,06
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 380.413.700	Rp 368.600.700	96,89
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12	Rp 5.499.800	Rp 3.902.800	70,96
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp 102.788.600	Rp 102.556.600	99,77
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp 13.386.300	Rp 12.926.300	96,56
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp 101.494.000	Rp 99.166.000	97,71
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp 13.645.000	Rp 10.341.800	75,79
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3.600.000	2.000.000	55,56
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp 140.000.000	Rp 137.707.200	98,36
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78

7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 336.052.632	Rp 327.885.332	97,57
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.992.800	2.992.800	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp 77.145.000	Rp 70.636.520	91,56
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp 29.745.000	Rp 29.500.000	99,18
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp 226.169.832	Rp 224.756.012	99,37
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp 100.999.984	Rp 100.999.984	100,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp 74.999.984	Rp 72.977.550	97,30
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Rp 26.000.000	Rp 25.980.000	99,92
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Rp 3.782.788.896	Rp 3.659.757.714	96,75
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 439.999.860	Rp 421.488.610	95,79
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Rp 15.000.000	Rp 14.960.000	99,73
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	12	Rp 214.999.860	Rp 211.098.310	98,19
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp 210.000.000	Rp 195.430.300	93,06
7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 3.342.789.036	Rp 3.238.269.104	96,87
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12	Rp 10.000.000	Rp 3.350.000	33,50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Rp 3.332.789.036	Rp 3.234.919.104	97,06
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65
7.01.06.2.01	asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	12	Rp 59.200.000	Rp 59.200.000	100,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	12	Rp 20.000.000	Rp 19.720.000	98,60
		100%	Rp 10.924.096.647	Rp 9.650.116.608	88,34

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Teluk Bayur

Evaluasi kinerja harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah di Kabupaten Berau. Evaluasi bertujuan agar ditahun selanjutnya dapat memperbaiki kinerja dari Kantor Camat Teluk Bayur.

Evaluasi & analisis capaian kinerja Kantor Camat Teluk Bayur dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

- 1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.
- 2) Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir jika ada
- 3) Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis organisasi.
- 4) Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional dan Propinsi (jika Ada)
- 5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.
- 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya.
- 7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja yang disertai evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja masing-masing sasaran pada Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau sebagaiberikut :

Sasaran I : Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat

Indikator keberhasilan dan capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan umum/ pelayanan publik kepada masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	CAPAIAN TERGET
Meningkatnya pelayanan umum/pelayanan publik kepada Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat(SKM)	2021	83	95,085
		2022	82	84,714
		2023	84	
		2024	83	
		2025	83	
		2026	84	

Kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2022 untuk sasaran strategis 1 adalah sebesar 82 sedangkan realisasi capaian kinerja yang tercapai adalah sebesar 84,714, hal ini menunjukkan adanya pencapaian yang cukup memuaskan terhadap sasaran meningkatnya pelayanan umum/ pelayanan publik kepada masyarakat dalam arti pelayanan yang selama tahun 2022 di kantor Camat Teluk Bayur berjalan dengan baik.

Sasaran strategis Kantor Camat Teluk Bayur yang kedua adalah :

Pada Sasaran Startegis yang kedua yaitu Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan, hal ini diukur dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi LKJ-IP/LAKIP yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Capaian Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP	2021	64(B)	CC(57,17)
			2022	64 (B)	CC(58,21)
			2023	64 (B)	
			2024	64 (B)	
			2025	64 (B)	
			2026	64 (B)	

Pada Tahun 2022 untuk Sasaran Strategis yang kedua mempunyai target untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan yang dicapai melalui indikator kinerja nilai evaluasi LKJ-IP adalah “B” sedangkan target capaian kinerja yang diperoleh adalah “CC” atau sebesar tidak tercapai target. Hal ini dapat dilihat bahwa Nilai evaluasi LKJ-IP Kantor Camat Teluk Bayur tidak ada peningkatan dari tahun , 2022 dan 2023

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Berau selama lima tahun kedepan setiap perangkat daerah menetapkan Renstra termasuk pula dengan Kecamatan Teluk Bayur yang harus menyusun Renstra 2021-2026. Dalam tahun 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Teluk Bayur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 10924096647 dengan rincian Belanja Operasional Sebesar Rp10319258647 dan belanja tidak Modal sebesar Rp. 604838000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 9650116608 dengan rincian realisasi belanja Operasional sebesar Rp. 9462109108 dan relaisasi belanja Modal sebesar Rp. 188007500 dengan capaian target Realisasi keuangan sebesar 88,34 %, sedangkan realisasi capaian belanja Operasional adalah sebesar 91,69 % .,sedangkan Belanja Modal adalah sebesar 31,08 %.Berikut adalah realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Realisasi belanja Operasional Tahun Anggaran 2022
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau
Per 31 Desember 2022**

Tahun	Belanja	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian Realisasi (%)	Sisa Anggran (RP)
2021	Belanja Operasional	8.915.736.027	8.503.494.834	95,38	412.241.193
	Belanja Modal	310.353.420	306.190.200	98,66	4.163.220
2022	Belanja Operasional	10.319.258.647	9.462.109.108	91,69	857.149.539
	Belanja Modal	604.838.000	188.007.500	31,08	416.830.500

**Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2022
Berdasarkan Target Keuangan
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau
Per 31 Desember 2022**

NO	Sasaran	Target Sasar	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI		REALISASI		SILPA
				TARGET VOLUME	ANGGARAN (RP)	%	REALISASI (RP)	
1	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	87,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.782.107.751	86,13	5.841.631.394	Rp 940.476.357
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 37.500.000	80,09	Rp 30.034.100	Rp 7.465.900
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.000	88,90	Rp 22.224.100	Rp 2.775.900
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp 12.500.000	62,48	Rp 7.810.000	Rp 4.690.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.464.131.435	90,98	Rp 4.971.524.612	Rp 492.606.823
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp 5.273.751.435	90,80	Rp 4.788.644.612	Rp 485.106.823
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Rp 190.380.000	96,06	Rp 182.880.000	Rp 7.500.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000	87,00	Rp 8.699.600	Rp 1.300.400
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp 10.000.000	87,00	Rp 8.699.600	Rp 1.300.400
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	Rp -
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	Rp -
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 380.413.700	96,89	Rp 368.600.700	Rp 11.813.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp 5.499.800	70,96	Rp 3.902.800	Rp 1.597.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp 102.788.600	99,77	Rp 102.556.600	Rp 232.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp 13.386.300	96,56	Rp 12.926.300	Rp 460.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp 101.494.000	97,71	Rp 99.166.000	Rp 2.328.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp 13.645.000	75,79	Rp 10.341.800	Rp 3.303.200

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3.600.000	55,56	2.000.000	Rp 1.600.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp 140.000.000	98,36	Rp 137.707.200	Rp 2.292.800
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Rp 438.010.000	4,78	Rp 20.929.500	Rp 417.080.500
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Rp 438.010.000	4,78	Rp 20.929.500	Rp 417.080.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 336.052.632	97,57	Rp 327.885.332	Rp 8.167.300
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.992.800	100,00	2.992.800	Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp 77.145.000	91,56	Rp 70.636.520	Rp 6.508.480
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp 29.745.000	99,18	Rp 29.500.000	Rp 245.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp 226.169.832	99,37	Rp 224.756.012	Rp 1.413.820
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 100.999.984	100,00	Rp 100.999.984	Rp -
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp 74.999.984	97,30	Rp 72.977.550	Rp 2.022.434
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Rp 26.000.000	99,92	Rp 25.980.000	Rp 20.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	Rp 190.500
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	Rp 190.500
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	Rp 190.500
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Rp 3.782.788.896	96,75	Rp 3.659.757.714	Rp 123.031.182
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 439.999.860	95,79	Rp 421.488.610	Rp 18.511.250

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Rp 15.000.000	99,73	Rp 14.960.000	Rp 40.000
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Rp 214.999.860	98,19	Rp 211.098.310	Rp 3.901.550
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp 210.000.000	93,06	Rp 195.430.300	Rp 14.569.700
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 3.342.789.036	96,87	Rp 3.238.269.104	Rp 104.519.932
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12	Rp 10.000.000	33,50	Rp 3.350.000	Rp 6.650.000
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Rp 3.332.789.036	97,06	Rp 3.234.919.104	Rp 97.869.932
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Rp 205.480.000
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Rp 205.480.000
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Rp 205.480.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Rp 4.522.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Rp 4.522.000
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Rp 4.522.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	Rp 79.200.000	99,65	Rp 78.920.000	Rp 280.000
		asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 79.200.000	99,65	Rp 78.920.000	Rp 280.000
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Rp 59.200.000	100,00	Rp 59.200.000	Rp -
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Rp 20.000.000	98,60	Rp 19.720.000	Rp 280.000
			100%	Rp 10.924.096.647	88,34	Rp 9.650.116.608	Rp 1.273.980.039

**Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2022
Berdasarkan Target Kinerja
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau
Per 31 Desember 2022**

NO	Sasaran	Target Sasar	ALOKASI		REALISASI		KETERANGAN	
			URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET VOLUME	ANGGARAN (RP)	%		REALISASI (RP)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	87,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.782.107.751	86,13	5.841.631.394	Rp 940.476.357
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 37.500.000	80,09	Rp 30.034.100	Tercapai
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.000	88,90	Rp 22.224.100	Tercapai
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp 12.500.000	62,48	Rp 7.810.000	Tercapai
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.464.131.435	90,98	Rp 4.971.524.612	Tercapai
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp 5.273.751.435	90,80	Rp 4.788.644.612	Tercapai
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Rp 190.380.000	96,06	Rp 182.880.000	Tercapai
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000	87,00	Rp 8.699.600	Tercapai
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp 10.000.000	87,00	Rp 8.699.600	Tercapai
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	Tercapai
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	Tercapai
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 380.413.700	96,89	Rp 368.600.700	Tercapai
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp 5.499.800	70,96	Rp 3.902.800	Tercapai
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp 102.788.600	99,77	Rp 102.556.600	Tercapai
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp 13.386.300	96,56	Rp 12.926.300	Tercapai
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp 101.494.000	97,71	Rp 99.166.000	Tercapai
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp 13.645.000	75,79	Rp 10.341.800	Tercapai

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3.600.000	55,56	2.000.000	Tercapai
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp 140.000.000	98,36	Rp 137.707.200	Tercapai
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Rp 438.010.000	4,78	Rp 20.929.500	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Rp 438.010.000	4,78	Rp 20.929.500	Tidak Tercaai
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 336.052.632	97,57	Rp 327.885.332	Tercapai
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.992.800	100,00	2.992.800	Tercapai
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp 77.145.000	91,56	Rp 70.636.520	Tercapai
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp 29.745.000	99,18	Rp 29.500.000	Tercapai
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp 226.169.832	99,37	Rp 224.756.012	Tercapai
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 100.999.984	100,00	Rp 100.999.984	Tercapai
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp 74.999.984	97,30	Rp 72.977.550	Tercapai
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Rp 26.000.000	99,92	Rp 25.980.000	Tercapai
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	Tercapai
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	Tercapai
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	Tercapai
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Rp 3.782.788.896	96,75	Rp 3.659.757.714	Tercapai
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 439.999.860	95,79	Rp 421.488.610	Tercapai

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Rp 15.000.000	99,73	Rp 14.960.000	Tercapai
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Rp 214.999.860	98,19	Rp 211.098.310	Tercapai
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp 210.000.000	93,06	Rp 195.430.300	Tercapai
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 3.342.789.036	96,87	Rp 3.238.269.104	Tercapai
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12	Rp 10.000.000	33,50	Rp 3.350.000	Tercapai
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Rp 3.332.789.036	97,06	Rp 3.234.919.104	Tercapai
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Tercapai
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Tercapai
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Tercapai
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Tercapai
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Tercapai
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Tercapai
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	Rp 79.200.000	99,65	Rp 78.920.000	Tercapai
		asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 79.200.000	99,65	Rp 78.920.000	Tercapai
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Rp 59.200.000	100,00	Rp 59.200.000	Tercapai
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Rp 20.000.000	98,60	Rp 19.720.000	Tercapai
			100%	Rp 10.924.096.647	88,34	Rp 9.650.116.608	Rp 1.273.980.039

Untuk mendukung tercapainya sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2021-2026 telah dialokasi anggaran baik Belanja Operasional maupun Belanja Belanja Modal seperti sebagaimana tabel diatas.

Alokasi Belanja Barang Dan Jasa yang difokuskan untuk meunjang tercapainya sasaran strategis terdiri dari 6 (Enam) Program yang meliputi : Untuk Mencapai Sasaran strategis I : Meningkatnya Pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat didukung oleh Program :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, diberikan anggaran sebesar Rp. 6.782.107.751
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK diberikan anggaran sebesar 15.000.000
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN yang diberikan anggaran sebesar Rp. 3.782.788.896
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, yang diberikan anggaran sebesar Rp.225.000.000
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 31.170.100,-
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, yang diberikan anggaran sebesar Rp. 79.200.000

Sedangkan untuk sasaran Strategis ke dua : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan didukung oleh Sub Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diberikan anggaran sebesar Rp. 37.500.000

Analisis Target Capaian Kinerja Keuangan Kantor Camat Teluk Bayur

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Berau tahun anggaran 2022 dan kebijakan umum perubahan

APBD Kabupaten Berau Tahun anggaran 2022, Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah pada Perangkat daerah Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. 10.319.258.647 yang terdiri dari target Belanja Operasional sebesar Rp. 8.915.736.027 dan Belanja Moda Rp. 604.838.000 , Belanja Operasional sebesar Rp. 10.319.258.647 ,Untuk Belanja Operasional terealisasi Rp. 9.462.109.108 (91,69%) sedangkan Belanja Modal Terealisasi Rp188.007.500 (31,08 %)

Realisasi pencapaian kinerja keuangan belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar 88,34 %, secara umum Program dan Kegiatan APBD pada Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 sudah bisa terlaksana dengan realisasi fisiknya sebesar 90,80%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 91,63 %, pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 97,95 % dan kemudian pada tahun 2021 95,49 %, dan tahun 2022 teralisasi sebesar 90,80 berarti ada penurunan sebesar 4,69 karena adanya belanja modal yang tidak terealisasi karena penyedia tidak dapat menyedaikan unit yang diinginkan,

Berikut adalah realisasi belanja pada tahun anggaran 2021 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Belanja Langsung	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian Realisasi (%)	Sisa Anggran (RP)
2019	Belanja Pegawai	5.700.577.500	5.121.923.300	89,85	578.654.200
2020	Belanja Pegawai	5.630.629.000	4.615.239.420	81,97	1.015.389.580
2021	Belanja Pegawai	4.718.160.413	4.475.838.256	94,86	242.322.157
2022	Belanja Pegawai	5.474.871.435	4.988.514.612	91,12	486.356.823
2023	Belanja Pegawai				

Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Target keuangan
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Per 31 Desember 2022

NO	Sasaran	Target Sasar	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI		REALISASI		KETERANGAN
				TARGET VOLUME	ANGGARAN (RP)	%	REALISASI (RP)	
1	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	87,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	1.172.303.684	62	727.143.884	Rp 445.159.800
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 37.500.000	80,09	Rp 30.034.100	Tercapai
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.000	88,90	Rp 22.224.100	Tercapai
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp 12.500.000	62,48	Rp 7.810.000	Tercapai
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 190.380.000	96,06	Rp 182.880.000	Tercapai
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Rp 190.380.000	96,06	Rp 182.880.000	Tercapai
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000	87,00	Rp 8.699.600	Tercapai
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp 10.000.000	87,00	Rp 8.699.600	Tercapai
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	Tercapai
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	Tercapai
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 380.413.700	96,89	Rp 368.600.700	Tercapai
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp 5.499.800	70,96	Rp 3.902.800	Tercapai
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp 102.788.600	99,77	Rp 102.556.600	Tercapai
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp 13.386.300	96,56	Rp 12.926.300	Tercapai
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp 101.494.000	97,71	Rp 99.166.000	Tercapai
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp 13.645.000	75,79	Rp 10.341.800	Tercapai
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3.600.000	55,56	2.000.000	Tercapai

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp	140.000.000	98,36	Rp	137.707.200	Tercapai
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Rp	438.010.000	4,78	Rp	20.929.500	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Rp	438.010.000	4,78	Rp	20.929.500	Tidak Tercaai
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp	336.052.632	97,57	Rp	327.885.332	Tercapai
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2		2.992.800	100,00		2.992.800	Tercapai
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp	77.145.000	91,56	Rp	70.636.520	Tercapai
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp	29.745.000	99,18	Rp	29.500.000	Tercapai
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp	226.169.832	99,37	Rp	224.756.012	Tercapai
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp	100.999.984	100,00	Rp	100.999.984	Tercapai
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp	74.999.984	97,30	Rp	72.977.550	Tercapai
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Rp	26.000.000	99,92	Rp	25.980.000	Tercapai
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Rp	15.000.000	98,73	Rp	14.809.500	Tercapai
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp	15.000.000	98,73	Rp	14.809.500	Tercapai
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4%	Rp	15.000.000	98,73	Rp	14.809.500	Tercapai
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Rp	3.782.788.896	96,75	Rp	3.659.757.714	Tercapai
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp	439.999.860	95,79	Rp	421.488.610	Tercapai
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Rp	15.000.000	99,73	Rp	14.960.000	Tercapai

		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Rp 214.999.860	98,19	Rp 211.098.310	Tercapai
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp 210.000.000	93,06	Rp 195.430.300	Tercapai
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 3.342.789.036	96,87	Rp 3.238.269.104	Tercapai
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12	Rp 10.000.000	33,50	Rp 3.350.000	Tercapai
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Rp 3.332.789.036	97,06	Rp 3.234.919.104	Tercapai
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Tercapai
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Tercapai
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Tercapai
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Tercapai
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Tercapai
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Tercapai
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%%	Rp 79.200.000	99,65	Rp 78.920.000	Tercapai
		asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 79.200.000	99,65	Rp 78.920.000	Tercapai
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Rp 59.200.000	100,00	Rp 59.200.000	Tercapai
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Rp 20.000.000	98,60	Rp 19.720.000	Tercapai
			100%	Rp 5.650.345.212	86,04	Rp 4.861.471.996	Rp 788.873.216

Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Target Kinerja
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Per 31 Desember 2022

NO	Sasaran	Target Sasar	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI		REALISASI		KETERANGAN
				TARGET VOLUME	ANGGARAN (RP)	%	REALISASI (RP)	
1	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	87,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	1.172.303.684	62,03	727.143.884	Rp 445.159.800
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 37.500.000	80,09	Rp 30.034.100	Tercapai
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.000	88,90	Rp 22.224.100	Tercapai
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp 12.500.000	62,48	Rp 7.810.000	Tercapai
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 190.380.000	96,06	Rp 182.880.000	Tercapai
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Rp 190.380.000	96,06	Rp 182.880.000	Tercapai
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000	87,00	Rp 8.699.600	Tercapai
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp 10.000.000	87,00	Rp 8.699.600	Tercapai
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	Tercapai
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	Tercapai
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 380.413.700	96,89	Rp 368.600.700	Tercapai
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp 5.499.800	70,96	Rp 3.902.800	Tercapai
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp 102.788.600	99,77	Rp 102.556.600	Tercapai
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp 13.386.300	96,56	Rp 12.926.300	Tercapai
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp 101.494.000	97,71	Rp 99.166.000	Tercapai
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp 13.645.000	75,79	Rp 10.341.800	Tercapai

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3.600.000	55,56	2.000.000	Tercapai
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp 140.000.000	98,36	Rp 137.707.200	Tercapai
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Rp 438.010.000	4,78	Rp 20.929.500	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Rp 438.010.000	4,78	Rp 20.929.500	Tidak Tercaai
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 336.052.632	97,57	Rp 327.885.332	Tercapai
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.992.800	100,00	2.992.800	Tercapai
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp 77.145.000	91,56	Rp 70.636.520	Tercapai
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp 29.745.000	99,18	Rp 29.500.000	Tercapai
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp 226.169.832	99,37	Rp 224.756.012	Tercapai
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 100.999.984	100,00	Rp 100.999.984	Tercapai
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp 74.999.984	97,30	Rp 72.977.550	Tercapai
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Rp 26.000.000	99,92	Rp 25.980.000	Tercapai
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	Tercapai
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	Tercapai
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	Tercapai
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Rp 3.782.788.896	96,75	Rp 3.659.757.714	Tercapai
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 439.999.860	95,79	Rp 421.488.610	Tercapai

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Rp 15.000.000	99,73	Rp 14.960.000	Tercapai
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Rp 214.999.860	98,19	Rp 211.098.310	Tercapai
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp 210.000.000	93,06	Rp 195.430.300	Tercapai
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 3.342.789.036	96,87	Rp 3.238.269.104	Tercapai
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12	Rp 10.000.000	33,50	Rp 3.350.000	Tercapai
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Rp 3.332.789.036	97,06	Rp 3.234.919.104	Tercapai
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Tercapai
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Tercapai
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Tercapai
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Tercapai
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Tercapai
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Tercapai
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%%	Rp 79.200.000	99,65	Rp 78.920.000	Tercapai
		asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 79.200.000	99,65	Rp 78.920.000	Tercapai
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Rp 59.200.000	100,00	Rp 59.200.000	Tercapai
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Rp 20.000.000	98,60	Rp 19.720.000	Tercapai
			100%	Rp 10.924.096.647	88,34	Rp 9.650.116.608	Rp 1.273.980.039

Untuk mendukung tercapainya sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2021-2026 telah dialokasi anggaran baik Belanja Langsung maupun Belanja tidak langsung seperti sebagaimana tabel diatas.

Alokasi Belanja Langsung yang difokuskan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis terdiri dari 6 (enam) Program yang meliputi :

Untuk Mencapai Sasaran strategis I : Meningkatnya Pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat didukung oleh Program / Kegiatan / sub kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.446.055.119
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp37.500.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp25.000.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp12.500.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.464.131.435
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.273.751.435
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Rp190.380.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp10.000.000
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp10.000.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp15.000.000
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp15.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp380.413.700
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.499.800
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp102.788.600
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp13.386.300
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp101.494.000
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp13.645.000
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000

1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp140.000.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp438.010.000
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp438.010.000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp336.052.632
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.992.800
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp77.145.000
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp29.745.000
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp226.169.832
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp100.999.984
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp74.999.984
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp26.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp15.000.000
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp15.000.000
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp15.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp3.782.788.896
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp439.999.860
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp15.000.000
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp214.999.860
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp210.000.000
3.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp3.342.789.036
3.2.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp10.000.000
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp3.332.789.036
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp225.000.000
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp225.000.000

4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp225.000.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp40.000.000
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp40.000.000
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp40.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp79.200.000
6.1	asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp79.200.000
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp59.200.000
6.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp20.000.000
		Rp10.924.096.647

Sedangkan untuk sasaran Strategis ke dua : Meningkatya akuntabilitas kinerjaKecamatan didukung oleh Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebagai berikut:

NO	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.446.055.119
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 37.500.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 25.000.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 12.500.000

Analisis Target Capaian Kinerja Keuangan Kantor Camat Teluk Bayur

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Berau tahun anggaran 2022 dan kebijakan umum perubahan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022, Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah pada Perangkat daerah Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. **10.924.096.647** yang terdiri dari target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.273.751.435 dan target Belanja Langsung sebesar Rp. 5.650.345.212 ,Untuk

Belanja Langsung terealisasi Rp. 4.861.471.996 (86,04%) sedangkan Belanja Tidak Langsung teralisasi Rp. 4.788.644.612 (90.80%)

Realisasi pencapaian kinerja keuangan belanja langsung sebesar 4.861.471.996,- secara umum Program dan Kegiatan APBD pada Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 sudah bisa terlaksana dengan realisasi fisiknya sebesar 86,04 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 93,90 % , pada tahun 2020 sebesar 97,95 dan kemudian pada tahun anggaran 2021 sebesar 95,49 % menurun sebesar 7,42 % hal ini terjadi dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terlaksana antara lain untuk pengadaan kendaraan operasional kantor yang tidak dapat terpenuhi oleh rekanan dan untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2023 akan diadakan kembali pada saat ABT

Permasalahan dan kendala lain yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan Kinerja Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau pada tahun 2022 adalah :

3 Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Pegawai di Kantor Camat pada tahun 2022 berjumlah 24 Orang dengan rincian 20 Orang Pegawai Negeri Sipil kantor Camat Teluk Bayur, 2 orang Pegawai negeri sipil sebagai Sekretaris desa , dan 6 Orang Tenaga Kontrak, Untuk Sekretaris Kampung Bertugas di Kampung Masing Masing sesuai dengan yang telah ditentukan dalam SK Pegawai Masing masing. Dari 20 Orang Pegawai Negeri Sipil ini terdiri dari 7 orang Pejabat Esselon sedangkan 13 orang lagi adalah staf / pelaksana. Dari 13 orang Pelaksana dan 6 orang tenaga kontrak ini tidak tersebar di Pemerintahan 1 Orang , 1 Orang di Penyusunan Program Keuangan dan Aset, 1 Orang Tenaga Kebersihan, 1 Orang Penjaga Malam , 1 Orang Sopir dan 1 Orang Tenaga Polisi Pamong Praja, seksi yaitu :

3.3 Seksi Pemerintahan, memiliki staf 2 orang (1 orang PNS dan 1 orang Tenaga Kontrak)

3.4 Seksi Pemberdayaan memiliki staf 1 orang PNS

- 3.5 Seksi kesejahteraan sosial memiliki staf 1 orang (1 Orang PNS)
- 3.6 Seksi Ketentraman dan ketertiban memiliki staf 1 orang (1 orang PNS dan 1 Orang PTT)
- 3.7 Seksi pelayanan umum memiliki 1 orang staf (1 Orang PNS)
- 3.8 Sub bagian penyusunan program keuangan dan aset memiliki 4 Orang staf (3 Orang PNS dan 1 Orang PTT)
- 3.9 Sub bagian umum dan kepegawaian memiliki staf 5 (1 orang PNS dan 4Orang tenaga kontrak)

Dari sebaran jumlah staf/pelaksana dan tenaga kontrak yang tidak merata inilah yang menjadikan alasan bahwa ada pegawai yang melaksanakan pekerjaan lain diluar pekerjaan utamanya.

4 Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk kendaraan Roda 2 masih ada kepala seksi sebanyak 1 orang kepala seksi sebanyak 1 orang yang belum memiliki sarana kendaraan roda 2 untuk menunjang pekerjaannya, dan untuk kendaraan roda 4 double kecamatan Teluk Bayur belum memiliki dan 2 unit R4 Rush sebagai kendaraan operasional Camat dan Sekretaris Camat , sedangkan untuk kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan tidak ada. Kondisi kendaraan roda 4 yang dibutuhkan adalah kendaraan Roda 4 double sesuai dengan kondisi geografis kecamatan Teluk Bayur yang masih ada lokasi yang harus dilalui dengan kendaraan double pada saat kondisi musim hujan dan untuk kendaraan double cabin belum memiliki kendaraan tersebut , namun itu bukanlah kendaraan operasional tetapi kendaraan yang melekat pada jabatan Camat Teluk Bayur. Dalam hal pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat, memaksimalkan ruangan yang ada, dikarenakan ruangan yang disediakan untuk pelayanan PATEN tidak dapat digunakan dengan maksimal dikarenakan oleh beberapa masalah dalam hal pembangunannya.

5 Kurangnya Bimbingan Teknis Maupun diklat atau pelatihan pelatihan yang mendukung tupoksi kerja

Untuk mengatasi Permasalahan tersebut kantor Camat Teluk Bayur melakukan

beberapa langkah seperti :

11. Menganggarkan Pembelian Belanja Modal seperti Komputer / deskbook dan Printer untuk diberikan kepada Beberapa seksi dan sub bagian.
12. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada serta merawat sarana dan prasarana yang sudah ada untuk menunjang capaian kinerja tetap dalam keadaan baik
13. Memaksimalkan kerja Pegawai Kantor Camat Teluk Bayur baik PNS maupun Tenaga Kontraknya untuk bekerja bersama sama dalam menyelesaikan Tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.
14. Memberikan pelatihan secara mandiri untuk staf pelaksana terutama di untuk mengoperasikan komputer dengan tujuan bahwa setiap orang harus dapat mengoperasikan Komputer, sebagaimana dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana untuk komputer dan printer telah terpenuhi pada tahun 2022.
15. Memaksimalkan kinerja pelayanan Umum yang dalam hal ini adalah Pelayanan satu Pintu (PATEN) Kecamatan Teluk Bayur, dengan memberikan jadwal piket kepada setiap pegawai untuk bergantian menjaga Pelayanan, demi tercapainya tujuan utama kantor camat Teluk Bayur yaitu dalam hal pelayanan prima kepada masyarakat.

a. *Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022*

Sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai target kinerja kantor Camat Teluk bayur pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Target Tahun 2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	82	84,714
2	Meningkatnya	LKJ-iP/	Nilai	B	CC (58,21)

	Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	LAKIP			
--	---------------------------------------	-------	--	--	--

Realisasi sasaran Strategis pertama adalah sebesar 84,714 lebih besar dari target nilai yang ingin dicapai pada tahun 2022 hal ini berarti kinerja pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat sangat bagus. Sedangkan untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan dengan target kinerja adalah bernilai B tetapi pada hasil evaluasi LKJ-IP/LAKIP pada tahun 2022 adalah cc(58,21) yang merupakan hasil evaluasi di Tahun 202 hal ini berarti capaian kinerja yang diperoleh lebih rendah dari target yang diinginkan.

Selain Target Sasaran Strategis ada Target anggaran yang juga diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja yaitu Anggaran yang tertuang dalam DPAP Tahun 2022 kecamatan Teluk Bayur. Jumlah anggaran yang dikelola oleh Kantor Camat Teluk Bayur pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 10.924.096.647 dengan target yang ingin dicapai adalah 100 % anggaran ini terbagi menjadi dua yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.273.751.435 dan belanja langsung sebesar Rp. 5.650.345.212 seiring perjalanan Tahun 2022 dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan tertuang dalam DPA Murni tahun 2021 serta DPPA tahun 2021 maka anggaran yang dapat direalisasikan oleh Kantor Camat Teluk Bayur adalah sebesar Rp. 9.650.116.608 dengan rincian Belanja langsung sebesar Rp. 4.861.471.996 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.4.788.644.612 Target Capaian Kinerja Anggaran Kantor Camat Teluk Bayur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Realisasi belanja langsung tahun anggaran 2022
Berdasarkan Capaian Output
 Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Per 31 Desember 2022

NO	Sasaran	Target Sasar	REALISASI TARGET	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI		REALISASI		SILPA
					TARGET VOLUME	ANGGARAN (RP)	%	REALISASI (RP)	
1	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	82,00	84,714	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.446.055.119	90,62	5.841.631.394	Rp 604.423.725
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	CC (58,21)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 37.500.000	80,09	Rp 30.034.100	Rp 7.465.900
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.000	88,90	Rp 22.224.100	Rp 2.775.900
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp 12.500.000	62,48	Rp 7.810.000	Rp 4.690.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.464.131.435	90,98	Rp 4.971.524.612	Rp 492.606.823
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp 5.273.751.435	90,80	Rp 4.788.644.612	Rp 485.106.823
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Rp 190.380.000	96,06	Rp 182.880.000	Rp 7.500.000
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000	87,00	Rp 8.699.600	Rp 1.300.400
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp 10.000.000	87,00	Rp 8.699.600	Rp 1.300.400
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	Rp -
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	Rp -
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 380.413.700	96,89	Rp 368.600.700	Rp 11.813.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp 5.499.800	70,96	Rp 3.902.800	Rp 1.597.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp 102.788.600	99,77	Rp 102.556.600	Rp 232.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp 13.386.300	96,56	Rp 12.926.300	Rp 460.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp 101.494.000	97,71	Rp 99.166.000	Rp 2.328.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	3	Rp 13.645.000	75,79	Rp 10.341.800	Rp 3.303.200
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3.600.000	55,56	2.000.000	Rp 1.600.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp 140.000.000	98,36	Rp 137.707.200	Rp 2.292.800
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Rp 438.010.000	4,78	Rp 20.929.500	Rp 417.080.500
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Rp 438.010.000	4,78	Rp 20.929.500	Rp 417.080.500
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 336.052.632	97,57	Rp 327.885.332	Rp 8.167.300
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.992.800	100,00	2.992.800	Rp -
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp 77.145.000	91,56	Rp 70.636.520	Rp 6.508.480
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp 29.745.000	99,18	Rp 29.500.000	Rp 245.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp 226.169.832	99,37	Rp 224.756.012	Rp 1.413.820
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 100.999.984	100,00	Rp 100.999.984	Rp -
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp 74.999.984	97,30	Rp 72.977.550	Rp 2.022.434
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Rp 26.000.000	99,92	Rp 25.980.000	Rp 20.000
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	Rp 190.500

			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	Rp 190.500
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	Rp 190.500
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Rp 3.782.788.896	96,75	Rp 3.659.757.714	Rp 123.031.182
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 439.999.860	95,79	Rp 421.488.610	Rp 18.511.250
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Rp 15.000.000	99,73	Rp 14.960.000	Rp 40.000
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Rp 214.999.860	98,19	Rp 211.098.310	Rp 3.901.550
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp 210.000.000	93,06	Rp 195.430.300	Rp 14.569.700
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 3.342.789.036	96,87	Rp 3.238.269.104	Rp 104.519.932
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12	Rp 10.000.000	33,50	Rp 3.350.000	Rp 6.650.000
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Rp 3.332.789.036	97,06	Rp 3.234.919.104	Rp 97.869.932
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Rp 205.480.000
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Rp 205.480.000
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	Rp 205.480.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Rp 4.522.000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Rp 4.522.000
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	Rp 4.522.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	Rp 79.200.000	99,65	Rp 78.920.000	Rp 280.000
			asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 79.200.000	99,65	Rp 78.920.000	Rp 280.000
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Rp 59.200.000	100,00	Rp 59.200.000	Rp -
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Rp 20.000.000	98,60	Rp 19.720.000	Rp 280.000
				100%	Rp 10.924.096.647	88,34	Rp 9.650.116.608	Rp 1.273.980.039

3.3.1 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Selama Lima Tahun Renstra Kecamatan Teluk Bayur dapat dibandingkan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	CAPAIAN
				TARGET
Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2018	85	85,14
		2019	85,5	90,58
		2020	86	90,58
		2021	83	95,085
		2022	82	84,714

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	CAPAIAN TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP	2018	B (70,00)	
		2019	B (70,00)	
		2020	B (64)	CC (57,19)
		2021	B (64)	CC (58,21)
		2022	Belum Dioeriksa	

Untuk sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2021 dengan tahun 2022 mengalami penurunan dari sangat baik menjadi baik ada dalam perolehan hasil Survey kepuasan masyarakat namun dalam hasil Penelitian Indeks kepuasan masyarakat ada perbedaan nilai tertinggi dan terendah yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Unsur-unsur SKM	SKM tahun 2020	SKM tahun 2021	SKM tahun 2022	Keterangan
1	Persyaratan	90,25	92,25	88,75	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	99	86,5	85	Terendah Tahun 2022
3	Waktu Penyelesaian	88	86,25	87,25	Terendah 2021
4	Biaya / Tarif	100	100	100	
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	88,5	95,25	94,25	Terendah 2020
6	Kompetensi Pelaksana	88,5	86,25	90,75	Terendah Tahun 2021
7	Perilaku Pelaksana	89,5	87,5	89,25	Terendah 2021
	Penanganan Pengaduan				
8	Sarana dan Masukan	89,25	89	90,25	Terendah 2021
9	Sarana dan Prasarana	90,5	92,25	84,75	Terendah 2022

3.3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Teluk Bayur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Tahun 2022	Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan strategis Kecamatan Teluk Bayur	Selisih Target
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,5	84	1,5
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan	LKJ-IP / LAKIP	Nilai	CC (58,21) Hasil evaluasi LKJ-IP /LAKIP Tahun 2021 yang diperiksa tahun 2022	B (64)	5,79

3.3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Startegis KecamatanTeluk Bayur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	Selisih Target
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/Pelayanan Kepada Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	85,5		Belum Diperoleh Data Nasional
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan	LKJ-IP / LAKIP	Nilai	CC(58,21) Hasil evaluasi LKJ-IP/LAKIP TA.2021 yang diperiksa tahun 2022		Belum Diperoleh Data Nasional

3.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Faktor –faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adalah :

- c) Komitmen Pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran Kecamatan Teluk Bayur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam DPAP tahun 202
- d) Adanya komitmen Aparatur Kecamatan Teluk Bayur dalam melaksanakan Program dan kegiatan yang tercantum dalam DPAP tahun 2022
- e) Adanya komitmen Kantor Camat Teluk Bayur untuk memperbaiki dan menyempurnakan dokumen Perencanaan Kantor Camat Teluk Bayur.
- f) Adanya kerjasama yang baik antara pimpinan, Aparatur Kecamatan Teluk Bayur, Instansi vertikal, muspika, dan masyarakat Kecamatan Teluk Bayur dalam pelaksanaan program dan kegiatan

b. Hambatan – hambatan dalam Pencapaian rencana kinerja yaitu :

1. Kurangnya jumlah pegawai kantor Camat Teluk Bayur, sehingga sebaran staf/pelaksana sebagai bagian yang membantu seksi dan sub bagian kurang merata .
2. Masih ada pegawai yang melakukan pekerjaan rangkap sehingga menjadi kurang efisien.
3. Kurangnya Sumber Daya manusia Aparatur Kecamatan Teluk Bayur terutama tenaga PNS nya dimana ada beberapa tenaga PNS yang belum dapat mengoperasikan Komputer/laptop/desk book.
4. Kurangnya sarana dan prasarana seperti komputer/ desk book dan printer sebagai sarana penunjang kinerja.
5. Masih Kurangnya mobil operasional yang ada di Kecamatan Teluk Bayur sehingga, hal ini menyebabkan program dan kegiatan menjadi tertunda.
6. Kurangnya anggaran diklat/ pelatihan atau Bimtek bagi pegawai Kantor Camat Teluk Bayur.

c. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian rencana kinerja yaitu :

1. Menambah Jumlah tenaga kontrak dengan menganggarkannya dalam anggaran Tahun 2022 untuk Gaji Tenaga kontrak.

Pencapaian kinerja sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Berau melalui Kantor Camat Teluk Bayur dalam melaksanakan Program dan kegiatan ke Kelurahan dan Kampung-kampung yang ada di Kecamatan Teluk Bayur. Pembinaan kepada Kelurahan dan Kampung-kampung dilakukan secara komprehensif dan teratur baik secara langsung turun ke Kelurahan maupun ke kampung ataupun melalui rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan rutin 4 (empat) kali dalam satu tahun. Untuk mendapatkan target realisasi capaian kinerja diakhir tahun anggaran maka perlu kerjasama dan koordinasi dari seluruh pegawai kantor Camat Teluk Bayur,

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Teluk Bayur pada tahun 2022 terdiri dari 26 orang pegawai dengan rincian 2 Orang Pegawai Negeri Sipil, 2 Orang Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sekretaris Kampung, dan 6 orang Tenaga Kontrak. Jumlah pegawai berkelamin perempuan sebanyak 8 orang dan berkelamin pria sebanyak 18 orang.

Berikut adalah tabel jumlah pegawai menurut jenis kelamin, pangkat/ golongan dan pendidikan per 31 Desember 2022

**Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin, Ruangpangkat/golongan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2022**

Tahun	Pangkat/Gol/Ruang					Jenis		Pendidikan						Jumlah pegawai
	IV	III	II	I	PTT	P	L	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	
2018														
2019	2	14	6	1	5	8	20		1	9	8	7	1	26
2020	2	11	6	1	6	8	18		1	14	2	8	1	26
2021	1	12	5	1	6	8	17		1	12	2	10		25
2022	1	12	7	0	6	5	21	1		8	2	15	0	26

**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan
Per 31 Desember 2022**

No	Jabatan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Camat	1 Orang				
2	Sekretaris Camat	1 Orang				
3	Kasi Pemerintahan	1 Orang				
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang				
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	1 Orang				
6	Kasi Pelayanan Umum	1 Orang				
7	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	1 Orang				
8	Kasubbag Umum dan kepegawaian	1 Orang				
9	Kasubbag Penyusunan Program Keuangan dan Aset	1 Orang				
10	Pengumpul Data Pelayanan Umum	1 Orang				
11	Pengolah KTP , KK, Admin Kependudukan Dan Catatan Sipil	1 Orang	1 Orang	1 Orang		
12	Pengolah data Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang				
13	Pengolah data Administrasi Sungram	1 Orang				
14	Pengumpul dan Pengolah Administrasi Kesos	1 Orang				
15	Pengadministrasian Kepegawaian	1 orang		1 Orang	1 Orang	1 Orang
16	Pengolah Data Perencanaan		1 Orang	1 Orang	1 Orang	
17	Bendahara Pengeluaran	1 Orang				
18	Pengadministrasian Keuangan			1 Orang	1 Orang	
19	Pengadministrasian Pemerintahan	1 Orang				
20	Pengolah Data Keamanan dan ketertiban	1 Orang				
22	Tenaga Kontrak	3 orang	3 orang	3 orang	6 orang	6 orang
23	Sekretaris Kampung	2 orang				
JUMLAH		21 orang	21 orang	23 orang	25 orang	26 orang

Sumber Daya Akan Sarana dan Prasarana Kantor Camat Teluk bayur yang dipakai sebagai sarana penunjang Pencapaian target kinerja kantor Camat Teluk bayur Pada Tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Golongan dan Eselon

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional dibidangnya, Kantor Kecamatan Teluk Bayur secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi.

Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai dengan 31 Desember 2022 PNS dilingkungan Kecamatan Teluk Bayur yang memiliki golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 12 orang diikuti oleh golongan II sebanyak 5 orang dan PTT sebanyak 6 orang dan golongan I sebanyak 0 Orang

Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Kecamatan Teluk Bayur berdasarkan golongan

**SUMBER DAYA APARATUR
KECAMATAN TELUK BAYUR MENURUT GOLONGAN**

No	Eksekutif	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol I	PTT	Jumlah
1.	Camat	1					1
2.	Sekcam		1				1
3.	Sub Bag Umum & Kepegawaian		2			3	5
4.	Sub Bag SunGram, Keuangan Dan Aset		2	2		1	5
5.	Seksi Pemerintahan		1	1		1	3
7.	Seksi Trantib		1	1		1	3
8.	Seksi Pemb. Masy		1	2			2
9.	Seksi Pelayanan Umum		2				2
10	Seksi Kessos		2				2
Jumlah		1	12	6		6	25

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**UMBER DAYA APARATUR KECAMATAN TELUK BAYUR
BERDASARKAN TINGKAT GOLONGAN
YANG TERSUSUN DENGAN KRITERIA GENDER**

No	Eksekutif	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	

1.	Camat		1	1
2.	Secam	1		1
3.	Sub Bag Umum & Kepeg.	4	2	6
4.	SubBag,Sungram, Keuangan dan Aset	1	3	4
5.	Seksi Pemerintahan	3		3
6.	Seksi Trantib	3		3
7.	Seksi Pemb. Masy.	1	1	2
8.	Seksi Pel. Umum	2	1	3
9.	Seksi Kessos	1	1	2
Jumlah		17	8	25

Sumber Daya Akan Sarana dan Prasarana Kantor Camat Teluk Bayur yang dipakai sebagai sarana penunjang Pencapaian target kinerja kantor Camat Teluk Bayur Pada Tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	SARANA KERJA YANG TERSEDIA	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		JUMLAH		KONDISI	JUMLAH		KONDISI	JUMLAH		KONDISI
1	Tanah kantor	30000	M2	Baik	30000	M2	Baik	30000	M2	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor		M2	Baik		M2	Baik			Baik
3	Kendaraan Roda 4	3	Unit	Baik	3	Unit	Baik	3	Unit	Baik
4	Kendaraan Roda 2	6	Unit	Baik	6	Unit	Baik	7	Unit	Baik
5	Laptop	6	Unit	Baik	6	Unit	Baik	7	Unit	Baik
6	Printer	11	Unit	Baik	11	Unit	Baik	12	Unit	2 Rusak
7	Mesin Ketik Manual	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik
8	AC	12	Unit	Baik	12	Unit	Baik	13	Unit	1 Rusak
9	TV	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik
10	Lemari Kayu	10	Unit	3 rusak	10	Unit	3 rusak	10	Unit	7 Baik
11	Filing Cabinet	2	Unit	Baik	2	Unit	Baik	2	Unit	Baik
12	Kamera	1	Unit	Rusak	1	Unit	rusak	1	Unit	rusak
13	Kursi Eselon	9	Unit	Baik	9	Unit	Baik	8	Unit	Baik
15	Meja Paten	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik	1	Unit	Baik
16	Meja Pelayanan	2	Unit	Baik	2	Unit	Baik	2	Unit	Baik

Dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang anggaran yang diberikan pada kantor Camat Teluk Bayur akan belanja pegawai dapat dilihat padatable dibawah ini :

Belanja Tidak Langsung					
Tahun	Belanja Tidak langsung	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Silpa anggaran	Persentase kinerja
2020	Gajidan Tunjangan	5.630.629.000	4.615.239.420	1.015.389.580	81,97%
2021	Gajidan Tunjangan	4.718.160.413	4.475.838.256	242.322.157	94,86%
2022	Gajidan Tunjangan	5.474.871.435	4.988.514.612	486.356.823	91,12%

Belanja Langsung					
Tahun	Belanja Langsung	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Silpa anggaran	Persentase kinerja
2020	Belanja Langsung	4.042.960.800	3.954.818.647	88.142.153	97,82%
2021	Belanja Langsung	4.197.575.614	4.027.656.578	169.919.036	95,95%
2022	Belanja Langsung	4.983.450.202	4.475.838.256	507.611.946	89,81%

3.3.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja ini didukung melalui 5

(Lima)program dan 22 Kegiatan yaitu :

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01	asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator keberhasilan dan capaian kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada di bawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Pencapaian target 2022	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2019	Realisasi Tahun 2018
Meningkatnya Pelayanan umum/ pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	84,714	84,714	95,085	90,58		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	LKJ-IP/Lakip	Nilai	B (64)	Belum ada Hasil Evaluasi LKJ-IP TA 2022	Belum ada Pencapaian Target TA.2022	CC-58,21	CC-57,49		
% Pencapaian Target Meningkatnya Pelayanan Umum/Pelayanan Kepada Masyarakat					9784,714,23%				
% Pencapaian Target Meingkatkannya Kinerja Kecamatan Tahun 2022					Untuk Hasil Evaluasi Belum Ada Karena LKJ-IP/LAKIP Tahun Anggaran 2022 belum diperiksa				
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022					10.924.096.647				
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022					9.650.116.608				
Jumlah Realisasi Anggaran kegiatan tahun 2022 untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pertama (meningkatkan Pelayanan Umum/Pelayanan Kepada Masyarakat)					9.620.082.508				
Jumlah Realisasi Anggaran kegiatan tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran kedua (meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan)					30.034.100				

Capaian Sasaran strategis Tahun 2018 -2022

Keberhasilan / Kegagalan tidak dapat dilihat dari besar total persentase kinerja atas program dan kegiatan dengan kondisi meningkat atau menurun, namun keberhasilan/kegagalan dapat dilihat dari kondisi apakah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dapat diserap atau dipergunakan dengan baik dan benar sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Serapan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Teluk Bayur pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Realisasi anggaran

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Realisasi anggaran						
No	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	6.782.107.751	5.841.631.394	86,13
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Rp 37.500.000	Rp 30.034.100	80,09
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen, Renstra, Renja, RKA dan DPA	5	Rp 25.000.000	Rp 22.224.100	88,90
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang disusun Rencana Aksi, SOP, LKJIP, SKM, PK, dan	4	Rp 12.500.000	Rp 7.810.000	62,48
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp 5.464.131.435	Rp 4.971.524.612	90,98
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12	Rp 5.273.751.435	Rp 4.788.644.612	90,80
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah jasa honor Pengelola administrasi keuangan yang dibayar	12	Rp 190.380.000	Rp 182.880.000	96,06
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah Pada SKPD	5	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang dibuatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya	25	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00

1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang dibuatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya	25	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 380.413.700	Rp 368.600.700	96,89
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Rp 5.499.800	Rp 3.902.800	70,96
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	5	Rp 102.788.600	Rp 102.556.600	99,77
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4	Rp 13.386.300	Rp 12.926.300	96,56
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Rapat Yang disediakan Bahan Logistik Kantor	48	Rp 101.494.000	Rp 99.166.000	97,71
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis disediakannya Bahan Cetak dan Penggandaan	3	Rp 13.645.000	Rp 10.341.800	75,79
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis disediakannya bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	2	3.600.000	2.000.000	55,56
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan (Bulan)	30	Rp 140.000.000	Rp 137.707.200	98,36
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	2	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78
1.6.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 336.052.632	Rp 327.885.332	97,57
1.6.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman dan Materai yang disediakan	2	2.992.800	2.992.800	100,00
1.6.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Disediaknya jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	12	Rp 77.145.000	Rp 70.636.520	91,56
1.6.5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	6	Rp 29.745.000	Rp 29.500.000	99,18
1.6.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan dibayarkanya Jasa Pealayanan Umum Kantor (Tenaga Kontrak)	12	Rp 226.169.832	Rp 224.756.012	99,37
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 100.999.984	Rp 100.999.984	100,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Rp 74.999.984	Rp 72.977.550	97,30
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Lahan Bangunan Kantor yang di pelihara	4	Rp 26.000.000	Rp 25.980.000	99,92
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kampung Yang Dibina	4%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	Rp 3.782.788.896	Rp 3.659.757.714	96,75
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	Rp 439.999.860	Rp 421.488.610	95,79
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kampung dan Kelurahan yang di fasilitasi dalam Musrenbang Tingkat Kampung dan Kelurahan	12	Rp 15.000.000	Rp 14.960.000	99,73
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Bulan Pejuang Sigap yang dibayarkan honoronya	12	Rp 214.999.860	Rp 211.098.310	98,19
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, PKK, FKKS, MTQ	12	Rp 210.000.000	Rp 195.430.300	93,06
3.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	Rp 3.342.789.036	Rp 3.238.269.104	96,87
3.2.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Terlaksananya Pendampingan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat RT di Wilayah Kelurahan	12	Rp 10.000.000	Rp 3.350.000	33,50
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Operasional Kegiatan Kelurahan dan Peras Serta Masyarakat RT di Kelurahan	12	Rp 3.332.789.036	Rp 3.234.919.104	97,06
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas Dan Penanggulangan Bencana Dengan Kepolisian, TNI, dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan yan dilaksanakan	12	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah HUT RI yang dilaksanakan	1	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65
6.1	asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kampung yang di fasilitasi dalam pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Rp 59.200.000	Rp 59.200.000	100,00
6.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	Rp 20.000.000	Rp 19.720.000	98,60
			100%	Rp 10.924.096.647	Rp 9.650.116.608	88,34

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Capaian Target

NO	Sasaran	Sasaran/ Target	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI		REALISASI		KETERANGAN
				TARGET VOLUME	ANGGARAN (RP)	%	REALISASI (RP)	
1	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	87,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.446.055.119	85,57	5.515.788.496	BERKINERJA TINGGI
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 37.500.000	80,09	Rp 30.034.100	BERKINERJA TINGGI
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.000	88,90	Rp 22.224.100	BERKINERJA TINGGI
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp 12.500.000	62,48	Rp 7.810.000	BERKINERJA TINGGI
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.464.131.435	90,98	Rp 4.971.524.612	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112	5273751435	90,08%	Rp 4.788.644.612	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Rp 190.380.000	96,06	Rp 182.880.000	BERKINERJA TINGGI
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000	87,00	Rp 8.699.600	BERKINERJA TINGGI
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp 10.000.000	87,00	Rp 8.699.600	BERKINERJA TINGGI
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	BERKINERJA TINGGI
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	BERKINERJA TINGGI
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 380.413.700	96,89	Rp 368.600.700	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp 5.499.800	70,96	Rp 3.902.800	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp 102.788.600	99,77	Rp 102.556.600	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp 13.386.300	96,56	Rp 12.926.300	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp 101.494.000	97,71	Rp 99.166.000	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp 13.645.000	75,79	Rp 10.341.800	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3.600.000	55,56	2.000.000	BERKINERJA SEDANG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp 140.000.000	98,36	Rp 137.707.200	BERKINERJA TINGGI
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Rp 438.010.000	4,78	Rp 20.929.500	BERKINERJA RENDAH
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Rp 438.010.000	4,78	Rp 20.929.500	BERKINERJA RENDAH
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 336.052.632	97,57	Rp 327.885.332	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.992.800	100,00	2.992.800	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp 77.145.000	91,56	Rp 70.636.520	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp 29.745.000	99,18	Rp 29.500.000	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp 226.169.832	99,37	Rp 224.756.012	BERKINERJA TINGGI
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 100.999.984	100,00	Rp 100.999.984	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp 74.999.984	97,30	Rp 72.977.550	BERKINERJA TINGGI
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Rp 26.000.000	99,92	Rp 25.980.000	BERKINERJA TINGGI
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	100%	Rp 15.000.000	98,73	Rp 14.809.500	BERKINERJA TINGGI

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Rp 3.782.788.896	96,75	Rp 3.659.757.714	BERKINERJA TINGGI
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 439.999.860	95,79	Rp 421.488.610	BERKINERJA TINGGI
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Rp 15.000.000	99,73	Rp 14.960.000	BERKINERJA TINGGI
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Rp 214.999.860	98,19	Rp 211.098.310	BERKINERJA TINGGI
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp 210.000.000	93,06	Rp 195.430.300	BERKINERJA TINGGI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 3.342.789.036	96,87	Rp 3.238.269.104	BERKINERJA TINGGI
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12	Rp 10.000.000	33,50	Rp 3.350.000	BERKINERJA RENDAH
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Rp 3.332.789.036	97,06	Rp 3.234.919.104	BERKINERJA TINGGI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	BERKINERJA RENDAH
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	BERKINERJA RENDAH
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp 225.000.000	8,68	Rp 19.520.000	BERKINERJA TINGGI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	BERKINERJA TINGGI
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	BERKINERJA TINGGI
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	Rp 40.000.000	88,70	Rp 35.478.000	BERKINERJA TINGGI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	Rp 79.200.000	99,65	Rp 78.920.000	BERKINERJA TINGGI
		asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 79.200.000	99,65	Rp 78.920.000	BERKINERJA TINGGI
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Rp 59.200.000	100,00	Rp 59.200.000	BERKINERJA TINGGI
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Rp 20.000.000	98,60	Rp 19.720.000	BERKINERJA TINGGI
			100%	Rp 10.924.096.647	88,34	Rp 9.650.116.608	BERKINERJA TINGGI

Realisasi yang mendukung Sasaran Pertama yaitu meningkatnya Pelayanan

Umum/pelayanan kepada masyarakat adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada Program ini di tahun 2022 diberikan anggaran sebesar Rp.

6.782.107.751 dengan Target yang ingin dicapai adalah 100 %. Program ini dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.841.631.394 atau sebesar 86,13 %. Secara keseluruhan program ini adalah mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja kantor Camat Teluk Bayur. Program ini terdiri dari 8 Kegiatan dan 20 sub Kegiatan yaitu :

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada Kegiatan ini diberikan Anggaran sebesar, Rp. 37.500.000 teralisasi sebesar Rp. 30.034.100 atau 80,09 % terdiri dari Sub Kegiatan

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 25.000.000 dan teralisasi sebesar Rp. 22.224.100 atau 88,90 %

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD , dengan anggaran sebesar Rp. 12.500.000 dan teralisasi sebesar Rp. 7.810.000 atau sebesar 62,48 %

1.1.3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.464.131.435,- target yang ingin dicapai adalah 100 %. Kegiatan ini berhasil direalisasikan dengan capaian target sebesar 90,98 % atau sebesar Rp. 4.971.524.612,-. capaian kinerja kegiatan ini masih termasuk dengan capaian kinerja tinggi, kegiatan ini termasuk kedalam faktor yang membuat kinerja menjadi baik,. Pada kegiatan ini untuk target capaian outputnya adalah sebesar 12 bulan untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah. dalam arti anggaran ini digunakan untuk penyediaan pembayaran gaji pegawai kantor Camat Teluk Bayur tahun 2022 ini dapat direalisasikan juga sebesar 12 bulan . untuk capaian output kegiatan ini berhasil sebagai penunjang keberhasilan pencapaian kinerja kecamatan Teluk Bayur .pada kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1.1.4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, tersedia anggaran sebesar Rp. 5.273.751.435,- dan terealisasi sebesar, Rp. 4.788.644.612,- atau 90,08 %

1.1.5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN, tersedia anggaran sebesar Rp. 190.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.880.000,- atau 96,06 %

1.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, tersedia anggaran

sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.699.600,- atau 87,0 %

1.2.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, tersedia anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.699.600,- atau 87,0 %

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, tersedia anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, tersedia anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, tersedia anggaran Rp. 380.413.700,- terealisasi sebesar Rp. 368.600.700 atau 96,89 % terdiri dari sub kegiatan

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, tersedia anggaran sebesar Rp. 5.499.800,- terealisasi sebesar Rp. 3.902.800,- atau 70,96 %

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, tersedia anggaran sebesar 102.788.600,- dan terealisasi, sebesar Rp. 102.556.600,- atau 99,77 %

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, tersedia anggaran sebesar Rp. 13.386.300,- terealisasi sebesar Rp. 12.926.300,- atau 96,56 %

1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, tersedia anggaran sebesar Rp. 101.494.000

Dan terealisasi sebesar Rp. 99.166.000 atau 97,71 %

1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, tersedia anggaran sebesar Rp. 13.645.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.341.800,- atau 75,79 %

1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, tersedia anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- dengan target 2 jenis sudah terpenuhi seperti surat kabar harian dan majalah

1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, tersedia anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 137.707.200,- atau 98,36 %

Anggaran ini untuk menunjang kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam hal peningkatan kapasitas dan lainnya

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedia anggaran sebesar Rp. 438.010.000,- Terealisasi anggaran sebesar Rp. 20.929.500 atau 4,78 %

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, tersedia anggaran sebesar Rp. 438.010.000,- Terealisasi anggaran sebesar Rp. 20.929.500,- untuk pengadaan Kendaraan Operasional Kecamatan namun pada tahun 2022 tidak dapat terealisasi karena dari pihak penyedia tidak dapat menyediakan unit yang dimaksud hanya terealisasi kendaraan roda 2 satu unit

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, tersedia anggaran sebesar Rp 336.052.632,- terealisasi sebesar Rp. 327.885.332,- atau 97,57 %

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedia anggaran sebesar Rp. 2.992.800. terealisasi sebesar Rp. 2.992.800 atau 100%

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, tersedia anggaran sebesar Rp. 77.145.000,- terealisasi sebesar Rp. 70.636.520, atau 91,56 %

1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, tersedia anggaran sebesar Rp. 29.745.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.500.000,- atau 99,18 %

1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, tersedia anggaran sebesar Rp. 226.169.832,- dan terealisasi sebesar Rp. 224.756.012,- atau 99,37 %

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, tersedia anggaran sebesar Rp. 100.999.984,- terealisasi sebesar Rp. 100.999.984,- atau 100 %

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, tersedia anggaran sebesar Rp. 74.999.984,- terealisasi sebesar Rp. 72.977.550,- atau 97,30 % Anggaran ini untuk biaya pemeliharaan kendaraan untuk menunjang keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Teluk Bayur selama Tahun 2022

1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, tersedia anggaran sebesar Rp. 26.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.980.000,- atau 99,92 % Untuk perawatan gedung dan bangunan Kantor Kecamatan

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pada Program ini tersedia anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.809.500,- terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub Kegiatan antara lain :

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan,

2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, tersedia anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.809.500,- atau 98,73%

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pada Program ini tersedia anggaran Rp. 3782788896 dan terdiri dari 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dan terealisasi sebesar Rp. 3.659.757.714,-

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, tersedia anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.960.000,- atau 99,73 %

3.1.2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja

Kecamatan, tersedia anggaran sebesar Rp. 214.999.860,- terealisasi sebesar Rp. 211.098.310,- atau 98,19 %

3.1.3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, tersedia anggaran sebesar 210.000.000,-

3.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, tersedia anggaran Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.3.350.000,- atau 33,50%

3.2.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, tersedia anggaran sebesar Rp. 3.332.789.036,- teralisasi sebesar Rp. 3.234.919.104,- atau 97,06%

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pada Program ini tersedia anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.520.000,- atau 8,68 % ini anggaran untuk penanggulangan Covid 19 namun pada tahun 2022 wabah sudah mulai mereda sehingga tidak secara maksimal terealisasi dan terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan tersedia anggaran Rp. 225.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 19.520.000,- atau 8,68 %

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada Program ini tersedia anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan terelisi sebesar Rp. 35.478.000,- atau 88,70 % terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, tersedia anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.35.478.000,- atau 88,70 % anggaran tersebut untuk membiayai Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 pada Bulan Agustus.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pada program ini tersedia anggaran sebesar Rp. 79.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.920.000,- atau 99,65%

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, tersedia anggaran Rp. 59.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.200.000,- atau 100%

6.1.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, tersedia anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.720.000,- atau 98,60 %

Pada hasil rewiuw program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya pelayanan umum / pelayanan kepada masyarakat. Dari 6 (enam) Program , 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan pada tahun 2022 dengan rincian ada 5(Limat) program berkinerja tinggi dan 1 (satu) program berkinerja Rendah , untuk kegiatan 12 kegiatan berkinerja tinggi dan 2 (dua) kegiatan berkinerja rendah. Sedangkan untuk sub kegiatan 28 (dua puluh delapan) kegiatan berkinerja tinggi, 2 (rendah) kegiatan berkinerja rendah dapat dilihat pada tabel berikut ini

Capaian kinerja pendukung keberhasilan sasaran strategis pertamaMeningkatnya pelayanan umum /pelayanan kepada masyarakat Berdasarkan Target Keuangan

NO	Sasaran	Sasaran/ Target	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		KETERANGAN
				TARGET VOLUME	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN	%	
1	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	87,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.446.055.119	5.515.788.496	85,57	BERKINERJA TINGGI
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 37.500.000	Rp 30.034.100	80,09	BERKINERJA TINGGI
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.000	Rp 22.224.100	88,90	BERKINERJA TINGGI
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp 12.500.000	Rp 7.810.000	62,48	BERKINERJA TINGGI
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.464.131.435	Rp 4.971.524.612	90,98	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112	5273751435	Rp 4.788.644.612	90,80	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Rp 190.380.000	Rp 182.880.000	96,06	BERKINERJA TINGGI
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00	BERKINERJA TINGGI
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00	BERKINERJA TINGGI
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00	BERKINERJA TINGGI
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00	BERKINERJA TINGGI
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 380.413.700	Rp 368.600.700	96,89	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp 5.499.800	Rp 3.902.800	70,96	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp 102.788.600	Rp 102.556.600	99,77	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp 13.386.300	Rp 12.926.300	96,56	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp 101.494.000	Rp 99.166.000	97,71	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp 13.645.000	Rp 10.341.800	75,79	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3.600.000	2.000.000	55,56	BERKINERJA SEDANG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp 140.000.000	Rp 137.707.200	98,36	BERKINERJA TINGGI

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78	BERKINERJA RENDAH
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78	BERKINERJA RENDAH
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 336.052.632	Rp 327.885.332	97,57	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.992.800	2.992.800	100,00	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp 77.145.000	Rp 70.636.520	91,56	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp 29.745.000	Rp 29.500.000	99,18	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp 226.169.832	Rp 224.756.012	99,37	BERKINERJA TINGGI
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 100.999.984	Rp 100.999.984	100,00	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp 74.999.984	Rp 72.977.550	97,30	BERKINERJA TINGGI
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Rp 26.000.000	Rp 25.980.000	99,92	BERKINERJA TINGGI
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73	BERKINERJA TINGGI
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73	BERKINERJA TINGGI
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73	BERKINERJA TINGGI
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Rp 3.782.788.896	Rp 3.659.757.714	96,75	BERKINERJA TINGGI
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 439.999.860	Rp 421.488.610	95,79	BERKINERJA TINGGI
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Rp 15.000.000	Rp 14.960.000	99,73	BERKINERJA TINGGI
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Rp 214.999.860	Rp 211.098.310	98,19	BERKINERJA TINGGI
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp 210.000.000	Rp 195.430.300	93,06	BERKINERJA TINGGI
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 3.342.789.036	Rp 3.238.269.104	96,87	BERKINERJA TINGGI
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12	Rp 10.000.000	Rp 3.350.000	33,50	BERKINERJA RENDAH
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Rp 3.332.789.036	Rp 3.234.919.104	97,06	BERKINERJA TINGGI
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68	BERKINERJA RENDAH
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68	BERKINERJA RENDAH
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68	BERKINERJA TINGGI
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70	BERKINERJA TINGGI
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70	BERKINERJA TINGGI
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70	BERKINERJA TINGGI
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65	BERKINERJA TINGGI
			asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65	BERKINERJA TINGGI
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Rp 59.200.000	Rp 59.200.000	100,00	BERKINERJA TINGGI
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Rp 20.000.000	Rp 19.720.000	98,60	BERKINERJA TINGGI
				100%	Rp 10.924.096.647	Rp 9.650.116.608	88,34	BERKINERJA TINGGI

Capaian kinerja pendukung keberhasilan sasaran strategis pertama Meningkatnya pelayanan umum /pelayanan kepada masyarakat Berdasarkan Target Capaian Output

NO	Sasaran	Sasaran/ Target	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		KETERANGAN
				TARGET VOLUME	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	
1	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	87,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.446.055.119	5.515.788.496	85,57	BERKINERJA TINGGI
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 37.500.000	Rp 30.034.100	80,09	BERKINERJA TINGGI
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.000	Rp 22.224.100	5 Dok	BERKINERJA TINGGI
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp 12.500.000	Rp 7.810.000	4 Dok	BERKINERJA TINGGI
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.464.131.435	Rp 4.971.524.612	90,98	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	5273751435	Rp 4.788.644.612	12 Bulan	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Rp 190.380.000	Rp 182.880.000	12 Bulan	BERKINERJA TINGGI
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00	BERKINERJA TINGGI
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	5 Laporan	BERKINERJA TINGGI
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00	BERKINERJA TINGGI
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	25 Stel	BERKINERJA TINGGI
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 380.413.700	Rp 368.600.700	96,89	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp 5.499.800	Rp 3.902.800	12 Jenis	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp 102.788.600	Rp 102.556.600	5 Jenis	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp 13.386.300	Rp 12.926.300	2 Jenis	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp 101.494.000	Rp 99.166.000	48 Kali	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp 13.645.000	Rp 10.341.800	3 Jenis	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3.600.000	2.000.000	2 Jenis	BERKINERJA SEDANG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp 140.000.000	Rp 137.707.200	30 Kali	BERKINERJA TINGGI
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78	BERKINERJA RENDAH
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	2 Unit	BERKINERJA RENDAH
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 336.052.632	Rp 327.885.332	97,57	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.992.800	2.992.800	2 Jenis	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp 77.145.000	Rp 70.636.520	12 Bulan	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp 29.745.000	Rp 29.500.000	6 Jenis	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp 226.169.832	Rp 224.756.012	12 Bulan	BERKINERJA TINGGI

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 100.999.984	Rp 100.999.984	100,00	BERKINERJA TINGGI
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp 74.999.984	Rp 72.977.550	12 Bulan	BERKINERJA TINGGI
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Rp 26.000.000	Rp 25.980.000	4 Gedung	BERKINERJA TINGGI
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73	BERKINERJA TINGGI
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73	BERKINERJA TINGGI
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	3 Kegiatan	BERKINERJA TINGGI
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Rp 3.782.788.896	Rp 3.659.757.714	96,75	BERKINERJA TINGGI
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 439.999.860	Rp 421.488.610	95,79	BERKINERJA TINGGI
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Rp 15.000.000	Rp 14.960.000	12 Bulan	BERKINERJA TINGGI
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Rp 214.999.860	Rp 211.098.310	12 Bulan	BERKINERJA TINGGI
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp 210.000.000	Rp 195.430.300	12 Bulan	BERKINERJA TINGGI
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 3.342.789.036	Rp 3.238.269.104	96,87	BERKINERJA TINGGI
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12	Rp 10.000.000	Rp 3.350.000	12 Bulan	BERKINERJA RENDAH
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Rp 3.332.789.036	Rp 3.234.919.104	12 Bulan	BERKINERJA TINGGI
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68	BERKINERJA RENDAH
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68	BERKINERJA RENDAH
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	12 Bulan	BERKINERJA TINGGI
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70	BERKINERJA TINGGI
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70	BERKINERJA TINGGI
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	1 Kegiatan	BERKINERJA TINGGI
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65	BERKINERJA TINGGI
			asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65	BERKINERJA TINGGI
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Rp 59.200.000	Rp 59.200.000	12 Bulan	BERKINERJA TINGGI
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Rp 20.000.000	Rp 19.720.000	12 Bulan	BERKINERJA TINGGI
				100%	Rp 10.924.096.647	Rp 9.650.116.608		BERKINERJA TINGGI

Capaian Realisasi yang mendukung Sasaran kedua yaitu : meningkatnya Akutabilitas kinerja Kecamatan adalah :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdapat kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki anggaran sebesar Rp. 37.500.000,- dengan target Program 100 % , program ini dapat di Realisasikan dengan Capaian Kinerja sebesar 80,09 % atau sebesar Rp. 30.034.100 atau 80,09 %,- artinya kegiatan yang ada dalam program ini pun capaian kerjanya tercapai, pada program ini memiliki 1 (satu) kegiatan yang mendukung Program ini adalah :

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Pada Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah memiliki anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 37.500.000,-dengan target Program 100 % , program ini dapat di Realisasikan dengan Capaian Kinerja sebesar 80,09 % atau sebesar Rp.

30.034.100 atau 80,09 % , pada kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Pada Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah memiliki 2 sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

Pada tahun 2022 kegiatan ini diberikan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dengan target sebesar 100 % , dan dapat direlaisasikan sebesar Rp. 22.224.100,- atau dengan pesentase sebesar 88,90 % . Sub kegiatan ini dikatakan berhasil dan merupakan salah satu sub kegiatan penunjang capaian kinerja kantor camat Teluk Bayur.

- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

Pada tahun 2022 kegiatan ini diberikan anggaran sebesar Rp.12.500.000,- dengan target sebesar 100 %, dan dapat direlalisasikan sebesar Rp. 7810.000,- atau dengan pesentase sebesar 62,48 %. Sub kegiatan ini dikatakan berhasil dan merupakan salah satu sub kegiatan penunjang capaian kinerja kantor camat Teluk Bayur.

Capaian kinerja pendukung keberhasilan sasaran strategis Kedua :								
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan								
Berdasarkan target Keuangan								
NO	SASARAN	TARGET SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		KETERANGAN
				%	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	
1	MENINGKATNYA PELAYANAN UMUM / PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	37.500.000	30.034.100	80,09	BERKINERJA TINGGI
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	37.500.000	30.034.100	80,09	BERKINERJA TINGGI
1.2.1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN	B (64)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	25.000.000	22.224.100	88,09	BERKINERJA TINGGI
1.2.2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100%	12.500.000	7.810.000	62,48	BERKINERJA SEDANG
JUMLAH				100%	37.500.000	30.034.100	80,09	BERKINERJA TINGGI

Capaian kinerja pendukung keberhasilan sasaran strategis Kedua :								
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan								
Berdasarkan target Capaian output								
NO	SASARAN	TARGET SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		KETERANGAN
				%	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	
1	MENINGKATNYA PELAYANAN UMUM / PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	37.500.000	30.034.100	80,09	BERKINERJA TINGGI
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	37.500.000	30.034.100	80,09	BERKINERJA TINGGI
1.2.1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN	B (64)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	25.000.000	22.224.100	5 Dok	BERKINERJA TINGGI
1.2.2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4 Dok	12.500.000	7.810.000	4 Dok	BERKINERJA SEDANG
JUMLAH						37.500.000	30.034.100	BERKINERJA TINGGI

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	URAIAN	TARGET YG INGIN DICAPAI	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI CAPAIAN TARGET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.782.107.751	5.841.631.394	86,13
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 37.500.000	Rp 30.034.100	80,09
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.000	Rp 22.224.100	88,90
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp 12.500.000	Rp 7.810.000	62,48
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.464.131.435	Rp 4.971.524.612	90,98
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp 5.273.751.435	Rp 4.788.644.612	90,80
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Rp 190.380.000	Rp 182.880.000	96,06
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 380.413.700	Rp 368.600.700	96,89
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp 5.499.800	Rp 3.902.800	70,96
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp 102.788.600	Rp 102.556.600	99,77
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp 13.386.300	Rp 12.926.300	96,56
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp 101.494.000	Rp 99.166.000	97,71
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp 13.645.000	Rp 10.341.800	75,79
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3.600.000	2.000.000	55,56
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp 140.000.000	Rp 137.707.200	98,36

1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 336.052.632	Rp 327.885.332	97,57
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.992.800	2.992.800	100,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp 77.145.000	Rp 70.636.520	91,56
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp 29.745.000	Rp 29.500.000	99,18
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp 226.169.832	Rp 224.756.012	99,37
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 100.999.984	Rp 100.999.984	100,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp 74.999.984	Rp 72.977.550	97,30
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Rp 26.000.000	Rp 25.980.000	99,92
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Rp 3.782.788.896	Rp 3.659.757.714	96,75
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 439.999.860	Rp 421.488.610	95,79
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Rp 15.000.000	Rp 14.960.000	99,73
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	Rp 214.999.860	Rp 211.098.310	98,19
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp 210.000.000	Rp 195.430.300	93,06
3.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 3.342.789.036	Rp 3.238.269.104	96,87
3.2.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12	Rp 10.000.000	Rp 3.350.000	33,50
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Rp 3.332.789.036	Rp 3.234.919.104	97,06
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65
6.1	asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Rp 59.200.000	Rp 59.200.000	100,00
6.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Rp 20.000.000	Rp 19.720.000	98,60
		100%	Rp 10.924.096.647	Rp 9.650.116.608	88,34

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian misi Kecamatan yang merupakan implementasi dari misi Keempat Kepala daerah dapat disimpulkan

BAB IV

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAN SEKSI

BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

a. Sekertariat

q. **Camat**

- *Tugas Pokok Dan Fungsi Camat*

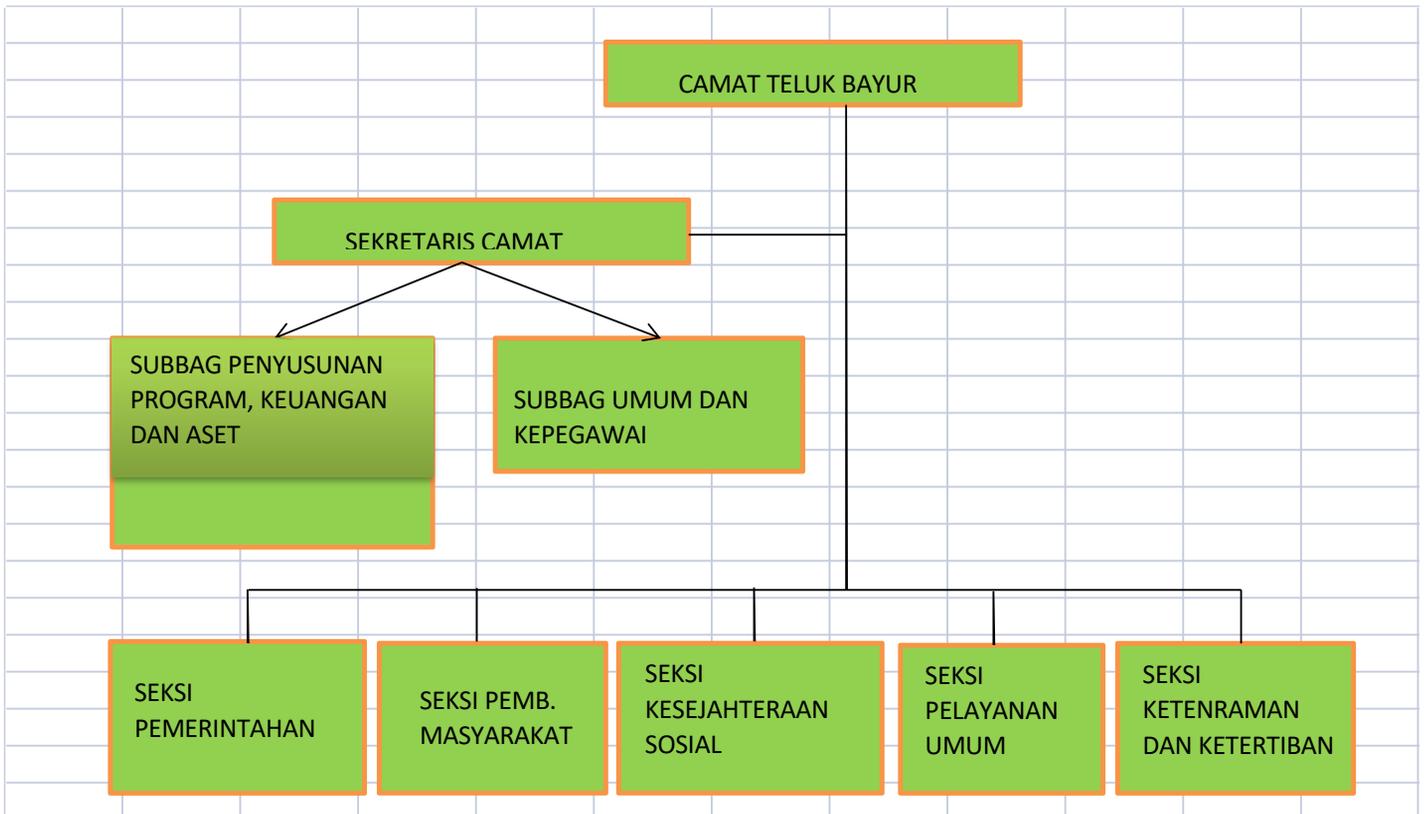
Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- Menyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kampung dan/atau kelurahan
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Organisasi

Pada tahun 2022 kecamatan Teluk Bayur memiliki jumlah pegawai sebanyak 26orang dengan rincian 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 2

(dua) orang Kasubbag di bawah sekretaris Camat dengan jumlah staf sebanyak 12 (dua belas) orang dan dibawah langsung camat ada 5 (lima) orang kepala Seksi dan terdapat 5 orang staf PNS dan 6 (enam) orang Tenaga Kontrak., struktur organisasi dapat dilihat seperti dibawah ini :



c. *Evaluasi dan Analisis Kinerja*

Pada tahun 2022, camat membuat perjanjian kinerja antara Camat Sebagai Kepala OPD dengan Bupati Sebagai Kepala daerah, hal ini dilakukan sebagai komitmen dari kepala OPD untuk menjalankan program dan Kegiatan yang ada di OPD untuk mensukseskan Kinerja Kepala Daerah. Perjanjian kinerja yang dimaksudkan dapat dilihat padatable di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SEGAH KABUPATEN BERAU						
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA						
TAHUN 2022						
No	Sasaran	Sebelum Review		Sasaran	Setelah Review	
		Indikator Kinerja	Target 2022		Indikator Kinerja	Capaian Target 2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-82	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,47
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP/ LAKIP	B (64,00)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP/ LAKIP	cc (58,,21) Evaluasi LKJIP Tahun 2021

Tabel diatas merupakan Capaian kinerja perjanjian kinerja kantor Camat Teluk Bayur berdasarkan indikator kinerja utama kecamatan Teluk Bayur pada tahun 2022. Dimana hasil capaian indikator kinerja meningkat setiap tahunnya terutama untuk indikator kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan yang mana pada tahun 2022 mendapatkan nilai 58,21CC) dari hasil evaluasi LKJ-IP tahun 2021 yang diperiksa pada tahun 2022

Berdasarkan Anggaran dalam DPA Tahun 2022 Kecamatan Teluk Bayur Perjanjian Kinerja antara Camat Teluk Bayur dengan Bupati Berau sebagai berikut

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022				
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR				
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI	82
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP/ LAKIP	NILAI	B (64,00)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.782.107.751	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 15.000.000	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.782.788.896	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 225.000.000	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 40.000.000	APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 79.200.000	APBD
		Rp 10.924.096.647	APBD

untuk hasil review kinerja indikator tersebut dapat dilihat dibawah ini :

HASIL REVIUW INDIKATOR KINERJA UTAMANILAI EVALUASI LKj-IP

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	CAPAIAN TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP	2018		
		2019		
		2020	B (70,00)	CC (57,49)
		2021	B (64)	CC (58,21)
		2022		BELUM DIADAKAN EVALUASI LKJ-IP

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Hasil review dan sebagai bahan Tahun 2022 diperjanjikan antara camat dan Bupati Berau adalah Sebagai berikut

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN TELUK BAYUR KABUPATEN BERAUBERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI	82

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP/ LAKIP	NILAI	B (64,00)
---	----------------------------------------------	------------------------------	-------	------------

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.782.107.751	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp15.000.000	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp3.782.788.896	100%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp225.000.000	100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp40.000.000	100%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp79.200.000	100%
		Rp10.924.096.647	100%

Capaian kinerja Kantor Camat Teluk Bayur pada tahun 2022

No	Sasaran	Sebelum Review		Sasaran	Setelah Review	
		Indikator Kinerja	Target 2022		Indikator Kinerja	Capaian Target 2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,714
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	B (64,00)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	CC (58,21) Hasil evaluasi LKJ-IP tahun 2021

Sedangkan pada Capaian kinerja anggaran pada tahun 2022 apabila dilihat dari jumlah anggaran untuk capaian kinerja yang diperoleh adalah 88,34 % atau sebesar Rp. 9650116608,-dari jumlah anggaran sebesar Rp.10.924.096.64,- capaian kinerja .dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	URAIAN	TARGET YG INGIN DICAPAI	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI CAPAIAN TARGET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.782.107.751	5.841.631.394	86,13
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 37.500.000	Rp 30.034.100	80,09
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Rp 25.000.000	Rp 22.224.100	88,90
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Rp 12.500.000	Rp 7.810.000	62,48

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.464.131.435	Rp 4.971.524.612	90,98
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 5.273.751.435	Rp 4.788.644.612	90,80
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	100%	Rp 190.380.000	Rp 182.880.000	96,06
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Rp 10.000.000	Rp 8.699.600	87,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 380.413.700	Rp 368.600.700	96,89
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Rp 5.499.800	Rp 3.902.800	70,96
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp 102.788.600	Rp 102.556.600	99,77
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Rp 13.386.300	Rp 12.926.300	96,56
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	Rp 101.494.000	Rp 99.166.000	97,71
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Rp 13.645.000	Rp 10.341.800	75,79
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	3.600.000	2.000.000	55,56
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Rp 140.000.000	Rp 137.707.200	98,36
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	Rp 438.010.000	Rp 20.929.500	4,78
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 336.052.632	Rp 327.885.332	97,57
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.992.800	2.992.800	100,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp 77.145.000	Rp 70.636.520	91,56
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp 29.745.000	Rp 29.500.000	99,18
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Rp 226.169.832	Rp 224.756.012	99,37
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 100.999.984	Rp 100.999.984	100,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	Rp 74.999.984	Rp 72.977.550	97,30
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	Rp 26.000.000	Rp 25.980.000	99,92

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.809.500	98,73
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Rp 3.782.788.896	Rp 3.659.757.714	96,75
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 439.999.860	Rp 421.488.610	95,79
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	Rp 15.000.000	Rp 14.960.000	99,73
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	Rp 214.999.860	Rp 211.098.310	98,19
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	Rp 210.000.000	Rp 195.430.300	93,06
3.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 3.342.789.036	Rp 3.238.269.104	96,87
3.2.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	100%	Rp 10.000.000	Rp 3.350.000	33,50
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 3.332.789.036	Rp 3.234.919.104	97,06
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	Rp 225.000.000	Rp 19.520.000	8,68
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	Rp 40.000.000	Rp 35.478.000	88,70
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65
6.1	asilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 79.200.000	Rp 78.920.000	99,65
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	Rp 59.200.000	Rp 59.200.000	100,00
6.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 20.000.000	Rp 19.720.000	98,60
		100%	Rp 10.924.096.647	Rp 9.650.116.608	88,34

Untuk fungsi Camat Teluk bayur Selain berdasarkan anggaran antara lain :

- t. Koordinasi dengan instansi vertikal di Kecamatan Teluk Bayur dalam Penanganan Pandemic Covid 19.

- u. Koordinasi dengan instansi vertikal untuk menertibkan aset / sarana dan prasarana milik pemerintah kabupaten Berau dalam hal pemeliharaan fasilitas pelayanan umum
- v. Membina dan mengawasi Pemerintahan Kampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- w. Mengkoordinasikan upaya ketentraman dan ketertiban bersama dengan muspika Kecamatan Teluk Bayur
- x. Menegakkan peraturan daerah yang berlaku bersama dengan muspika kecamatan Teluk Bayur.
- y. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat di Kecamatan Teluk Bayur.

- ***Tindak Lanjut Rencana***

Untuk meningkatkan kinerja dari kecamatan seghah , perlu adaya hal hal yang harus di tindak lanjuti untuk mencapai kinerja yang baik yaitu :

- s. Perlu adanya komitmen yang baik dari seluruh pegawai kecamatan seghah dalam melaksanakan setiap kegiatan baik yang ada dalam DPPA atau pun yang tidak ada dalam DPPA kecamatan Teluk Bayur harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan dengan rasa tanggung jawab.
- t. Perlu adanya kerjasama antara sesama bagian dan seksi untuk penyelesaian kagiatan atau laporan yang baik bagi kecamatan Teluk Bayur.

II. Sekretaris Camat

- **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat**

Berikut adalah rincian tugas dari sekretaris Camat sesuai dengan Pasal 15, yaitu :

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja OPD berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub bagian sesuai dengan bidang

tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu

- Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- Mengkoordinasikan pelayanan teknis Administrasi baik internal kecamatan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan Kecamatan guna tertib administrasi
- Merencanakan mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik kecamatan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat berdasarkan rencana dan

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;

- Melaporkan kegiatan sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sekretaris Camat Mempunyai Tugas :

- Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kecamatan di bidang Pengelolaan Kesekretariatan yang meliputi Administrasi Penyusunan Program, Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi dan Pelaporan Program, Urusan keuangan, Administrasi Umum Kepegawaian berkaitan dengan Surat Menyurat
Perengkapan, pengandaan dan hubungan dengan masyarakat serta dan Administrasi Yang mendukung Kelancaran tugas dan kegiatan Kecamatan dengan memberikan pelayanan Administrasi Kepada Satuan Organisasi Kecamatan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugas yang diberikan oleh Camat

Sekretaris Camat memiliki Fungsi :

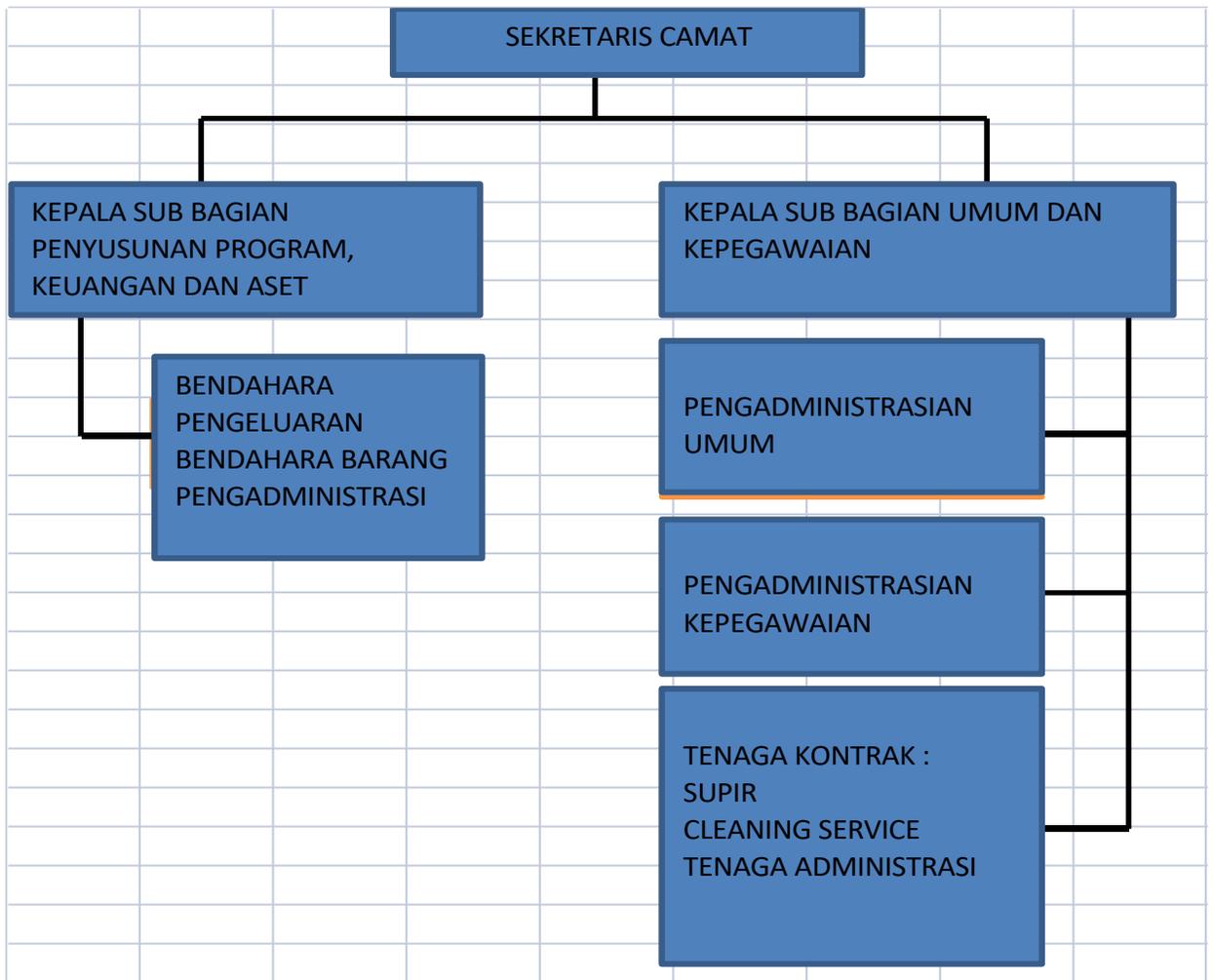
- a. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Berdasarkan Renstra, data dan Informasi serta aturan yang berlaku
- b. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pengelolaan dan bimbingan administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan keuangan di
- c. Lingkungan Kecamatan guna Tertib Administrasi
- d. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan dan Laporan kinerja,

Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen

- e. Pelayanan Publik Kecamatan
- f. Mengatur dan Mengawasi terselenggaranya Pengelolaan Surat Menyurat, Penggandaan, Kearsipan dan Perlengkapan rumah tangga, Inventaris serta urusan Umum.
- g. Mengelola Urusan Administrasi Kepegawaian, Kesejahteraan dan Pendidikan Pelatihan Pegawai
- h. Mengelola Urusan Rumah Tangga Kecamatan dan Hubungan masyarakat
- i. Mengevaluasi serta menilai kinerja /prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diberikan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

c. Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan Teluk Bayur

Pada tahun 2022 struktur organisasi yang ada di sekretariat kecamatan Teluk Bayur dipimpin oleh seorang sekretaris camat, dan memiliki 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Sub bagian Penyusunan program Keuangan dan Aset dan Kepala Sub bagian Umum dan kepegawaian, pada sub bagian penyusunan program, keuangan dan aset memiliki 3 (tiga) orang staf PNS dan (satu) Orang PTT pada sub bagian umum dan kepegawaian memiliki 1 orang staf PNS dan 4 (empat) orang tenaga kontrak, struktur organisasi di sekretariat Kecamatan Teluk Bayur dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



- *Evaluasi dan Analisis Kinerja*

Pada tahun 2022 sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Camat telah melaksanakan perjanjian kinerja yang dapat dilihat padatable dibawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS CAMAT ANGGARAN MURNI
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TELUK BAYUR	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (64,00)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI PEMERINTAHAN	Satuan	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Teluk Bayur	Nilai LKJIP Kecamatan Teluk Bayur	Nilai	B (70,00)
2	Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang disusun dan benar	Dokumen	5
3	Tertib Administrasi Aset	Jumlah Laporan Aset / Rekon aset yang disusun dan dilaporkan	Kali	1
4	Disiplin Aparatur Kecamatan	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Orang	0
5	Tertib Administrasi Umum	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Surat	Surat Masuk 500 Surat, Surat Keluar 1000 Surat
6	Tertib administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Yang diuruskan administrasi Kepegawaiannya	Orang	25 Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 210.000.000	APBD
2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.499.800	APBD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 102.788.600	APBD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 13.386.300	APBD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 101.494.000	APBD
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 13.645.000	APBD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.600.000	APBD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 140.000.000	APBD
JUMLAH			Rp 380.413.700	

Seiring perjalanan di tahun 2022 telah terjadi perubahan anggaran yang dan perubahan anggaran rutin yang terjadi hampir diakhir tahun 2022 seperti yang dapat dilihat di bawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA REVIUW
SEKRETARIS CAMAT KANTOR CAMAT TELUK BAYUR TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (65,00)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS CAMAT	Satuan	TARGET
1	Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang disusun dan benar	Dokumen	5
2	Tertib Administrasi Aset	Jumlah Laporan Aset / Rekon aset yang disusun dan dilaporkan	Kali	1
3	Disiplin Aparatur Kecamatan	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Orang	0
4	Tertib Administrasi Umum	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Surat	Surat Masuk 500 Surat, Surat Keluar 1000 Surat
5	Tertib administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Yang diuruskan administrasi Kepegawaiannya	Orang	5 Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	APBD

2	DAERAH		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000	APBD
3		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.273.751.435	APBD
4			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	190.380.000	APBD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	APBD
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.499.800	APBD
6			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.788.600	APBD
7			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.386.300	APBD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.494.000	APBD
9			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.645.000	APBD
10			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	APBD
11			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	438.010.000	APBD
12		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.992.800	APBD
13			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.145.000	APBD
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.745.000	APBD	

14			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.169.832	APBD
15		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.999.984	APBD
16			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.000.000	APBD
JUMLAH				6.782.107.751	APBD

Untuk realisasi capaian kinerja perjanjian kinerja tahun 2022 darisekretaris Camat adalah sebagai berikut

**CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJABERDASARKAN
REALISASI ANGGARAN SEKRETARIS CAMAT
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI PEMERINTAHAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat Kecamatan Segah	kepuasan Masyarakat Kecamatan Teluk Bayur (IKM)	NILAI Nilai	82 B (64,00)	84,458,21) TAHUN 2021
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Jumlah dokumen Laporan LKIP/ LAKIP Keuangan yang disusun dan benar	NILAI Dokumen	B (64,00) 5	CC(58,21) TAHUN 20215
3	Tertib Administrasi Aset	Jumlah Laporan Aset/ Rekon aset yang disusun dan dilaporkan	Kali	1	1
4	Disiplin Aparatur Kecamatan	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Orang	0	0

5	Tertib Administrasi Umum	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Surat	Surat Masuk 500 Surat, Surat Keluar 1000 Surat	Surat Masuk 492 Surat dan Surat Keluar 692 Surat
6	Tertib administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Yang diuruskan administrasi Kepegawaiannya	Orang	5 Orang	5 Orang

NO	URAIAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (RP)	CAPAIAN TARGET	REALISASI ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.782.107.751	86,13	5.841.631.394
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp37.500.000	80,09	Rp30.034.100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp25.000.000	88,90	Rp22.224.100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp12.500.000	62,48	Rp7.810.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp5.464.131.435	90,98	Rp4.971.524.612
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp5.273.751.435	90,80	Rp4.788.644.612
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Rp190.380.000	96,06	Rp182.880.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp10.000.000	87,00	Rp8.699.600
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp10.000.000	87,00	Rp8.699.600
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp15.000.000	100,00	Rp15.000.000
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Rp15.000.000	100,00	Rp15.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp380.413.700	96,89	Rp368.600.700

1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp5.499.800	70,96	Rp3.902.800
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp102.788.600	99,77	Rp102.556.600
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp13.386.300	96,56	Rp12.926.300
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp101.494.000	97,71	Rp99.166.000
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp13.645.000	75,79	Rp10.341.800
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3.600.000	55,56	2.000.000
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp140.000.000	98,36	Rp137.707.200
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Rp438.010.000	4,78	Rp20.929.500
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Rp438.010.000	4,78	Rp20.929.500
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp336.052.632	97,57	Rp327.885.332
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.992.800	100,00	2.992.800
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp77.145.000	91,56	Rp70.636.520
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp29.745.000	99,18	Rp29.500.000
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp226.169.832	99,37	Rp224.756.012
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp100.999.984	100,00	Rp100.999.984
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp74.999.984	97,30	Rp72.977.550
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Rp26.000.000	99,92	Rp25.980.000

CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJABERDASARKAN CAPAIAN OUTPUT
SEKRETARIS CAMATKANTOR CAMAT TELUK BAYUR TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN	Satuan	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	84,47
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (64,00)	cc(58,21) TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI PEMERINTAHAN	Satuan	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Teluk Bayur	Nilai LKJIP Kecamatan Teluk Bayur	Nilai	B (70,00)	A (82,56)
2	Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang disusun dan benar	Dokumen	5	5
3	Tertib Administrasi Aset	Jumlah Laporan Aset/ Rekon aset yang disusun dan dilaporkan	Kali	1	1
4	Disiplin Aparatur Kecamatan	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Orang	0	0
5	Tertib Administrasi Umum	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Surat	Surat Masuk 500 Surat, Surat Keluar 1000 Surat	Surat Masuk 492 Surat dan Surat Keluar 692 Surat
6	Tertib administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Yang diuruskan administrasinya Kepegawaiannya	Orang	5 Orang	5 Orang

NO	URAIAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (RP)	CAPAIAN TARGET	REALISASI ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.782.107.751	86,13	5.841.631.394
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp37.500.000	80,09	Rp30.034.100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp25.000.000	88,90	Rp22.224.100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp12.500.000	62,48	Rp7.810.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp5.464.131.435	90,98	Rp4.971.524.612
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp5.273.751.435	90,80	Rp4.788.644.612
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Rp190.380.000	96,06	Rp182.880.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp10.000.000	87,00	Rp8.699.600
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Rp10.000.000	87,00	Rp8.699.600
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp15.000.000	100,00	Rp15.000.000
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	Rp15.000.000	100,00	Rp15.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp380.413.700	96,89	Rp368.600.700
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp5.499.800	70,96	Rp3.902.800
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp102.788.600	99,77	Rp102.556.600
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp13.386.300	96,56	Rp12.926.300
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp101.494.000	97,71	Rp99.166.000
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp13.645.000	75,79	Rp10.341.800
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3.600.000	55,56	2.000.000
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp140.000.000	98,36	Rp137.707.200

1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Rp438.010.000	4,78	Rp20.929.500
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Rp438.010.000	4,78	Rp20.929.500
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp336.052.632	97,57	Rp327.885.332
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.992.800	100,00	2.992.800
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp77.145.000	91,56	Rp70.636.520
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp29.745.000	99,18	Rp29.500.000
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp226.169.832	99,37	Rp224.756.012
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp100.999.984	100,00	Rp100.999.984
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp74.999.984	97,30	Rp72.977.550
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Rp26.000.000	99,92	Rp25.980.000

Hasil analisis kinerja pada sekeratariat dapat dilihat bahwa berdasarkan anggaran yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kinerja sekretaris camat dapat di pertanggung jawabkan realisasinya yaitu sebesar Rp. **5.841.631.394-** dari anggaran yang disediakan untuk bagian sekretariat yaitu sebesar Rp. **6.782.107.751,-** atau apabila dipersentasekan untuk bagian sekretariat terealisasi sebesar **86,13 %**, bagian sekeratariat ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bagian yaitu sub bagian penyusunan anggaran, keuangan dan aset serta sub bagian umum dan kepegawaian yang masing masing sub bagian pun membuat perjanjian kenerjanya. Secara capaian output pun bagian sekretariat pun dapat merealisasikan sesuai dengan target capaian output yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kinerjanya

- ***Rencana Tindak Lanjut***

Ada beberapa hal yang dilakukan di sekretariat untuk meningkatkan capaian kinerja di

sekretariat yaitu :

- Menetapkan komitmen kerja antara sekretaris Camat dengan Kepala sub bagian untuk melaksanakan kegiatan dan pekerjaan untuk meningkatkan capaian kinerja di sekretariat
 - Bekerja sama dalam menyusun Laporan Laporan capaian kinerja yang baik dan benar di bagian penyusunan program
 - Membagi pekerjaan atau kegiatan baik di bidang penyusunan program, keuangan dan aset maupun di bagian umum dan kepegawaian.
 - Memberikan teguran teguran baik lisan ataupun tertulis untuk meningkatkan capaian kehadiran pegawai setiap harinya.
 - Memberikan piagam penghargaan kepada pegawai yang setiap harinya rutin turun ke kantor dalam kurun waktu 3 bulan tanpa ada catatan izin, dan sakit.
 - Menciptakan koordinasi yang baik antara atasan dengan bawahan agar saling bersinergi dalam melaksanakan kegiatan maupun dalam membuat laporan laporan yang dibutuhkan oleh Kantor Camat sejah.
- ***Sub Bagian Umum dan Kepegawaian***
 - **Tugas Pokok Dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 mempunyai rincian tugas:**
 - Menyusun rencana kerja Subbag Umum dan Kepegawaian berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bag umum dan kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
 - Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bag umum dan kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai

peraturan yang berlaku;

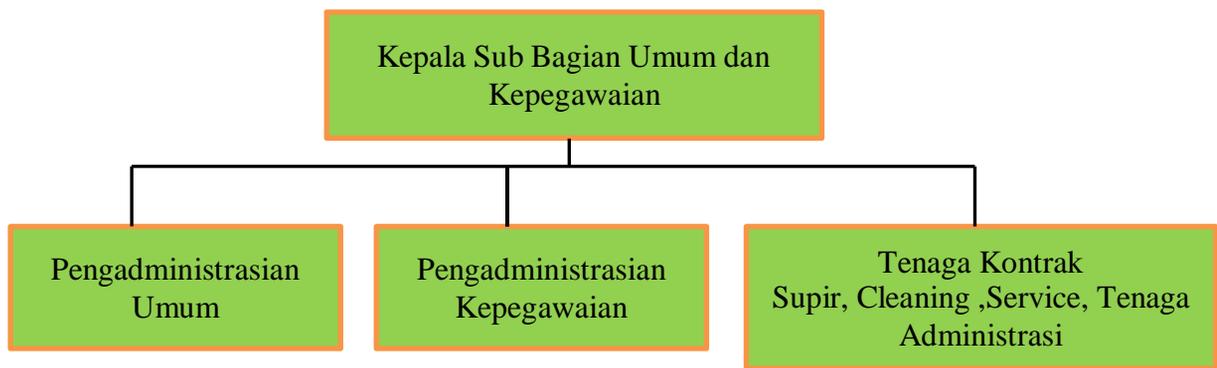
- Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbag umum dan kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Subbag umum dan kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu terciptanya suasana aman, bersih dan tertib
- Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat menyurat, pengadaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
- Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai dilingkungan kecamatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjenjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
- Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
- Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbag umum dan kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah

- Melaporkan kegiatan Subbag umum dan kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan
- Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan kecamatan

Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- A. Menyusun Rencana Kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian
- B. Menyelenggarakan, Melaksanakan dan Mengelola administrasi Kepegawaian, Kesejahteraan Pegawai, kesehatan Pegawai dan Pendidikan Pelatihan Pegawai
- C. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, Rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan.
- D. Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran
- E. Mengkoordinasikan Persiapan pelaksanaan kegiatan rapat meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan materi rapat.
- F. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- G. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Struktur Organisasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Tahun 2022,yang dianggarkan pada anggaran murni Tahun anggaran 2022

**PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ANGGARAN MURNI
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (64,00)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Satuan	TARGET
1	Disiplin Aparatur Kecamatan	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Orang	0
2	Tertib Administrasi Umum	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Surat	Surat Masuk 500 Surat, Surat Keluar 1000 Surat
3	Tertib administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Yang diuruskan administrasi Kepegawaiannya	Orang	25 Orang

L

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.499.800	APBD
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	102.788.600	APBD
2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.386.300	APBD
3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	101.494.000	APBD
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.645.000	APBD
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	3.600.000	APBD
6	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	140.000.000	APBD
JUMLAH			380.413.700	APBD

Seiring dengan perjalanan waktu di tahun 2022, ada perubahan anggaran yang terjadi secara rutin di akhir tahun., perubahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**PERJANJIAN KINERJA REVIUW SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ANGGARAN PERUBAHAN
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET
----	-------------------	-------------------	--------	--------

1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (64,00)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS CAMAT	Satuan	TARGET
1	Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang disusun dan benar	Dokumen	5
2	Tertib Administrasi Aset	Jumlah Laporan Aset / Rekon aset yang disusun dan dilaporkan	Kali	1

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN	
1	LEMBAGA ADMINISTRASI DAERAH	Administrasi Keluar	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Surat	Surat masuk 500 Surat, Surat Keluar 1000 Surat	
4			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.499.800	APBD
5			Tertib administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang diuruskan administrasi Kepegawaian	Orang	Orang
				Penyediaan Peralatan Kantor	Rp2.788.600	APBD
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp13.386.300	APBD	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp101.494.000	APBD	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp13.645.000	APBD	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	APBD	

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp140.000.000	APBD
				380.413.700	APBD

Untuk Evaluasi anggaran sub bagian umum dan Kepegawaian pada DPPA Tahun anggaran 2022 untuk Target capaian Kinerja Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Menurut Realisasi Keuangan
Kantor Camat Teluk Bayur Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	84,49
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	B (64,00)	CC (58,21) Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Satuan	TARGET	REALISASI
1	Disiplin Aparatur Kecamatan	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Orang	0	1 Orang (1 surat Teguran)
2	Tertib Administrasi Umum	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Surat	Surat Masuk 500 Surat, Surat Keluar 1000 Surat	Surat Masuk 492 Surat dan Surat Keluar 692 Surat
3	Tertib administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Yang diuruskan administrasi Kepegawaiannya	Orang	5 Orang	5 Orang

NO	PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN TARGET	REALIASASI ANGGARAN
----	---------	--------	---------------	----------------	---------------------

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	716.466.332	97,21%	696.486.032
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	380.413.700	96,89	368.600.700
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Rp5.499.800	70,96	Rp3.902.800
1.3.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp102.788.600	99,77	Rp102.556.600
1.3.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Rp13.386.300	96,56	Rp12.926.300
1.3.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	Rp101.494.000	97,71	Rp99.166.000
1.3.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Rp13.645.000	75,79	Rp10.341.800
1.3.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	3.600.000	55,56	2.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Rp140.000.000	98,36	Rp137.707.200
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	336.052.632	76,67%	327.885.332
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.992.800	100,00	2.992.800
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp77.145.000	91,56	Rp70.636.520
1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp29.745.000	99,18	Rp29.500.000
1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Rp226.169.832	99,37	Rp224.756.012

JUMLAH	716.466.332	92,78%	696.486.032
---------------	--------------------	---------------	--------------------

Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Menurut Target Capaian Output Kantor Camat Teluk Bayur Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	84,47
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	B (64,00)	CC (58,21) Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Satuan	TARGET	REALISASI
1	Disiplin Aparatur Kecamatan	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Orang	0	2 Orang (3 surat Teguran)
2	Tertib Administrasi Umum	Jumlah Surat Masuk dan <u>Keluar</u>	Surat	Surat Masuk 500 Surat, Surat Keluar 1000 Surat	Surat Masuk 492 Surat dan Surat Keluar 692 Surat
3	Tertib administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Yang diuruskan administrasi Kepegawaiannya	Orang	5 Orang	5 Orang

NO	PROGRAM	TARGET	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN TARGET	REALIASASI ANGGARAN
-----------	----------------	---------------	----------------------	-----------------------	----------------------------

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	716.466.332	97,21%	696.486.032
1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	380.413.700	96,89%	368.600.700
1.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Rp5.499.800	12 Bulan	Rp3.902.800
1.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Rp102.788.600	12 Bulan	Rp102.556.600
1.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	Rp13.386.300	12 Bulan	Rp12.926.300
1.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Rp101.494.000	12 Bulan	Rp99.166.000
1.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Rp13.645.000	12 Bulan	Rp10.341.800
1.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3.600.000	12 Bulan	2.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Rp140.000.000	12 Bulan	Rp137.707.200
1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	336.052.632	97,57%	327.885.332
1.2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.992.800	12 Bulan	2.992.800
1.2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Rp77.145.000	12 Bulan	Rp70.636.520
1.2.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	Rp29.745.000	6 Jenis	Rp29.500.000
1.2.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Rp226.169.832	12 Bulan	Rp224.756.012
			716.466.332	97,21	696.486.032

Menurut analisis hasil capaian kinerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian bahwa berdasarkan anggaran yang diberikan untuk sub bagian umum dan kepegawaian sebesar Rp. 716.466.332,- telah dapat merealisasi anggarannya sebesar Rp. 696.486.032,- atau sebesar 97,21 % serta apabila dilihat dalam tabel IV.15 bahwa capaian kinerja sub bagian umum dan kepegawaian menurut capaian output menyatakan bahwa target capaian output kinerja sub bagian umum dan kepegawaian dapat dikatakan tercapai pada tahun 2022.

- ***Rencana Tindak Lanjut***

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada sub bagian umum dan kepegawaian pada kecamatan Teluk Bayur perlu dilakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja yaitu melalui :

- 2 Pembinaan terhadap pegawai akan pentingnya kehadiran pegawai untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi masing masing pegawai sehingga dapat memaksimalkan tugas tugas dikantor dan juga guna menghilangkan adanya surat teguran kepada pegawai yang tidak disiplin dalam kehadiran di kantor.
- 3 Memberikan pembinaan tentang tugas pokok dan fungsi masing masing pegawai kantor camat Teluk bayur Melaksanakan evaluasi tentang kehadiran pegawai setiap sebulan sekali.
- 4 Menertibkan surat masuk dan surat keluar, segera mengagendakan surat masuk dan keluar agar tidak terlupa.
- 5 Memberikan reward dan punishment terhadap pegawai untuk merespon tingkat capaian kehadiran pegawai di kantor camat Teluk Bayur.

- ***Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset***

- **Tugas Pokok Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset**

- ✓ Menyusun rencana kerja Sub Bag Penyusunan Program, Keuangan Dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang

berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- ✓ Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- ✓ Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- ✓ Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbag Penyusunan Program. Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- ✓ Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- ✓ Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program kecamatan
- ✓ Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing- masing unit kerja;
- ✓ Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realitas yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan startegik jangka pendek, menengah dan panjang;
- ✓ Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan local sebagai bahan pengambilan keputusan;
- ✓ Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana

strategis dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;

- ✓ Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan public Kecamatan dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku;
- ✓ Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;
- ✓ Meneliti dan memverivikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dangan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan kecamatan;

- ✓ Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup kecamatan;
- ✓ Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan kecamatan;
- ✓ Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran dilingkungan kecamatan
- ✓ Menyusun instrument pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- ✓ Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ✓ Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi dilingkungan kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- ✓ Mengatur pengelolaan ATK dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan kecamatan agar penggunaannya efektif dan efisien;
- ✓ Mengevaluasi dan menilai kerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- ✓ Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- ✓ Melaporkan kegiatan Subbag penyusunan program, keuangan dan aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- ✓ Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut

- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan di Kecamatan, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas serta pengelolaan administrasi dan penatusahaan keuangan dan aset Kecamatan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai Fungsi :

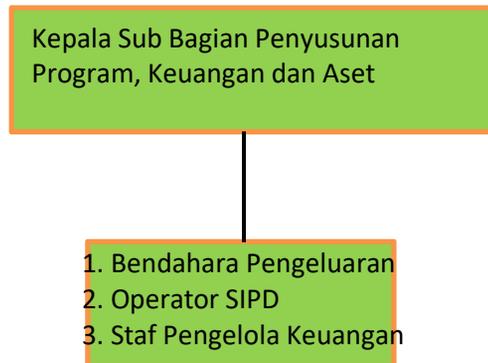
3. Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan aset berdasarkan Renstra, data dan Informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
4. Mempelajari, menganalisa, Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program kecamatan
5. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, , Perjanjian Kinerja,
6. Mengatur dan mendistribusikan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dengan tugas sub bagian penyusunan program, keuangan dan aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
7. Meneliti, memverifikasi dan mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup kecamatan

8. Mengendalikan pembayarann belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan kecamatan.
9. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan orgniasasi dilingkungan kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
11. Mengatur pengelolaan Alat tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi dilingkungan kecamatan agar penggunaannya efektif dan sefisien
12. Mengevaluasi dan menilai kinerja /prestasi bawahan berasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
13. Mengevaluasi kegiatan bagian penyusunan program, keuangan dan aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan serta pemecahan masalah dan melaporkan pelaksanaan program sub bagian penyusunan program, keuangan dan aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
14. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tetantang langkah langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
15. Menyusun Laporan Penyelengaran Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kecamatan
16. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)Kecamatan
17. Menginput Realisasi Keuangan dalam aplikasi Tepra
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk

atasan

- **Struktur Sub Bagian Penyusunan Proogram, keuangan dan Aset**

Pada Tahun 2022, jumlah Pegawai yang ada pada bagian sub bagian penyusunan Program, Keuangan dan Aset adalah sebanyak 5 pegawai, yaitu 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, dan 4 orang staf yang dapat dilihat pada tabelstruktur dibawah ini :



- **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program Keuangan dan Aset Pada tahun 2022 dalam anggaran maupun target capaian kinerja berdasarkan output yang di capai dapat dilihat padatabel di bawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	84,49
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	B (64,00)	CC (58,21)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASUBBAG PENY.PROG, KEU DAN ASET	Satuan	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Teluk Bayur	Nilai LKJIP Kecamatan Teluk Bayur	Nilai	B (64,00)	CC (58,21)

2	Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang disusun dan benar	Dokumen	5	5
3	Tertib Administrasi Aset	Jumlah Laporan Aset / Rekon aset	Kali	1	1
NO	URAIAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.782.107.751	5.843.673.828	86,16
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp37.500.000	Rp30.034.100	80,09
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Rp25.000.000	Rp22.224.100	88,90
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Rp12.500.000	Rp7.810.000	62,48
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp5.464.131.435	Rp4.971.524.612	90,98
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp5.273.751.435	Rp4.788.644.612	90,80
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	100%	Rp190.380.000	Rp182.880.000	96,06
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp10.000.000	Rp8.699.600	87,00
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Rp10.000.000	Rp8.699.600	87,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp15.000.000	Rp15.000.000	100,00
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Rp15.000.000	Rp15.000.000	100,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp380.413.700	Rp368.600.700	96,89
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Rp5.499.800	Rp3.902.800	70,96
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp102.788.600	Rp102.556.600	99,77

1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Rp13.386.300	Rp12.926.300	96,56
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	Rp101.494.000	Rp99.166.000	97,71
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Rp13.645.000	Rp10.341.800	75,79
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	3.600.000	2.000.000	55,56
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Rp140.000.000	Rp137.707.200	98,36
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp438.010.000	Rp20.929.500	4,78
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	Rp438.010.000	Rp20.929.500	4,78
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp336.052.632	Rp327.885.332	97,57
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.992.800	2.992.800	100,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp77.145.000	Rp70.636.520	91,56
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp29.745.000	Rp29.500.000	99,18
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Rp226.169.832	Rp224.756.012	99,37
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp100.999.984	Rp100.999.984	100,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	Rp74.999.984	Rp72.977.550	97,30
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	Rp26.000.000	Rp25.980.000	99,92
Jumlah			Rp6.782.107.751	Rp5.843.673.828	86,16%

angan dan Aset
Berdasarkan Capaian Output
Kantor Camat Teluk Bayur Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	84,49
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	B (64,00)	CC (58,21)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASUBBAG PENY.PROG, KEU DAN ASET	Satuan	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Teluk Bayur	Nilai LKJIP Kecamatan Teluk Bayur	Nilai	B (70,00)	CC (82,66)
2	Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang disusun dan benar	Dokumen	5	5
3	Tertib Administrasi Aset	Jumlah Laporan Aset / Rekon aset yang disusun dan dilaporkan	Kali	1	1

NO	URAIAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.782.107.751	5.843.673.828	86,16
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp37.500.000	Rp30.034.100	80,09
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp25.000.000	Rp22.224.100	6 Dokumen
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp12.500.000	Rp7.810.000	1 Dokumen
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp5.464.131.435	Rp4.971.524.612	90,98
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Rp5.273.751.435	Rp4.788.644.612	12 Bulan

1.2. 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Rp190.380.000	Rp182.880.000	12 Bulan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp10.000.000	Rp8.699.600	87,00
1.3. 1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	Rp10.000.000	Rp8.699.600	1 Dokumen
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp15.000.000	Rp15.000.000	100,00
1.4. 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 Stel	Rp15.000.000	Rp15.000.000	25 Stel
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp380.413.700	Rp368.600.700	96,89
1.5. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Rp5.499.800	Rp3.902.800	12 Bulan
1.5. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	Rp102.788.600	Rp102.556.600	4 Jenis
1.5. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	Rp13.386.300	Rp12.926.300	6 Jenis
1.5. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48 Kali	Rp101.494.000	Rp99.166.000	48 Kali
1.5. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	Rp13.645.000	Rp10.341.800	2 Jenis
1.5. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	3.600.000	2.000.000	2 Jenis
1.5. 7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Kali	Rp140.000.000	Rp137.707.200	200 Kali
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp438.010.000	Rp20.929.500	4,78
1.6. 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	Rp438.010.000	Rp20.929.500	1 Unit
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp336.052.632	Rp327.885.332	97,57
1.7. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	2.992.800	2.992.800	2 Jenis
1.7. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Rp77.145.000	Rp70.636.520	12 Bulan
1.7. 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	Rp29.745.000	Rp29.500.000	6 Jenis

1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Orang	Rp226.169.832	Rp224.756.012	6 Orang
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp100.999.984	Rp100.999.984	100,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit%	Rp74.999.984	Rp72.977.550	12 Unit
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Gedung	Rp26.000.000	Rp25.980.000	2 Gedung
Jumlah			Rp6.782.107.751	Rp5.843.673.828	86,16%

Sesuai dengan dokumen indikator kinerja dan perjanjian kinerja sub bagian penyusunan program, keuangan dan aset dimana salah satu indikator kinerja utama kantor camat Teluk Bayur berada di bagian penyusunan program keuangan dan aset yaitu hasil evaluasi LKJ-IP, berikut hasil evaluasi Indikator kinerja utama Kecamatan Teluk Bayur , dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	84,49
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	B (64,00)	CC (58,21) Hasil Evaluasi tahun 2021

Untuk analisis kinerja di Sub Bagian Penyusunan Program apabila berdasarkan anggaran yang diberikan sebesar Rp. 6.782.107.751,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.843.673.828,- atau sebesar 86,16%, dan apabila berdasarkan capaian output target yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja juga dapat dicapai 100 % dimana untuk dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan capaian Kinerja SKPD dapat dicapai yaitu sejumlah 5 dokumen. Apabila dilihat dari indikator kinerja individu dari sub bagian penyusunan program keuangan dan aset yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Teluk Bayur yang juga merupakan indikator kinerja utama dari kecamatan Teluk Bayur bahwa hasil evaluasi LKJ-IP yang didapat adalah **“CC (58,21)”** untuk hasil evaluasi LKJ-IP tahun 2021 yang diperiksa pada tahun 2022 apabila di banding dengan hasil LKJIP tahun 2020 yang diperiksa pada tahun 2021 yaitu

“CC (57,49)” adalah mengalami kenaikan. Dengan demikian bahwa target yang dicapai baik berdasarkan anggaran yang diterima, berdasarkan indikator

kinerja individu dan menurut indikator kinerja utama di sub bagian penyusunan program keuangan dan aset dapat dikatakan tercapai dengan cukup

D. Rencana Tindak Lanjut

Untuk sub bagian penyusunan program, dalam mencapai target capaian kinerja ada beberapa langkah yang harus di laksanakan oleh sub bagian penyusunan program keuangan dan aset yaitu :

- A. Tepat waktu dalam menegerjakan Penyusunan Program, Laporan Keuangan dan Aset.
- B. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di sub bagian penyusunan program keuangan dan aset terutama untuk penyusunan laporan LKJ-IP Kecamatan sehingga aparatur penyusun LKj-IP dapat mengerti dan mengetahui seperti apadokumen LKJ-IP yang baik dan benar.
- C. Menambah jumlah staf di bagian penyusunan Program Keuangan dan Aset sehingga setiap staf hanya mengerjakan 1 tugas saja agar terfokus dan dapat menghasilkan kinerja yang baik.
- D. Tidak menggandakan pekerjaan aparatur di sub bagian penyusunan program keuangan dan aset dengan pekerjaan bagian / seksi yang lain karena akan menurunkan kinerja aparatur di sub bagian penyusunan program, keuangan dan Aset.
- E. Adanya evaluasi terhadap LKJ-IP / LAKIP dari tahun ke tahun untuk mencapai nilai yang baik.

b.Seksi Pemerintahan

• Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan

- Menyusun rencana kerja Kasi Pemerintahan berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Kasi Pemerintahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

- Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Kasi Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Kasi Pemerintahan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Kasi Pemerintahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan wilayah kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala kampung/lurah;
- Mengontrol penyiapan pedoman pelaksanaan dan memfasilitasi pembinaan pemerintahan dan keagrariaan
- Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan pemohon. Menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memfasilitasi pembinaan social politik pelaksanaan kegiatan pemilu di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengontrol penyusunan laporan kependudukan secara berkala berdasarkan laporan dari kepala kampung/lurah
- Memfasilitasi penyelesaian tapal batas kampung /kelurahan
- Memfasilitasi pembentukan lembaga pemerintahan kampung (BPK dan LPM)

untuk pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- Melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

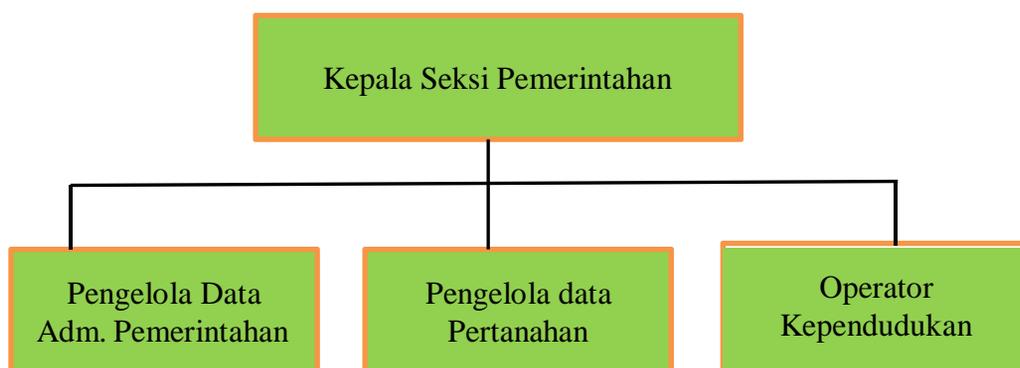
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut : Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi camat dibidang pemeritahan yang melaiputi pelaksanaan dan pelayanan admininstrasi Pemerintahan umum dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahankampung dan Kelurahan.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kerja Seksi Pemerintahan
- Membimbing inventarsasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan Pemerintahan wilayah Kecamatan
- Mengontrol Penyiapan Pedman Pelaksanaan dan Memfasilitasi Pembinaan Pemerintahan dan Keagrarian

- Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi Pertanahan
 - Mefasilitasi penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi
 - Mengontrol penyusunan Laporan Kependudukan secara berkali
 - Mefasilitasi penyelesaian tapal batas Kampung / Kelurahan
 - Mefasilitasi pembentukan Lembaga Pmerintahan Kampung (BPK dan LPM) dan mefasilitasi Pemilihan Kepala Kampung
 - Mengevaluasi kinerja bawahan serta pelaksanaan kegiatan seksipemerintahan
 - Melaksnakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan
- ***Struktur Seksi Pemerintahan***

Pada Tahun 2022, struktur Organisasi di seksi pemerintahan terdiri dari 3 (empat) orang yaitu 1(satu) orang Kepala Seksi Pemerintahan, dan 1 (Orang) orang staf PNS dan 1 (satu) orang Tenaga Kontrak sebagai operator Pelayanan Kependudukan. Struktur tersebut dapat dilihat dibawah ini :



C.Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada tahun 2022 Seksi Pemerintahan Mendapatkan anggaran kegiatan yang bersumber dari DPA dan DPPA Kecamatan Teluk Bayur Tahun anggaran 2022 yang tergambar pada Perjanjian kinerja seksi Pemerintahan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	84,49
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	B (64,00)	CC (58,21) Hasil Evaluasi tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI PEMERINTAHAN	Satuan	TARGET
1	Tertib Administrasi Kependudukan	Jumlah Kampung Yang Melaporkan Jumlah Penduduknya setiap Bulan	Kampung	4 Kamp. 2 Kel
2	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kampung/Kelurahan	Jumlah Pembinaan Perangkat Kampung/Kelurahan	Kegiatan	2

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1			APBD
JUMLAH			

Pada Tahun 2022 dalam perjalanan setahun melakukan perubahan anggaran, sehingga hal ini pun berpengaruh pada anggaran yang dipos kan pada seksi pemerintahan untuk kegiatan di seksi pemerintahan. Pada anggaran murni di seksi pemerintahan tidak mendapatkan anggaran. Pada anggaran perubahan pun seksi pemerintahan tidak mendapatkan anggaran . Reviuw terhadap anggaran perubahan di seksi pemerintahan pun tidak dilaksanakan karena tidak ada perubahan :

Kegiatan yang tidak bersumber dari DPA atau DPPA Kecamatan SegahSeperti :

- Pembinaan Administrasi Pertanahan

Untuk Kegiatan Pembinaan administrasi Pertanahan ini telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Teluk Bayur dalam hal ini adalah seksi Pemerintahan, saat ini untuk administrasi Pertanahan telah berjalan dengan baik dan masyarakat pun mengetahui tanah yang mana yang dapat dan yang tidak dapat untuk dibuat surat tanahnya.

- **Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah**

Untuk Kegiatan Fasilitasi seksi Pemerintahan telah melakukan fasilitasi sengketa tanah di tahun 2022 sebanyak 2 kali, baik sengketa antara masyarakat dengan masyarakat maupun sengketa antara Perusahaan dengan Lahan Masyarakat. Dengan status Belum ada yang selesai untuk difasilitasi sengketanya.

- **Pembinaan administrasi Pemerintahan Kampung**

Pembinaan Administrasi Kependudukan selama Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik di seksi pemerintahan, dan sebagai tindak lanjut dari pembinaan administrasi Pemerintahan Kampung, Kecamatan Teluk Bayur melaksanakan lomba Kampung Berprestasi tingkat Kecamatan Teluk Bayur.

- **pembinaan bagi aparatur Kampung Se-Kecamatan Teluk bayur dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Se-Kecamatan Teluk Bayur yang dilaksanakan di Puau Derawan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau sebagai Narasumber kegiatan ini.**

- **Koordinasi pemilihan BPK di setiap kampung yang ada di Kecamatan Teluk Bayur**

c.Rencana Tindak Lanjut

Guna meningkatkan Capaian Kinerja di Seksi Pemerintahan di Kecamatan Teluk Bayur, perlu dilakukan beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan Kualitas capaian kinerja yaitu melalui :

1. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintahan kampung harus dilakukan secara berkesinambungan terkait dengan program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur khususnya di seksi Pemerintahan
2. Perlu adanya komitmen dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan, komitmen terhadap program dan kegiatan yang telah di rencanakan di seksi Pemerintahan
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah kecamatan Teluk Bayur dengan Pemerintahan Kampung
4. Perlu adanya Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur di Seksi Pemerintahan untuk lebih baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di seksi Pemerintahan

d. Seksi Pemeberdayaan Masyarakat

• Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a) Menyusun rencana kerja Seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi pemberdayaan masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pemberdayaan masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

- f) Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan dengancara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala kampung/lurah
- a) Membimbing pengumpulan / pengolahan dan evaluasi data dibidang pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan program kerja kecamatan
- b) Mengontrol kegiatan pembinaan terhadap perkoprasian, industry rumah tangga dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c) Mengontrol kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan diwilyah kecamatan;
- d) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara saran dan prasarana dilingkungan
- e) Membimbing pelaksanaan fasilitas temu karya tingkat kampung dan kelurahan dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat kecamatan
- f) Mengontrol penyusunan daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil forum koordinasi pembangunantingkat kecamatan bersama petugas teknisnya;
- g) Melaksanakan pengawas danpengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan diwilyah kecamatan;
- h) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- o) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;

- p) Melaporkan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- q) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas yaitu :

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan Fungsi Camat dibidang Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan perekonomian, mengadakan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembnagunan dan membuat laporan pembangunan di wilayah Kecamatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

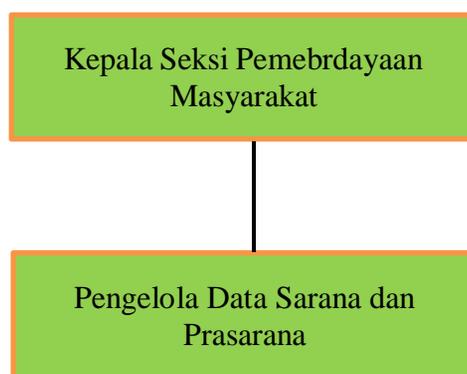
- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembanguna dan pemberdayaan Masyarakat
- b) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan
- c) Mengontrol kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan
- d) Membina pelaksanaan Fasilitasi temu karya tingkat kampung/kelurahan dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat Kecamatan
- e) Mengontrol penyusunan daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil forum koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan
- f) Mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan kegiatan seksi

Pemberdayaan Masyarakat.

- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan Perintah dan Petunjuk Atasan.

B Struktur Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2022 di seksi pemberdayaan Masyarakatnya ada 2 (dua) orang Pegawai saja yang berada di seksi pemberdayaan masyarakat yaitu 1 (satu) orang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan 1 (satu) orang staf Pengelola Data Sarana dan Prasarana.



C Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tahun 2022 untuk seksi Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Teluk Bayur telah membuat Perjanjian Kinerja dan beberapa review perjanjian kinerja pun telah dilakukan sesuai dengan anggaran perubahan rutin yang terjadi setiap tahunnya. Tabel dibawah ini menyajikan perjanjian kinerja menurut anggaran murni di tahun seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KANTOR CAMAT TELUK BAYUR
ANGGARAN MURNI TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TELUK BAYUR	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (64,00)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
----	----------	----------	------------

1	FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp79.200.000	APBD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp439.999.860	APBD
JUMLAH		Rp519.199.860	APBD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Satuan	TARGET
1	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Kampung Yang Memberikan usulan Usulan dalam Musrenbang	Kampung	6
2	Penyerapan Dana Desa / Alokasi Dana Kampung pada	Jumlah Kampung Yang menggunakan Dana Desa nya yang terealisasi dari dana ADK, Dana Bantuan Provinsi, Dana PKK, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Retribusi Dana APBN	Kampung	6

Dalam perjalanan tahun 2022 terjadi perubahan anggaran yang juga berpengaruh terhadap anggaran di seksi pemberdayaan masyarakat di tahun 2022 ini, dengan hal tersebut kecamatan Teluk Bayur telah mengevaluasi anggaran seksi pemberdayaan masyarakat dan perjanjian kerjanya yang dapat dilihat dalam perjanjian kinerja review di bawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA REVIUW
SEKSI PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT KANTOR CAMAT TELUK
BAYUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TELUK BAYUR	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82

2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B
---	-------------------------------------------------------	----------------------	-------	---

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Satuan	TARGET
1	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Kampung Yang Memberikan usulan Usulan dalam Musrenbang	Kampung	6
2	Penyerapan Dana Desa / Alokasi Dana Kampung pada	Jumlah Kampung Yang menggunakan Dana Desa nya yang terealisasi dari dana ADK, Dana Bantuan Provinsi, Dana PKK, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Retribusi Dana APBN	Kampung	6

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Rp214.999.860	APBD
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp210.000.000	APBD
3	Fasilitasi Peningkatan Keuangan desa dan pendayagunaan aset	Rp59.200.000	APBD
JUMLAH		Rp484.199.860	APBD

Seksi Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2022 telah merealisasikan Program dan Kegiatan beserta anggarannya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

REALISASI PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR CAMAT TELUK BAYUR
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00	82,47
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	B (70,00)	CC(57,21)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Satuan	TARGET
1	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Kampung Yang Memberikan usulan Usulan dalam Musrenbang	Kampung	6
2	Penyerapan Dana Desa / Alokasi Dana Kampung pada	Jumlah Kampung Yang menggunakan Dana Desa nya yang terealisasi dari dana ADK, Dana Bantuan Provinsi, Dana PKK, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Retribusi Dana APBN	Kampung	6

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan	Rp214.999.860	APBD
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp210.000.000	APBD
3	Fasilitasi Peningkatan Keuangan desa dan pendayagunaan aset	Rp59.200.000	APBD
JUMLAH		Rp484.199.860	APBD

REALISASI PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN CAPAIAN OUTPUT KANTOR
CAMAT TELUK BAYUR
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
----	-------------------	-------------------	--------	-----------

1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00	82,47
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	B (70,00)	CC(57,21)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Satuan	TARGET
1	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Kampung Yang Memberikan usulan Usulan dalam Musrenbang	Kampung	6
2	Penyerapan Dana Desa / Alokasi Dana Kampung pada	Jumlah Kampung Yang menggunakan Dana Desa nya yang terealisasi dari dana ADK, Dana Bantuan Provinsi, Dana PKK, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Retribusi Dana APBN	Kampung	6

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan	Rp214.999.860	APBD
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp210.000.000	APBD
3	Fasilitasi Peningkatan Keuangan desa dan pendayagunaan aset	Rp59.200.000	APBD
JUMLAH		Rp484.199.860	APBD

seksi pemberdayaan berdasarkan anggaran yang diberikan kepada seksi pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 484.199.860 ,- dapat dengan capaian target sebesar 100 % dan anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp.465728610,- dengan hasil persentase sebesar 97,08 %

Untuk capaian target dalam indikator kinerja individu untuk sasaran strategis IKI (indikator kinerja Individu) pertama yaitu Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tercapai dengan baik dikarenakan seluruh Kampung (4 Kampung dan 2 Kelurahan) yang

ada di Kecamatan Teluk Bayur memberikan usulan dalam musrenbang. Dan untuk sasaran strategis kedua yaitu Penyerapan Dana Desa / Alokasi Dana Kampung bahwa anggaran terserap dengan baik di 4 kampung, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Kampung	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
1	Labanan Makmur	Dana ADK		
		Dana Bagi Hasil Pajak Daerah		
		Dana Bagi Retribusi Daerah		
		Dana APBN		
		Banprof		
		Bankeu Kab. Berau (PKK)		
2	Labanan Jaya	Dana ADK		
		Dana Bagi Hasil Pajak Daerah		
		Dana Bagi Retribusi Daerah		
		Dana APBN		
		Banprof		
		Bankeu Kab. Berau (PKK)		
3	Labanan Makarti	Dana ADK		
		Dana Bagi Hasil Pajak Daerah		
		Dana Bagi Retribusi Daerah		
		Dana APBN		
		Banprof		
		Bankeu Kab. Berau (PKK)		
4	Tumbit Melayu	Dana ADK		
		Dana Bagi Hasil Pajak Daerah		
		Dana Bagi Retribusi Daerah		
		Dana APBN		
		Banprof		
		Bankeu Kab. Berau (PKK)		

Untuk Seksi Pemberdayaan Masyarakat kegiatan selain program dan kegiatan yang ada dalam DPPA tahun 2022 Kecamatan Teluk Bayur juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti :

- B.** Pelatihan Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sederhana yang baik dan benar bekerja sama dengan Pemerintah Kampung, dengan target adalah 4 Kampung yang bertujuan agar Kampung dapat menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan fisik di kampung masing masing, agar dalam pelaksanaan kegiatan fisik kampung sudah tidak mengalami kesulitan untuk mengaggarkan biaya dan sesuai dengan aturan dan standar biaya yang berlaku.
- C.** Pendampingan Penyusunan, pertanggung jawaban dana desa serta Penginputan Dana desa dalam aplikasi Siskeudes 3.0 , dimana capaian target tercapai yaitu 4

kampung telah menginput dana desanya mulai dari APBK sampai dengan realisasi dana desa diinput dalam aplikasi siskeudes 3.0 ini. Yang mana dapat dilihat dalam tabel realisasi danadesa dibawah ini :

NO	Kampung	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
1	Labanan Makmur	Dana ADK		
		Dana Bagi Hasil Pajak Daerah		
		Dana Bagi Retribusi Daerah		
		Dana APBN		
		Banprof		
		Bankeu Kab. Berau (PKK)		
2	Labanan Jaya	Dana ADK		
		Dana Bagi Hasil Pajak Daerah		
		Dana Bagi Retribusi Daerah		
		Dana APBN		
		Banprof		
		Bankeu Kab. Berau (PKK)		
3	Labanan Makarti	Dana ADK		
		Dana Bagi Hasil Pajak Daerah		
		Dana Bagi Retribusi Daerah		
		Dana APBN		
		Banprof		
		Bankeu Kab. Berau (PKK)		
4	Tumbit Melayu	Dana ADK		
		Dana Bagi Hasil Pajak Daerah		
		Dana Bagi Retribusi Daerah		
		Dana APBN		
		Banprof		
		Bankeu Kab. Berau (PKK)		

2. Monitoring kegiatan pembangunan di kampung terutama kegiatan Fisik telah dilaksanakan sebanyak 4 kampung dan hal ini dilaksanakan untuk memonitor bahwa pembangunan fisik di kampung telah sesuai dengan RAB dan ketentuan yang telah dianggarkan dalam anggaran dana desa setiap kampung.

'D. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan Capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seksi Pemberdayaan masyarakat yaitu :

A. Memberikan Bimtek atau Pelatihan Kepada aparaturnya yang ada di Seksi

Pemberdayaan dalam hal yang menjadi indikator kinerja utama dari seksi pemberdayaan masyarakat sendiri.

- B. Menempatkan aparatur Kecamatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan untuk ditempatkan di seksi pemberdayaan masyarakat guna memonitoring, membina Kampung Kampung yang ada di Kecamatan Teluk Bayur untuk mengelola Dan kampung yang baik dan benar serta bagaimana pembangunan fisik dilaksanakan dengan aturan yang benar dan pelaksanaan yang baik, sehingga tidak ada penyimpangan yang terjadi di pemakaian dana desanya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial

• Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Menyusun rencana kerja Seksi kesejahteraan sosial berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kesejahteraan sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Kesejahteraan sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kesejahteraan sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
6. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Melakukan koordinasi baik intern maupu ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 8. Membimbing monitoring pendistribusian bantuan raskin kekampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui kebenaran laporan data yang masuk dari kampung/kelurahan
 9. Mengontrol pelaksanaan fasilitas dan pembinaan di bidang agama, kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 10. Mengontrol pelaksanaan fasilitas dan pemantauan pemberian bantuan tempat ibadah, yayasan social dalam wilayah kecamatan baik dana berasal dari pemerintahan maupun dari swasta;
 11. Membimbing pengolahan data biadang kesejahtraan social
 12. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
 13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi kesejahtraan sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
 14. Melaporkan kegiatan seksi kesejahtraan sosial berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 15. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan
- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan Fungsi Camat dibidang Kesejahteraan Sosial yang meliputi fasilitasi kegiatan pembinaan dibidang sosial, agama, kesehatan masyarakat, olahraga, Generasi Muda, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan sosial
- 2) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan Sosial
- 3) Menyusun Program dan Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait dengan kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- 4) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenaga kerjaan dan kemasyarakatan
- 5) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari hari
- 6) Membangun penanganan masalah masalah sosial dan bencana Alam
- 7) Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pemberian bantuan rumah ibadah, yayasan sosial dalam wilayah Kecamatan
- 8) Memonitoring pendistribusian bantuan beras Sejahtera ke Kampung secara langsung.
- 9) Mengevaluasi serta melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan Sosial
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk

- ***Struktur Seksi Kesejahteraan Sosial***

Struktur Organisasi Seksi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2022 terdiri dari 2 Orang yaitu 1 (satu) orang Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan 1 (satu) orang Staf Pengelola Data Kesejahteraan Sosial., struktur Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu :



- *Evaluasi dan Analisis Kinerja*

Pada Tahun 2022 Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Perjanjian kinerja sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR
ANGGARAN MURNITAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TELUK BAYUR	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,00
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (64,00)
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Satuan	TARGET
1	Fasilitasi Program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah Kampung yang mendapatkan Distribusi Beras Sejahtera (Rastra)	Kampung	4
		Jumlah Kampung yang warganya masuk dalam program keluarga harapan	Kampung	4
		Jumlah Kampung yang masyarakatnya Mendapatkan program jaminan kesehatan /	Kampung	4

		bantuan bantuan		
--	--	-----------------	--	--

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 225000000	APBD
JUMLAH		Rp.	

Pada Tahun 2022 terjadi Perubahan anggaran rutin yang terjadi setiap tahunnya yaitu ABT tahun 2022 yang juga mempengaruhi anggaran seksi Kesejahteraan sosial, tabel erjanjian kinerja rewiuw berdasarkan anggaran perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA REWIUW SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIALKANTOR
CAMAT TELUK BAYUR
ANGGARAN PERUBAHANTAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TELUK BAYUR	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,00
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (64,00)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Satuan	TARGET
1	Fasilitasi Program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah Kampung yang mendapatkan Distribusi Beras Sejahtera (Rastra)	Kampung	4
		Jumlah Kampung yang warganya masuk dalam program keluarga harapan	Kampung	4
		Jumlah Kampung yang masyarakatnya Mendapatkan program jaminan kesehatan / bantuan bantuan	Kampung	4

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 225000000	APBD
JUMLAH		Rp.	

Untuk Realisasi Perjanjian Kinerja Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2022 berdasarkan capaian realisasi keuangan maupun menurut capaian realisasi output target yang dicapai, realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL : IV.29
REALISASI PERJANJIAN KINERJASEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEGAH	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI	82,00	84,71
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (70,00)	CC(57,21)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Satuan	TARGET
1	Fasilitasi Program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah Kampung yang mendapatkan Distribusi Beras Sejahtera (Rastra)	Kampung	4
		Jumlah Kampung yang warganya masuk dalam program keluarga harapan	Kampung	4
		Jumlah Kampung yang masyarakatnya Mendapatkan program jaminan kesehatan / bantuan bantuan	Kampung	4

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
----	----------	----------	--------	-----------	----------------

1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kecamatan	225.000.000	100 %	19.520.000	8,68%
JUMLAH		225.000.000	100 %	19.520.000	8,68%

Analisis kinerja seksi kesejahteraan sosial berdasarkan anggaran yang diberikan sebesar Rp. 225.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 19.520.000 atau sebesar 8,68 % dalam hal ini capaian persentase dapat dikatakan baik, dan berdasarkan terget capaian output target yang di renanakan dapat terealisasi dengan baik. Untuk seksi kesejahteraan sosial selain program dan kegiatan yang ada dalam DPPA Tahun 2022 Kecamatan Teluk Bayur seksi kesejahteraan sosial juga melaksanakan beberapa kegiatan seperti :

- 4 Fasilitasi dan monitoring Kegiatan Pembagian Dana Bantuan Sosial baik dari Pemerintah Pusat Maupun Dari Pemerintah Daerah baik yang disalurkan lewat Kantor Pos , maupun yang dari Dana ADK Kampung. Target yang di capai adalah 4 Kampung yang dimonitoring bantuan sosial ke masyarakatnya baik dari dana ADK, Dana pemerintah pusat maupun dari dana bantuan Pemerinta Daerah. Semua telah tersalurkan ke masyarakat yang memang membutuhkannya. Fasilitasi Kegiatan Keluarga Berencana bersama Puskesmas dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Penyuluh KB . kegiatan ini dalam setahun hanya 1 kegiatan saja.

D. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian kinerja seksi kesejahteraan sosial, perlu diperhatikan beberapa langkah berikut ini :

1. Perlu adanya bimbingan teknis, pelatihan atau diklat tentang bidang yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial

2. Perlu adanya penambahan staf di seksi kesejahteraan sosial.
3. Adanya komitmen antara atasan dan staf untuk menjalankan program dan kegiatan di seksi kesejahteraan sosial untuk mencapai kinerja yang baik.

e. *Seksi Pelayanan Umum*

• **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pelayanan Umum**

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan umum berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi pelayanan umum dapat selesai dengan baik dan tepatwaktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi pelayanan umum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pelayanan umum melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi pelayanan umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
6. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan umum dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Membimbing pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dibidang pelayanan umum;
9. Mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang pelayanan umum

10. Menjelaskan standarisasi pelayanan baik kepada masyarakat/warga sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku;
11. Melakukan koordinasi baik intern maupun ektern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
12. Mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas dikecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
13. Membimbing pengolahan data bidang pelayanan umum
14. Mengontrol pembuatan rekomendasi dan perijinan dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
15. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
16. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
17. Melaporkan kegiatan seksi pelayanan umum berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
18. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Kepala Seksi Pelayanan umum mempunyai tugas sebagai berikut :

Melaksanakan sebagian tugas Pokok dan Fungsi Camat dibidang Pelayanan Umum yang meliputi fasilitasi kegiatan

Pelayanan kepadamasyarakat

Kepala Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan umum
 2. Memberikan Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan
 3. Memberikan Pelayanan Pembuatan Rekomendasi
 4. Memberikan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan
 5. Memberikan Pelayanan Perizinan sesuai dengan Kewenangan yangdiberikan oleh Bupati
 6. Mengontrol penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan sesuaidengan peraturan yang berkalu
 7. Membimbing pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di bidangpelayanan umum
 8. Mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang pelayananumum
 9. Mengkoordinasi kegiatan pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan(PATEN)
 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah danpetunjuk atasan.tugas
- Seksi pelayanan umum dapat selesai dengan baik dan tepatwaktu;

- ***Struktur Seksi Pelayanan Umum***

pada selsi Pelayanan Umum pada tahun 2022 hanya ada 2 orang di seksi ini yang menjalankan kegiatan di seksi pelayanan umum yaitu 1)satu) orang Kepala Seksi Pelayanan Umum dan 1 (satu) orang tenaga kontrak, struktur organisasi di seksi pelayanan umum dapat dilihat dibawah ini :



- ***Evaluasi dan Analisis Kinerja***

Pada Tahun 2022 Seksi Pelayanan Umum telah membuat perjanjian kinerja yang berisikan target capaian serta jumlah anggaran yang diberikan kepada seksi pelayanan umum untuk menjalankan kegiatan di tahun 2022, perjanjian kinerja tersebut dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA SEKSI PELAYANAN UMUM KANTOR
CAMAT TELUK BAYUR
ANGGARAN MURNITAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEGAH	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI	82,00	84,71
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (70,00)	CC(57,21)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI PELAYANAN UMUM	Satuan	TARGET
1	Tertib administrasi Pelayanan umum	Jumlah Laporan Survey Kepuasan masyarakat yang dibuat	Kali	2
		Jumlah Laporan Pelayanan administrasi PATEN yang dibuat	Kali	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kecamatan	225.000.000	100 %	19.520.000	8,68%
JUMLAH		225.000.000	100 %	19.520.000	8,68%

Pada akhir tahun 2022 seksi pelayanan umum mempunyai realisasi perjanjian kinerja baik berdasarkan jumlah anggaran yang dapat di relaisasikan maupun berdasarkan realisasi capaian output target yang dapat dicapai, kedua realisasi tersebut dapat

ddigambarkan seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJASEKSI PELAYANAN UMUM
BERDASARKAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR CAMAT TELUK BAYUR TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEGAH	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI	82,00	84,71
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (70,00)	CC(57,21)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI PELAYANAN UMUM	Satuan	TARGET	REALISASI
1	Tertib administrasi Pelayanan umum	Jumlah Laporan Survey Kepuasan masyarakat yang dibuat	Kali	2	2
		Jumlah Laporan Pelayanan administrasi PATEN yang ditbuat	Kali	1	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI ANGGARAN	REALISASI TARGET
1	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	225.000.000	100 %	19.520.000	8,68%
JUMLAH		Rp225.000.000	100 %	19.520.000	8,68%

Untuk capaian kinerja seksi pelayanan umum berdasarkan capaian output dapat dikatakan tercapai dikarenakan anggaran yang diberikan untuk seksi pelayanan umum pada tahun

2022 sebagian besar dianggarkan untuk penggajian tenaga kontrak operator pelayanan PATEN Kecamatan selama 12 bulan serta tenaga kontrak lainnya yang menunjang pelayanan PATEN Kecamatan Teluk Bayur. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Untuk realisasi Indikator kinerja individu seksi pelayanan umum yaitu tertib administrasi pelayanan umum dalam hal ini ialah Laporan Survey Kepuasan

Masyarakat yang juga merupakan indikator kinerja Utama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan indikator kinerja yaitu hasil survey Kepuasan masyarakat, pada tahun 2022 hasil survey kepuasan masyarakat pada semester 1 tahun 2022 yaitu bernilai 90,11 dan pada semester 2 tahun 2022 bernilai 84,47, bahwa pelaksanaan target indikator individu seksi pelayanan umum tercapai dengan baik yaitu adanya hasil survey kepuasan masyarakat sebanyak 2 kali dalam tahun 2022.

**CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJASEKSI PELAYANAN
UMUM BERDASARKAN CAPAIAN OUT PUT KANTOR CAMAT
TELUK BAYUR TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEGAH	Satuan	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,00	84,47
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (70,00)	CC (57,21)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI PELAYANAN UMUM	Satuan	TARGET	REALISASI
1	Tertib administrasi Pelayanan umum	Jumlah Laporan Survey Kepuasan masyarakat yang dibuat	Kali	2	2
		Jumlah Laporan Pelayanan administrasi PATEN yang	Kali	1	1

		ditbuat			
--	--	---------	--	--	--

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI ANGGARAN	REALISASI TARGET
1	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	225.000.000	12 Bulan	19.520.000	12 Bulan
JUMLAH		225.000.000	12 Bulan	19.520.000	12 Bulan

- ***Rencana Tindak Lanjut***

Untuk seksi Pelayanan umum, ada beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja di seksi pelayanan umum.

- Adanya komitmen antara kepala seksi dengan staf untuk menjalankan program dan kegiatan di seksi pelayanan umum.
- Perlunya 3 orang tenaga pelayanan PATEN kecamatan untuk melengkapi pelayanan di PATEN Kecamatan dimana saat ini masih 1 orang.
- Perlunya pelatihan kepada operator pelayanan paten kecamatan agar mengetahui bagaimana pelayanan paten yang baik dan benar.
- Perlunya ruangan pelayanan paten yang nyaman digunakan untuk pelayanan paten kecamatan.

f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

- Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan ketertiban berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi ketentraman dan Ketertiban dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;

4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi ketertaman dan ketertiban dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
6. Membimbing pelaksanaan tindakan pertolongan cepat terhadap bencana yang terjadi di kecamatan dengan menyertakan satuan polisi pamong praja dan regu linmas kecamatan;
7. Mengontrol proses penerimaan, mencatat, mempelajari surat pengaduan dari masyarakat dan meneruskan kepada atasan untuk dapat tanggapan serta penyelesaian
8. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan rapat insedentil berdasarkan pengaduan, laporan masyarakat dalam rangka mendapatkan penyelesaian sesuai proporsinya;
9. Merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana alam dan lainnya agar akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin
10. Mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamanan dilingkungan kantor camat dan sekitarnya membuat jadwal piket;
11. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bersifat non yustical bersama instansi terkait;
12. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bersifat non yustical bersama instansi terkait
13. Merencanakan, memfasilitasi melaksanakan pembinaan serta monitoring kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
14. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian

15. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi sertapemecahan masalah;
16. Melaporkan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
17. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut:
Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi camat dibidang ketentraman dan Ketertiban yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakkan perauran Perundang-Undangan, pembinaan ideologi serta pembinaan polisi pamong praja.

Kepala seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan
- c. Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan
- d. Membantu Tugas tugas – tugas Polisi Pamong Praja di Bidang Penegakkan Perda
- e. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan
- f. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

- g. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat
- h. Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

• ***Struktur Seksi Ketentraman dan Ketertiban***

Pada tahun 2022 di seksi pemerintahan hanya terdapat 3 (Tiga) orang pegawai yaitu 1 (satu) orang kepala seksi ketentraman dan ketertiban dan 1 (satu) orang pengelola data ketentraman dan 1 (satu) orang tenaga kontrak

penjaga malam / waker. struktur seksi ketentraman dan ketertiban dapat dilihat di bawah ini :

struktur organisasi di seksi pelayanan umum dapat dilihat dibawah ini :



• ***Evaluasi dan Analisis Kinerja***

Pada tahun 2022 di seksi Ketentraman dan Ketertiban membuat perjanjian kinerja antara kepala OPD dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBANKANTOR
CAMAT TELUK BAYUR
ANGGARAN MURNITAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TELUK BAYUR	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,47
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	CC(57,21)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI TRAMTIB	Satuan	TARGET
1	Situasi Keamanan ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah Linmas Kampung Yang Dibina	Kampung	4 Kampung 2 Kelurahan
		Jumlah Kampung Yang di Monitoring Kegiatan Siskamling nya	Kampung	4 Kampung 2 Kelurahan
		Pelaporan periodik ipolksosbud dan Laporan Cepat Kejadian Khusus	Laporan (Persemester)	2

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp. 25.000.000	APBD
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 15.000.000	APBD
JUMLAH		Rp40.000.000,-	

Kemudian pada tahun 2022 terjadi perubahan terhadap anggaran kantor camat Teluk Bayur yang dituangkan dalam DPPA 2022 kecamatan T e l u k B a y u r , Namun untuk Seksi Ketenteraman dan Ketertiban tidak Mengalami perubahan anggaran yaitu

tetap sebesar Rp. 60.000.000,- untuk 2 kegiatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TELUK BAYUR	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,47
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	CC(57,21)
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI TRAMTIB	Satuan	TARGET
1	Situasi Keamanan ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah Linmas Kampung Yang Dibina	Kampung	4 Kampung 2 Kelurahan
		Jumlah Kampung Yang di Monitoring Kegiatan Siskamling nya	Kampung	4 Kampung 2 Kelurahan
		Pelaporan periodik ipolksosbud dan Laporan Cepat Kejadian Khusus	Laporan (Persemester)	2

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp. 40.000.000	APBD
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 20.000.000	APBD
JUMLAH		Rp40.000.000,-	

Sedangkan untuk capaian kinerja berdasarkan output yang dicapai bahwa target kegiatan dapat dicapai atau bernilai 100 %.pada tahun 2022 di anggaran perubahan ada perubahan anggaran yang mana tidak diberikan nilai anggaran dikarenakan adanya pengurangan anggaran yang disebabkan adanya pandemic covid 19 saat ini, capai kinerja perjanjian kinerja menurut Capai output dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA BERDASARKAN CAPAIAN
OUTPUT SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBANKANTOR
CAMAT TELUK BAYUR TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TELUK BAYUR	Satuan	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,47
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	CC(57,21)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI TRAMTIB	Satuan	TARGET
1	Situasi Keamanan ketertiban dan	Jumlah Linmas Kampung Yang Dibina	Kampung	4 Kampung 2 Kelurahan
	kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah Kampung Yang di Monitoring Kegiatan Siskamling nya	Kampung	4 Kampung 2 Kelurahan
		Pelaporan periodik ipolksosbud dan Laporan Cepat Kejadian Khusus	Laporan (Persemester)	2

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI ANGGARAN	REALISASI TARGET
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp. 40.000.000	100 %	Rp. 35.478.000	88,70 %
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 20.000.000	100 %	Rp. 19.720.000	98,60 %
JUMLAH		60.000.000	100 %	Rp.55.198.000	91,99 %

Sedangkan untuk capaian kinerja berdasarkan output yang dicapai bahwa target kegiatan dapat dicapai atau bernilai 100 %.pada tahun 2022 di anggaran perubahan ada perubahan anggaran yang mana tidak diberikan nilai anggaran dikarenakan adanya pengurangan anggaran yang disebabkan adanya pandemic covid 19 saat ini, capai kinerja perjanjian kinerja menurut Capai output dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJABERDASARKAN CAPAIAN OUTPUT
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBANKANTOR CAMAT TELUK BAYUR
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEGAH	Satuan	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,00	84,47
2	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP / LAKIP	Nilai	B (64,00)	CC(57,21)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KASI TRAMTIB	Satuan	TARGET	REALISASI
1	Situasi Keamanan ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah Linmas Kampung Yang Dibina	Kampung	4 Kamp. 2 Kel	4 Kamp. 2 Kel
		Jumlah Kampung Yang di Monitoring Kegiatan Siskamling nya	Kampung	4 Kamp. 2 Kel	4 Kamp. 2 Kel
		Pelaporan periodik ipolksosbud dan Laporan Cepat Kejadian Khusus	Laporan (Persemester)	2	2

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI ANGGARAN	REALISASI TARGET
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp. 40.000.000	100 %	Rp. 35.478.000	88,70 %
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 20.000.000	100 %	Rp. 19.720.000	98,60 %
JUMLAH		60.000.000	100 %	Rp.55.198.000	91,99 %

Analisa berdasarkan jumlah anggaran yang diberikan pada seksi ketenteraman dan ketertiban senilai Rp. 60.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 55.198.000 dengan persentase sebesar 91,99 % hal ini dimaksudkan bahwa kegiatan terealisasi dengan baik di seksi ketenteraman dan ketertiban. Dan apabila dianalisa untuk capaian kinerja berdasarkan target capaian output hal ini tercapai dengan baik dikarenakan capaian output yang direncanakan atas kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas penanganan ketenteraman dan ketertiban tingkat kecamatan adalah 3 kegiatan dan yang terealisasi atas kegiatan tersebut juga 3 kegiatan. Maka dapat dikatakan kegiatan ini untuk capaian kinerja outputnya pun tercapai dengan baik.

Selain tugas dan tanggung jawab di program dan kegiatan yang telah ada dalam DPPA 2022 kecamatan Teluk Bayur, seksi ketenteraman dan ketertiban juga melaksanakan kegiatan seperti :

1. Sosialisasi dan Pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan di masa pandemic covid 19. Target tercapai yaitu di 4 kampung dan 2 Kelurahan .
2. Razia makanan dan minum kadaluarsa dalam rangka memberika rasa aman kepada masyarakat dalam mengkonsumsi makan dan minuman yang beredar di

pedagang. Target Kelurahan adalah Kelurahan Rinding dan Kelurahan Teluk Bayur 2 dan 4 kampung yaitu Tumbit Melayu, Labanan Makmur, Labanan Jaya, dan Labanan Makarti dan target tercapai telah dilaksanakan di 4 (empat) kampung terdekat dengan kecamatan dikarenakan merupakan pusat perdagangan terbesar di kecamatan Teluk Bayur.

3. Pembinaan dan Penertiban Pedagang yang berjualan dilahan milik Pemerintah daerah, serta tempat tempat yang tidak layak untuk di buat tempat berdagang. Dilaksanakan di sekitar area kantor Camat Teluk Bayur, Perumahan kantor Camat Teluk Bayur, Perumahan Puskesmas Teluk Bayur.
4. Fasilitasi Sidang Tera bagi para pedagang yang memiliki Timbangan yang digunakan dalam berdagang bekerja sama dengan dinas terkait.

- ***Rencana Tindak Lanjut***

Di seksi ketentraman dan ketertiban upaya – upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari seksi ketentraman dan ketertiban adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya komitment dari kepala seksi ketentraman dan ketertiban bersama staf untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada di seksi ketentraman dan ketertiban
2. Perlu adanya penambahan jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kegiatan yang sifatnya ada di luar program/kegiatan dalam hal ini adalah perjalanan dinas dalam daerah untuk seksi ketentraman dan ketertiban.
3. Perlu adanya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi di seksi ketentraman dan ketertiban untuk mencapai kinerja yang baik.
4. Perlu adanya pelatihan di bidang ketentraman dan ketertiban bagi aparatur yang ada di seksi ketentraman dan ketertiban.

BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2022. Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk Penyelenggaraan yang baik sebagaimana oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten / Evaluasi Kinerja telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

5.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

1. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2022 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (Performance Goverment) sebagai kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan Permenpan 53 Tahun TA 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
2. Laporan Kinerja Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2022 merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 dan merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja dalam bidang Pengawasan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi,

misi, tujuan dan sasaran strategis.

3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pencapaian sasaran 1 (satu) Meningkatnya Pelayanan Umum / Pelayanan Kepada Masyarakat dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana pada tahun 2022 mencapai nilai 84,47 dimana target yang dicapai melebihi target yang diinginkan yaitu 82,00, hal ini pun terjadi pada tahun 2021, 2020 dan 2019 dimana target tahun 2018 sebesar 85,00 dan pencapaian target sebesar 85,14, pada tahun 2019 target yang ingin dicapai dari IKM adalah 85,50 dan target yang dicapai adalah 90,58. Dan pada tahun 2019 target yang dicapai adalah 90,58 dimana target pada tahun 2019 adalah 86,00. Pada tahun 2020 target IKM adalah 86,5 sedangkan target yang tercapai adalah 90,03. Pada tahun 2021 target yang ingin dicapai adalah sebesar 87,00 sedangkan target yang tercapai adalah 89,47. Target pencapaian Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahun	Target Yang ingin dicapai	Target yang dicapai / tercapai	Keterangan
1	2018	85,00	85,14	Melebihi Target
2	2019	85.50	90,58	Melebihi Target
3	2020	86,00	90,58	Melebihi target
4	2021	86,50	95,08	Melebihi Target
5	2022	82,00	84,47	Melebihi Target

Penyebab utama tercapainya target Sasaran Strategis pertama yaitu meningkatnya pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat adalah

1. Adanya kerjasama seluruh aparaturnya untuk mengutamakan pelayanan

umum/pelayanan kepada masyarakat

2. Dibuatnya jadwal Petugas Pelayanan di pelayanan Paten Kecamatan Setiap bulannya sehingga masyarakat merasakan Pelayanan prima di Kecamatan Teluk Bayur
 3. Dengan membuat kondisi yang nyaman dan aman bagi masyarakat pada saat melakukan pelayanan umum.
 4. Selalu Ramah dengan masyarakat, dengan cara salam, senyum dan sapa
 5. Selalu memperbaiki kekuarangan di tahun sebelumnya, walaupun dengan kondisi jumlah aparatur dan sarana prasarana yang telah ada.
- b. .Pencapaian sasaran 2 (dua) Menigkatnya Akuntabilitas kinerja kecamatan dengan indikator Kinerja adalah Nilai LKJ-IP / LAKIP. Pada tahun anggaran 2020 nilai LKJIP/Lakip yang diperoleh adalah 57,19(CC) yang dievaluasi pada tahun 2022. Sedangkan nilai LKJIP/LAKIP Tahun anggaran 2022 sedangkan LKJ-IP tahun 2022 baru akan diterima pada tahun 2023 nanti. Berikut adalah hasil Evaluasi LKJ-IP /LAKIP Kantor Camat Teluk Bayur dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Tahun	Target Yang ingin dicapai	Target yang dicapai / tercapai	Keterangan
1	2020	B (62,00)	57,19,(CC)	Kurang Dari Target
2	2021	B (62,00)	58,21 (CC)	Kurang Dari Target
3	2022	B (62,00)		Belum ada hasil evaluasi LKJ-IP / LAKIP TA.2022

.Agar tercapainya sasaran strategis yang kedua yaitu Akuntabilitas kinerja Kecamatan disarankan :

5. Adanya Kerjasama seluruh aparatur untuk membantu dalam penyusunan LKJ-IP /

LAKIP yang baik

6. Adanya keinginan dan komitmen Pimpinan untuk merubah dokumen Perencanaan Strategis, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan kinerja maupun Pencapaian sasaran kinerja.
7. Adanya evaluasi terhadap LKJ-IP / LAKIP dari tahun ke tahun untuk mencapai nilai yang baik.
8. Adanya komitmen pimpinan untuk mendampingi dalam penyusunan dokumen Perencanaan strategis, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran setiap tahunnya sebagai wujud dukungan untuk mencapai hasil yang baik diakhir tahun.
9. Adanya kerjasama seluruh aparatur Kecamatan Teluk Bayur untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam DPAP Tahun Anggaran 2022
10. Adanya Keinginan aparatur Kecamatan untuk belajar dan semangat bekerja untuk meningkatkan capaian kinerja kecamatan Teluk Bayur setiap tahunnya.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati Berau Kecamatan Teluk Bayur Untuk tahun 2021 – 2026 telah menetapkan Sasaran dan indikator Kinerja Utama yaitu Sasaran adalah Meningkatnya pelayanan umum atau pelayanan publik kepada masyarakat sedangkan Indikator Kinerja Utamanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam kurun waktu satu tahun, hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Semester Pertama yaitu Bulan Januari sampai Juni 2022 hasil survei kepuasan masyarakat sebesar dan pada semester kedua hasil survei kepuasan masyarakat yaitu bulan Juli sampai desember 2022 tersebut sebesar 84,714. Pada tahun 2022 Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau memiliki anggaran sebesar Rp. 9.226.089.447,- dengan rincian Belanja Operasional Sebesar Rp. 10.924.096.647,- dan Belanja Modal Sebesar Rp, 604.838.000,- dengan Realisasi untuk belanja Operasional sebesar Rp. 9.461.719.538,- sedangkan Realisasi belanja Modal sebesar Rp. 188.007.500,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.988.125.042,- Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 4.473.594.496,- dan Belanja Modal Sebesar Rp. 188007500- dengan rincian Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 110.354.500 terealisasi sebesar Rp. 188.007.500 dan Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.0 teralisasi sebesar Rp. 188.007.500 dengan Total Belanja sebesar Rp. 10.924.096.647,- dengan total realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 9.649.727.038,- atau 88,33 % berdasarkan pagu anggaran maka Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau telah mewujudkan Capaian kinerja Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau telah mengoptimalkan anggaran sesuai

dengan visi dan misi Kabupaten Berau. Realisasi Anggaran Kantor Camat Teluk Bayur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Kantor Camat Teluk Bayur

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Silpa anggaran	Persentase kinerja
2018	Gaji dan Tunjangan				
2019	Gaji dan Tunjangan				
2020	Gaji dan Tunjangan	5.630.629.000	4.615.239.420	1.015.389.580	81,97
2021	Gaji dan Tunjangan	4.718.160.413	4.475.838.256	242.322.157	94,86
2022	Gaji dan Tunjangan	5.474.871.435	4.473.594.496	370.792.716	92,34

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kantor Camat Teluk Bayur

Tahun	Belanja Langsung	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Silpa Anggaran	Persentase kinerja
2018	Belanja Langsung				
2019	Belanja Langsung				
2020	Belanja Langsung	4.042.960.800	3.954.818.647	88.142.153	97,82
2021	Belanja Langsung	4.197.575.614	4.027.656.578	169.919.036	95,95
2022		5.474.871.435	4.988.125.042	486.746.393	91,10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Governance dan Clean Government yang melibatkan stakeholders, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Saran / Langkah dimasa mendatang

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kegiatan di Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2021 sudah optimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun tetap diperlukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja. Tidak kalah pentingnya kapabilitas Kantor Camat Teluk Bayur perlu ditingkatkan dengan mengalokasikan Sumber Daya Manusia dan Anggaran Program dan Tentunya dengan Jumlah Anggaran serta Program dan kegiatan yang banyak peran aparatur seperti kualitas Aparatur Kantor Camat Teluk Bayur seharusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan OPD lainnya.

Perlu di lakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Teluk Bayur melalui Pelatihan / Diklat / Bimtek untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Teluk Bayur, serta perlunya menelaah Aparatur mana yang perlu diberikan peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia untuk menunjang Capaian kinerja Kantor Camat Teluk Bayur.

Selain Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Penigkatan Sarana dan prasarana penunjang capaian kinerja perlu juga diperhatikan seperti Komputer/deskbook/Laptop, Printer, Scanner serta kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 sebagai alat pendukung tercapainya kinerja bagi Kantor Camat Teluk Bayur untuk melaksanakan pelayanan dan pembinaan kepada 2 Kelurahan dan 4 kampung yang ada di Kecamatan Teluk Bayur.

Selain itu juga perlu adanya Funishment dan reward terhadap kehadiran aparatur kecamatan Teluk Bayur, dimana funishment tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur kecamatan untuk menjadi lebih baik lagi, sedangkan reward bertujuan untuk menjadikan pemicu atas kehadiran aparatur kecamatan Teluk Bayur untuk hadir bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pada hari kerja.

Komitment Pimpinan serta seluruh aparatur pun menjadi hal yang penting untuk terlaksanakanya program dan kegiatan yang telah disusun dan dianggarkan dalam DPA dan DPPA Kantor Camat Teluk Bayur.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

Teluk Bayur, 31 Januari2023

Camat Teluk Bayur,


ENDANG IRIANI, ST
NIP. 196911221998032003